

Jurnal PPKn

Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Vol. 6 No. 1 Januari 2018

- **PEMIKIRAN KI HAJAR DEWANTARA DALAM MEWUJUDKAN SEKOLAH INKLUSIF SEBAGAI INSTITUSI PENANAMAN KARAKTER**
(Christmas Astriani)
- **PERAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI PENOPANG KARAKTER BANGSA DI ERA GLOBALISASI** (Sulistiani)
- **OPTIMALISASI PERAN KELUARGA DAN SEKOLAH SEBAGAI BASIS PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER** (Siti Anisah)
- **HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA**
(Tri Desti)
- **REKULTURISASI NILAI-NILAI PERDAMAIAN MELALUI PEMBELAJARAN PKN TRANSFORMATIF** (Diana Wulandari)
- **PERAN INTERNET DALAM MEWUJUDKAN *DIGITAL CITIZENSHIP* (STUDI DI KAMPUNG CYBER KOTA YOGYAKARTA)** (Darto Wahidin)
- **STRATEGI PENANGANAN SISWA KORBAN *BULLIYING* DI *HOMESCHOOLING* KAK SETO SOLO** (Laili Mufatakhah)
- ***PROJECT* KINERJA SOSIAL SEBAGAI MODEL PENGEMBANGAN BELA NEGARA DI KALANGAN MAHASISWA** (Natal Kristiono & Tijan)
- ***CIVIC CULTURE* NGAYAH DALAM PEMBELAJARAN PPKn**
(Putu Ronny Angga Mahendra)
- **PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AJARAN KI HADJAR DEWANTARA** (Dwi Wijayanti)

ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KnI) - JAWA TENGAH

Jurnal PPKn

Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Vol. 6 No. 1 Januari 2018

- **PEMIKIRAN KI HAJAR DEWANTARA DALAM MEWUJUDKAN SEKOLAH INKLUSIF SEBAGAI INSTITUSI PENANAMAN KARAKTER**
(Christmas Astriani)
 - **PERAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI PENOPANG KARAKTER BANGSA DI ERA GLOBALISASI** *(Sulistiani)*
 - **OPTIMALISASI PERAN KELUARGA DAN SEKOLAH SEBAGAI BASIS PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER** *(Siti Anisah)*
 - **HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA**
(Tri Desti)
 - **REKULTURISASI NILAI-NILAI PERDAMAIAN MELALUI PEMBELAJARAN PKN TRANSFORMATIF** *(Diana Wulandari)*
 - ***PERAN INTERNET DALAM MEWUJUDKAN DIGITAL CITIZENSHIP (STUDI DI KAMPUNG CYBER KOTA YOGYAKARTA)*** *(Darto Wahidin)*
 - **STRATEGI PENANGANAN SISWA KORBAN *BULLIYING* DI *HOMESCHOOLING* KAK SETO SOLO** *(Laili Mufatakhah)*
 - ***PROJECT* KINERJA SOSIAL SEBAGAI MODEL PENGEMBANGAN BELA NEGARA DI KALANGAN MAHASISWA** *(Natal Kristiono & Tijan)*
 - ***CIVIC CULTURE* NGAYAH DALAM PEMBELAJARAN PPKn**
(Putu Ronny Angga Mahendra)
 - **PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AJARAN KI HADJAR DEWANTARA** *(Dwi Wijayanti)*
-

**ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (AP3KnI) - JAWA TENGAH**

Jurnal PPKn

ISSN 2303-9412

Penerbit

Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
(AP3KnI) - Jawa Tengah

Mitra Bestari

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA. (Universitas Terbuka)
Prof. Dr. Sapriya, M.Ed. (Universitas Pendidikan Indonesia)
Dr. Harmanto, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)
Dr. Samsuri, M.Ag. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Dr. Nurul Zuriah, M.Si. (Universitas Muhammadiyah Malang)

Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi

Dr. Triyanto, SH., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

Ketua Penyunting

Dr. Winarno, S.Pd., M.Si. (Universitas Sebelas Maret)

Anggota Dewan Penyunting

Raharjo, S.Pd., M.Sc
Arif Kriswahyudi, S.Pd.
Siti Aminah, S.Pd.

Alamat Redaksi

Gedung C FKIP UNS
Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta
Telp/Faks. 0271-646939
Email: *jurnal_ppkn@yahoo.com*
Website: <http://ppkn.org>

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt atas terbitnya Jurnal PPKn Vol. 6 No. 1 Januari 2018. Jurnal ini diterbitkan oleh asosiasi PPKn wilayah Jawa Tengah.

Jurnal ini berisi artikel pemikiran dan hasil penelitian dari para guru, dosen, dan pemerhati bidang Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKn). Jurnal ini dapat menjadi referensi dalam penelitian, pembelajaran, maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang PPKn. Sasaran pembaca dari Jurnal ini adalah para guru, dosen, mahasiswa, dan pemerhati PPKn.

Kami mengucapkan terimakasih kepada para editor dan tim penyunting jurnal yang telah bekerjasama dengan baik demi terbitnya jurnal ini.

Surakarta, Januari 2018

Redaksi

DAFTAR ISI

▪ PEMIKIRAN KI HAJAR DEWANTARA DALAM MEWUJUDKAN SEKOLAH INKLUSIF SEBAGAI INSTITUSI PENANAMAN KARAKTER <i>Christmas Astriani</i>	1152-1160
▪ PERAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI PENOPANG KARAKTER BANGSA DI ERA GLOBALISASI <i>Sulistiani</i>	1161-1171
▪ OPTIMALISASI PERAN KELUARGA DAN SEKOLAH SEBAGAI BASIS PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER <i>Siti Anisah</i>	1172-1179
▪ HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA <i>Tri Desti</i>	1180-1188
▪ REKULTURISASI NILAI-NILAI PERDAMAIAN MELALUI PEMBELAJARAN PKN TRANSFORMATIF <i>Diana Wulandari</i>	1189-1199
▪ PERAN INTERNET DALAM MEWUJUDKAN <i>DIGITAL CITIZENSHIP</i> (STUDI DI KAMPUNG CYBER KOTA YOGYAKARTA) <i>Darto Wahidin</i>	1200-1209
▪ STRATEGI PENANGANAN SISWA KORBAN <i>BULLIYING</i> DI HOMESCHOOLING KAK SETO SOLO <i>Laili Mufatakhah</i>	1210-1224
▪ <i>PROJECT</i> KINERJA SOSIAL SEBAGAI MODEL PENGEMBANGAN BELA NEGARA DI KALANGAN MAHASISWA <i>Natal Kristiono & Tijan</i>	1225-1240
▪ <i>CIVIC CULTURE</i> NGAYAH DALAM PEMBELAJARAN PPKn <i>Putu Ronny Angga Mahendra</i>	1241-1251
▪ PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AJARAN KI HADJAR DEWANTARA <i>Dwi Wijayanti</i>	1252-1263

PEMIKIRAN KI HAJAR DEWANTARA DALAM MEWUJUDKAN SEKOLAH INKLUSIF SEBAGAI INSTITUSI PENANAMAN KARAKTER

Christmas Astriani
Program Pascasarjana PPKn UNY, Yogyakarta
E-mail: astri_koe@yahoo.com

Abstract. *Education is an effort to 'enliven' a child to be able to improve his life more perfectly. Its means all children have equal rights to get a good quality of education to prepare their lives in society. Inclusive education provides opportunities for all children with their differences. Therefore, character building of tolerance values is needed. Research method is literature study by library data collecting, reading, recording and research materials processing. The sources and types of data are taken from Ki Hajar Dewantara's book as the main source, and supplemented by scientific journals and books of inclusive education. This aims of this article is describing school as an educational institution which build the character of students in the existing diversity according to the thought of Ki Hajar Dewantara.*

Kata kunci: *Ki Hajar Dewantara, school of inclusion, character planting*

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menuliskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”, dilanjutkan dengan ayat 2 yang berbunyi “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”. Artinya bangsa Indonesia telah memiliki pemikiran tentang hak warga negara mendapatkan pendidikan tanpa memandang kelebihan dan kekurangan seorang individu. Pendidikan menjadi milik semua orang tanpa terkecuali, berangkat dari berbagai perbedaan suku, agama, budaya, nilai, kepribadian, atau keberfungsian fisik maupun psikologis. Hal ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sebagai daya upaya untuk menumbuhkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup. Anak

perlu “dihidupkan” agar perilakunya selaras dengan alam dan masyarakatnya (Dewantara, 2013: 15). Artinya pendidikan menjadi hak semua anak untuk belajar menjadi sehat rohani dan jasmani untuk kesempurnaan hidupnya kelak.

Hasil Deklarasi Bangkok atas Konferensi Menteri Pendidikan Asia Tenggara telah mengakui bahwa proyek SEAMEO tentang kualitas dan kesetaraan dalam pendidikan, menyoroti kekhawatiran kita untuk dapat memenuhi hak semua anak mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas baik. Dijelaskan lebih lanjut bahwa definisi yang komprehensif dari kualitas dan kesetaraan dalam pendidikan meliputi: (1) pendidikan inklusif; (2) pendidikan yang responsive terhadap gender; dan (3) lingkungan belajar yang protektif dan sehat (Deklarasi Bangkok Menteri Pendidikan Asia Tenggara: 2004). Harapan yang tinggi atas pendidikan untuk semua

anak tersebut belum sepenuhnya dapat dilakukan. Masih banyak anak di Indonesia yang belum dapat menikmati pendidikan sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 menunjukkan bahwa dari 4,6 juta anak tidak sekolah, 1 juta diantaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus (cnnindonesia.com, 28 Agustus 2017). Faktor ekonomi keluarga dan jarak memberikan pengaruh pada anak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Atas kebutuhan anak dengan beragam kemampuan yang dimilikinya inilah yang kemudian perlu diselenggarakannya pendidikan inklusif. Dengan demikian pendidikan inklusif menjadi perhatian lebih untuk dapat memberikan pendidikan yang berkualitas baik bagi semua anak.

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang berwawasan multikultural yang dapat membantu peserta didik untuk dapat mengerti, menerima, serta menghargai orang lain dengan bermacam-macam keberagaman yang ada. Pendidikan inklusif adalah sebuah proses pemberdayaan individu sejak dini untuk memiliki pemahaman terbuka menerima siapa saja. Dalam praktiknya, pendidikan inklusif diwujudkan dalam latar sebuah sekolah yang di dalamnya terdapat instrumen yang mendukung, seperti sistem, anak didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat. Marian Wright Edelman (Smith, 2012: 365) dalam bukunya menuliskan pelajaran-pelajaran hidup kepada anak-anak muda dalam konteks keberagaman di Amerika, untuk menghargai setiap perbedaan dengan mengenal tanggung-jawab bersama demi kesejahteraan semua orang di masyarakat. Sopan santun, jujur, dan mengakui bahwa orang lain begitu

dalam keberadaannya. Tidak melakukan hal-hal yang merendahkan satu dengan yang lain. Dengan demikian dalam keberagaman yang ada di masyarakat perlu adanya penekanan pada penanaman nilai sikap yang mampu memberikan penghargaan satu dengan yang lain. Sekolah inklusi sebagai tempat dimana komunitasnya beragam diperlukan adanya pembelajaran yang menanamkan sikap toleransi.

Pada masanya Ki Hajar Dewantara menyatakan keprihatinannya atas kondisi rakyat Indonesia yang belum sepenuhnya mendapatkan haknya atas pendidikan. Beliau berupaya untuk memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia untuk menjunjung derajat kaumnya. Memberikan kemerdekaan manusia atas hidupnya lahir dapat didapat melalui pengajaran, dan memberikan kemerdekaan hidup batinnya yang didapatkan melalui pendidikan. Pendidikan yang diberikan adalah pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan hidup dan berdasarkan kenasionalan. Di bawah ini akan diuraikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan untuk semua anak sebagai persiapan anak sebagai individu, warga Negara, dan warga dunia.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini merupakan salah satu jenis dari metode penelitian kualitatif. Mestika (2004: 54) menuliskan bahwa riset kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Literatur utama yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Buku karya Ki Hajar Dewantara I: Pendidikan dan*

buku tentang pendidikan karakter, serta dilengkapi dengan jurnal tentang peran keluarga dalam pendidikan karakter.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu memberikan analisis terhadap data yang diperoleh, mengorganisasikan data, kemudian disusun untuk menjawab pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan sekolah inklusif sebagai institusi karakter. Dari informasi yang didapat kemudian dituangkan dalam penyajian data dan memberikan kemungkinan dilakukannya penarikan kesimpulan untuk menjawab tujuan penulisan, analisis dan sintesis. Simpulan merepresentasikan pokok bahasan dalam karya tulis kemudian ditarik saran praktis sebagai rekomendasi selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, maka pendidikan diperlukan semua manusia tanpa memandang perbedaan, seperti ras, suku, agama, jender, dan keberfungsian fisik maupun psikologis. Pada kondisi yang beragam ini, maka diperlukan pendidikan inklusif agar dapat memberikan kesempatan kepada semua anak. Berikut akan dipaparkan tentang pendidikan inklusif dalam menjawab keberagaman anak.

1. Konsep Pendidikan Inklusif

Inklusif berasal dari Bahasa Inggris *inclusive* yang artinya adalah termasuk di dalamnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan arti inklusif adalah termasuk atau terhitung. Dengan demikian istilah kata inklusif dapat diartikan menempatkan dirinya

dalam suatu kelompok lain. Tarmansyah (2007: 11) memberikan definisi pendidikan inklusi sebagai sebuah pendektana pendidikan yang berupaya menjangkau semua anak tanpa kecuali. Arti semua anak tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dapat memperoleh pendidikan yang baik.

Pada masanya Ki Hajar Dewantara memberikan gambaran tentang pendidikan inklusi sebagai pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan bagi golongan minoritet. Bahwa pada tahun 1950an masih ada beberapa warga negara asing dengan agama dan kebudayaannya masing-masing berada di Indonesia. Dengan adanya keberagaman tersebut perlu adanya sekolah negeri umum yang menampung semua warga yang ada di Indonesia tanpa kecuali (Dewantara, 2013: 237). Dengan demikian terjadi pembauran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Hal ini sejalan dengan penafsiran yang dilakukan Pontea dan Smitch (2013: 467) bahwa pendidikan inklusi merupakan bentuk pendidikan untuk semua (*education for all*) seperti yang tertuang dalam Konvensi PBB. Hal ini senada dengan pemikiran Smith (2012: 46) yang menuliskan dalam bukunya bahwa inklusi dapat diartikan sebagai suatu komitmen untuk melibatkan siswa-siswa yang memiliki hambatan dalam setiap tingkat pendidikan mereka yang memungkinkan. Smith lebih banyak berbicara tentang pemberian kesempatan belajar bersama anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus ke dalam kelas regular. Kategori kebutuhan khusus yang dimaksudkan dalam bukunya adalah anak-anak dengan kebutuhan keberfungsian baik fisik maupun psikologis, seperti anak dengan kesulitan belajar, anak dengan keterbelakangan mental, anak dengan

berkelainan perilaku, berkelainan fisik, hambatan ucapan dan berbicara, gangguan pengelihat, gangguan pendengaran, dan berkemampuan unggulan dan berbakat istimewa. Ahmad (2010: 73) menuliskan dalam memberikan makna atas keberagaman salah satunya adalah tentang perbedaan individu, yang dibagi menjadi perbedaan dari aspek psikis dan fisik. Dengan keragaman tersebut kita dapat membuatnya sebagai kekuatan atau potensi yang dapat dikembangkan melalui upaya pendidikan.

Lebih lanjut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa atas membaurnya anak-anak yang beragam kewarganegaraannya tersebut maka ada beberapa kebutuhan yang berbeda, seperti bahasa, kesenian, atau agama (Dewantara, 2013: 237). Maka atas perbedaan kebutuhan tersebut sekolah diperbolehkan mengadakan sekolah atau pengajaran yang khusus untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Smith dalam bukunya memberikan beberapa strategi yang harus dilakukan guru atas kebutuhan masing-masing anak. Dengan kebutuhan anak yang berbeda maka strategi yang harus dilakukan guru juga berbeda, misalnya untuk membantu siswa dengan kesulitan belajar maka guru perlu memperlambat laju presentasi materi, menjaga agar siswa tetap terlibat dalam memberi pertanyaan pada saat materi diberikan, dan penggunaan perangkat visual untuk memberikan gambaran pada siswa mengenai langkah atau bagian yang diajarkan (Smith, 2012: 85). Dengan demikian perlunya strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa tetap perlu diberikan agar siswa tetap dapat mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya secara optimal.

Ada banyak hal yang didapat dari proses penyelenggaraan pendidikan

inklusi melalui sekolah sebagai lembaga pendidikan. Adanya keberagaman memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada siswa tentang cara bersosialisasi dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Ki Hajar Dewantara memaparkan pemikirannya atas berbaurnya siswa dalam suatu ruangan kelas secara *convergent* maka akan terbentuk kedekatan baik lahir maupun batinnya (Dewantara, 2013: 237). Thomas Lombar (Smith, 2012: 395) dalam penelitiannya menemukan kenyataan bahwa siswa penyandang hambatan saat diberikan pengajaran di kelas terpisah seringkali merasa tidak termotivasi, rendah diri, dan tidak berdaya. Norman Kunc (Smith, 2012: 396) dalam penelitiannya menegaskan bahwa prinsip dasar inklusi adalah menghargai perbedaan. Kita dapat mencari dan memelihara anugerah yang dimiliki setiap orang, kita juga dapat belajar melalui cara-cara yang digunakan oleh orang lain di luar cara yang biasa digunakan.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif yang dilakukan melalui sekolah inklusif mempunyai banyak keuntungan. Masing-masing anak akan mampu mempelajari dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki seseorang. Nilai dasar yang sangat prinsip didapatkan adalah menghargai perbedaan dalam masyarakat, dan ada banyak nilai yang didapat dalam proses pembelajaran di kelas inklusif. Berikut ini akan dibahas penanaman karakter yang bisa dilakukan di sekolah sebagai institusi karakter.

2. Sekolah sebagai Institusi Karakter

Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan yang memberikan respon positif atas keberagaman peserta didik. Keberagaman dilihat sebagai tantangan

yang harus dihadapi semua warga sekolah. Atas keberagaman yang ada maka ada beberapa karakter yang dapat ditumbuhkembangkan pada setiap orang yang ada dalam masyarakat sekolah. Hal ini dapat dimulai dari sekolah sebagai institusi untuk membangun karakter sekolah. Ki Hajar Dewantara memaparkan pemikirannya tentang dasar pendidikan Tamansiswa adalah *momong*, *among*, dan *ngemong* (Dewantara: 2013: 13). Dasar pendidikan Tamansiswa tersebut bila diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai merawat, memberi contoh, dan mengamati prosesnya. Cara yang dilakukan dalam mendidik anak dengan tidak ada paksaan (*momong*), namun memberikan contoh atau keteladanan (*among*). Tugas selanjutnya adalah melakukan pengamatan agar anak dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dapat diartikan bahwa kita sebagai orang dewasa atau guru perlu menjadi teladan yang baik untuk siswa.

Lickona (Suryadi, 2014: 99) memberikan pendapatnya ada enam elemen utama yang dapat digunakan sebagai pembentukan kultur moral di sekolah yang dapat menumbuhkan nilai, sikap, dan perilaku positif bagi siswa. Masing-masing elemen saling berpengaruh satu dengan yang lain, namun untuk tujuan menciptakan kultur moral sebagai penumbuh karakter sekolah tidak perlu menunggu untuk semua elemen penuh. Elemen-elemen tersebut antara lain:

a. Kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah merupakan pelopor dalam pendidikan karakter dan senantiasa terlibat penuh dalam program pendidikan karakter. Dalam penciptaan kultur sekolah yang kodusif, kepala sekolah mengatur dan memfasilitasi penyelenggaraan

kegiatan yang mendorong terciptanya kultur sekolah yang memungkinkannya tumbuhnya karakter. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dikenal dengan sebutan Trilogi Kepemimpinan, yang berbunyi *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*. Artinya seorang pemimpin, baik kepala sekolah maupun guru berada di depan menjadi teladan bagi anak buahnya atau siswa, di tengah-tengah melibatkan diri memberi inspirasi dan motivasi, dan di belakang memberikan kekuatan dan kemampuan.

b. Disiplin sekolah. Disiplin sekolah mengajarkan kepada siswa bahwa kehidupan di sekolah adalah milik bersama dengan demikian akan tercipta berbagi nilai-nilai antar warga sekolah. Ki Hajar Dewantara memaparkan kedisiplinan dari tujuannya, yaitu terbangunnya tertib dan damai atau lebih di kenal dengan tata tentrem (Dewantara, 2013: 13). Yang perlu dijagakan adalah menjaga batin anak dengan tidak adanya paksaan. Namun demikian tidak berarti *nguja* atau dilakukan pembiaran anak. Aturan yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan anak agar tercapainya tertib dan damai. Ki Hajar Dewantara menyampaikan fatwa yang menjadi dasar dalam bertindak, yaitu *tetep*, *antep*, dan *mantep*, yang artinya adalah ketetapan pikiran dan batin yang akan menentukan kualitas seseorang. Dengan ketetapan hati maka akan mempunyai pendirian yang kuat, yang kemudian akan memberikan kemantapan dalam memilih. Semua siswa akan diberikan landasan pendidikan yang sama sehingga akan saling mengingatkan satu dengan yang lain.

- c. Rasa kekeluargaan di sekolah. Rasa kekeluargaan dapat dijadikan salah satu cara terbaik dalam mencegah perilaku kurang terpuji. Rasa kekeluargaan yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara adalah kebangsaan. Manusia mempunyai tiga tingkatan, yaitu sebagai individu, warga negara, dan warga dunia. Untuk mempersiapkan anak dalam tiga tingkatan tersebut, maka perlu adanya pembekalan yang diperlukan anak pada masa yang akan datang. Pelajaran kebangsaan diberikan disesuaikan dengan jenjang usia anak, yang pada intinya memberikan bermacam-macam kegiatan yang menyangkut olah hati, olah pikir, olah rasa (karsa), olah raga (Dewantara, 2013).
- d. Demokrasi dalam mengelola sekolah. Demokrasi bisa digunakan sebagai landasan dengan melibatkan siswa dalam mengelola kehidupan sekolah. Siswa dilibatkan dalam pengambilan keputusan besar di sekolah. Ki Hajar Dewantara memandang anak sebagai manusia. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah penguasaan diri. Dengan penguasaan diri tersebut maka anak akan mampu menentukan sikapnya. Dalam mencapai tujuan pendidikan inilah proses humanisasi dilakukan, anak dilibatkan dalam proses pendidikan-nya agar mampu mandiri untuk menentukan nasibnya sendiri (Yusuf, 2015: 174).
- e. Menciptakan kerjasama yang erat antar orang dewasa. Kerjasama antar orang dewasa diperlukan sebagai kekuatan moral dan intelektual untuk tumbuhnya karakter positif. Perlunya kerjasama yang erat untuk keberhasilan pendidikan dalam menumbuhkan karakter pada anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara atas dukungan orang lain untuk

keberhasilan pendidikan dikenal dengan *Trisentra Pendidikan*, bahwa ada tiga tempat yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting, yaitu alam keluarga, alam perguruan (sekolah), dan alam pemuda (masyarakat) (Dewantara, 2013: 79). Masing-masing tempat pendidikan ini mempunyai peran yang berbeda-beda, namun tidak dapat dipisahkan untuk keberhasilan pendidikan anak. Disinilah kemudian pentingnya pendidikan budi pekerti, sebagai dasar anak berada dalam masyarakatnya kelak. Pendidikan budi pekerti akan ditumbuhkan pertama kali di alam keluarga. Keluarga mempunyai peran yang sangat besar dalam mengenalkan nilai-nilai karakter. Orang tua berperan sebagai guru, pengajar, dan pemimpin. Dalam lingkungan keluarga, anak akan belajar untuk saling membantu dengan anggota keluarga yang lain, dan melatih dirinya sendiri untuk lebih mandiri (Dewantara, 2013: 374).

- f. Sekolah perlu menyisihkan waktu untuk menangani masalah moral. Karakter positif dalam suatu kehidupan sekolah dibentuk dari perilaku individu dan kelompok melalui capaian-capaian kecil yang praktis dan bersifat tambahan. Alam perguruan atau yang sekarang lebih dikenal sebagai sekolah, menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya berkewajiban mengusahakan kecerdasan intelektual dan ilmu pengetahuan, namun juga melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh alam keluarga yaitu pendidikan budi pekerti dan budi kemasyarakatan (Dewantara, 2013: 72). Dengan demikian sekolah mempunyai peran sebagai perantara keluarga dan masyarakat, dengan demikian pendidikan budi pekerti sangat

diperlukan sebagai dasar anak berada di masyarakatnya kelak.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang sekolah yang menerima keberagaman telah dipraktekkan pada masanya. Hanya kondisi pada masa itu berbeda dengan kondisi saat ini. Pada masa Ki Hajar Dewantara Indonesia pasca kemerdekaan sehingga kondisi masyarakatnya mempunyai kebutuhan yang lebih beragam dan kompleks. Sekolah sebagai instansi pendidikan mampu melakukan perannya membangun kultur moral sebagai landasan untuk membangun karakter siswanya.

SIMPULAN

Setiap anak Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang optimal, seperti yang telah tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Hal ini dipertegas dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 atas jaminan pemerintah atas penyeleng-garaannya. Artinya semua anak tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan secara optimal.

Atas kebutuhan pendidikan untuk semua anak tanpa terkecuali ini, maka perlu adanya sistem pendidikan yang mampu menampung semua anak dengan segala kebutuhannya. Sistem pendidikan ini dikenal dengan pendidikan inklusif, yang berangkat dari berbagai perbedaan suku, agama, budaya, nilai, kepribadian, atau keberfungsian fisik maupun psikologis. Ki Hajar Dewantara menuangkan pemikirannya pendidikan inklusif pada masanya. Semua anak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya.

Salah satu yang diusahakan Ki Hajar Dewantara untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak adalah dengan melakukan usaha bersama untuk tujuan tertib damainya anak, dengan sebutan trisentra pendidikan yang terdiri atas alam keluarga, alam perguruan, dan alam pemuda (masyarakat). Masing-masing sentra mempunyai peran dalam daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, intelektual, dan tubuh anak. Perlu adanya kerjasama yang baik atas ketiga sentra tersebut untuk tercapainya tertib damainya anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Riska. 2010. *Memaknai dan mengembangkan keberagaman peserta didik melalui pendidikan inklusif*. Pedagogi, X(2), 70 – 75.
- Dewantara, K. H. 2013. *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Kusmaryani, R. E. 2006. *Pendidikan multiKultural sebagai alternatif penanaman nilai moral dalam keberagaman*. Paradigma, I(2), 49 – 56.
- Olyvia, F. Agustus 2017. *Satu juta anak berkebutuhan khusus tak bisa sekolah*. cnnindonesia.com
- Pontea, Petra and Ben, H.J Smitc. 2013. *Education for all as praxis: consequences for the profession*. Professional development in education, vol. 39, no. 4, pp. 445-469.
- Smith.D. J. 2012. *Inklusi Sekolah ramah Untuk Semua*,(terj.) Sugiarmmin. Bandung: Nuansa.

- Suryadi, Ace. 2014. *Pendidikan Indonesia menuju 2025, outlook: permasalahan, tantangan dan alternative kebijakan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tarmansyah. 2007. *Inklusi pendidikan untuk semua*. Jakarta: departemen pendidikan nasional. Jakarta: departemen pendidikan nasional direktorat jenderal pendidikan tinggi direktorat ketemagaan.
- Yusuf, T. S. Z. 2015. *Tamansiswa badan perjuangan: Kebudayaan dan pendidikan mengusir penjajah dan memanusia manusia*. Yogyakarta: UST Press.

PERAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI PENOPANG KARAKTER BANGSA DI ERA GLOBALISASI

Sulistiani

Program Pascasarjana PPKn UNY, Yogyakarta

E-mail: sulissulek@gmail.com

Abstract. *Change is something that must happened in life, with the changes so that each individual can see how the development that occurs in him both physically and behaviorally. Changes that occur in each individual will affect how they live in a society that will culminated to the life of the state. The rising behavior of the young generation that is not in accordance with the character in this nation becomes a problem for the life of the state in the future. Criminal, promiscuity, the culture of rubber clocks, following trends from outside cultures that do not fit with their own culture are just some example of the decline in the character of the younger generation. The cultivation of character values performed in schools through the lesson of Religion and civic education is not enough to shape the character of the young generation in the absence of seperated from the current globalization flow. One way that can be done so that the young generation is aware of their identity that is by instilling local cultural values, tighten the local cultural values in the environment can form the behavior in accordance with the character of the nation. The method used in this paper is the method of library research. The results obtained that globalization is not the thing that should be the main problem associated with the decline of the character of the nation's youth today, the decline of character is a mistake of each individual in fortifying himself from any changes that occur, seperated negative values and took positive values is an individual task as the most important factor in defend a country.*

Keywords: *Local Culture, Nation Character, Globalization*

PENDAHULUAN

Sebuah negara akan terlihat baik dan buruk tergantung bagaimana perilaku masyarakatnya, sebagai pengelola negara diperlukan beberapa kemampuan masyarakat untuk membangun negaranya. Kemampuan tersebut dapat berupa pengetahuan, keterampilan maupun melalui tindakan dan perilaku. Sebagai contoh saat zaman penjajahan bukan hanya membutuhkan tindakan dalam mengalahkan para penjajah bangsa tetapi diperlukan teknik dan strategi sebagai bagian dari pengetahuan untuk dapat mendorong suatu tindakan itu berhasil. Pengetahuan tanpa tindakan tidak akan ada hasilnya, pengetahuan dan tindakan tanpa sikap yang baik maka hasilnya akan buruk. setiap negara bekas jajahan memiliki dampak yang

berbeda-beda terhadap sikap individu yang dijajah. Mu'in (2011:96) Soekarno menegaskan bahwa tidak akan mungkin bisa mengembangkan karakter bangsa jika tidak merdeka alias berada dalam kondisi tidak bebas. Penjajahan menghilangkan kebebasan manusia untuk menjadi dirinya sendiri. penjajahan membuat orang tergantung dan wataknya tak bisa berkembang sesuai kemauannya dan nilai-nilai yang menjadi karakternya sendiri.

Berbeda dengan penjajahan zaman dahulu yang lebih terlibat secara fisik dan kekerasan. sekarang penjajahan terlibat secara pengetahuan dan persaingan ilmu antar negara. Kebanyakan orang berpikir bahwa kecerdasan secara intelegensi dapat mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik dan sukses, padahal dalam

kehidupan sekarang yang dibutuhkan adalah kecerdasan secara emosional. Masyarakat di didik untuk mampu menjadi warga negara yang baik dan mampu berpikir kritis terhadap perubahan yang terjadi. Walaupun secara nyata tidak semua perubahan yang terjadi secara global saat ini berdampak buruk bagi masyarakat, ada perubahan yang mampu memberikan pengetahuan dan ilmu yang menjadikan masyarakat memiliki wawasan yang lebih luas.

Untuk saat ini hal yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai yang terjadi melalui perubahan yang terus menerus terjadi di dunia dapat disaring agar nilai-nilai kebudayaan lokal yang dimiliki tidak ikut memudar. Memandang pengaruh nilai-nilai budaya luar pada generasi penerus dengan melihat banyaknya efek negatif yang diberikan oleh arus globalisasi, mudahnya dalam penerimaan informasi dan transparansi tanpa batas menjadikan generasi muda leluasa dalam mendapatkan informasi dari berbagai wilayah. Pengaruh teknologi, lingkungan dan budaya luar yang tidak dapat dikendalikan berakibat pada pembentukan karakter setiap individu. Tukidi (2011:44) karakter merupakan kepribadian seseorang yang terbentuk melalui berbagai kumpulan nilai, norma dan moral yang akan mengarah pada cara pandang, bersikap, berpikir, dan bertindak. Sedangkan karakter bangsa merupakan akumulasi dari karakter-karakter warga masyarakat bangsa. Nilai karakter yang terkandung dalam karakter bangsa merupakan nilai-nilai yang berkembang, berlaku, diakui, diyakini dan disepakati untuk dilaksanakan oleh masyarakat dalam sebuah negara (Nurgiyantoro, 2011:27-28).

Saat ini Indonesia mengalami anomali nilai, disatu sisi bangsa Indonesia terkenal dengan nilai-nilai

budaya lokal yang dimiliki dan disatu sisi terjadinya ketidakseimbangan antara praktik dan nilai yang dianut didalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bukan saja terjadi pada masyarakat awam tetapi juga terjadi di beberapa tingkatan seperti para golongan elit dan tingkatan sosial lainnya.

Di era sekarang teknologi yang diciptakan oleh manusia memiliki permasalahan terbesar dari cara penggunaannya. Seperti teknologi komunikasi media sosial facebook, line, twitter, instagram dan lain sebagainya yang merupakan suatu media informasi generasi sekarang untuk dapat berinteraksi dengan individu lain dari negara maupun wilayah yang berbeda. penyalahgunaan penggunaan media sosial pada generasi muda sama dengan mengikis sedikit demi sedikit jati diri yang sebenarnya. Kurangnya penanaman nilai-nilai budaya lokal dapat menjadikan generasi muda menerima pengaruh budaya luar tanpa adanya penyaringan sehingga berakibat pada tidak adanya rasa “malu” yang tertanam dari setiap individu, mengunggah foto yang tidak senonoh, berkomentar dengan kata-kata kasar, menyebarkan video yang tidak baik merupakan beberapa contoh kurangnya sikap malu.

Bukan hanya dari media sosial, program televisi juga sangat mempengaruhi pada pembentukan sikap seseorang. Televisi sebagai media massa dapat mempengaruhi pikiran dari setiap masyarakat tentang apa yang dilihat. Keberadaan media massa khususnya televisi dalam menyajikan informasi cenderung memicu perubahan serta banyak membawa pengaruh pada penetapan pola hidup masyarakat. Beragam informasi yang disajikan dapat memberikan pengaruh yang negatif dan positif. Selain media sosial dan media massa televisi faktor lingkungan juga menjadi pengaruh terbesar terhadap

pembentukan karakter generasi muda. Lingkungan seperti apa yang ditinggali akan menanamkan nilai-nilai yang terdapat dalam lingkungan tersebut, lingkungan yang tetap mempertahankan budaya lokalnya akan menjadi benteng generasi muda dalam menyikapi derasnya arus globalisasi.

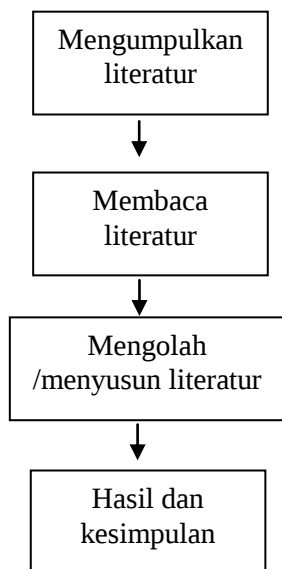
Ranjabar (2014:42) menyatakan bahwa pada umumnya, generasi yang paling mudah menerima unsur-unsur dari kebudayaan asing yakni terdapat pada generasi muda. Sedangkan generasi tua mereka sukar untuk bisa menerima kebudayaan asing, hal ini diakibatkan karena norma dan nilai-nilai pada kebudayaan lokal yang telah tertanam di dalam diri para generasi tua. Dari pernyataan Ranjabar diatas dapat dinyatakan bahwa penanaman nilai budaya lokal yang telah mendarah daging dan menjiwai di dalam diri masyarakat tidak akan mudah terlepas begitu saja dengan perubahan yang terjadi. Narwoko dan Suyanto menyatakan bahwa (2004:48) kepribadian setiap individu terbentuk melalui norma-norma, pola tingkah pekerti dan nilai kultural yang diasosiasikan secara langsung lewat proses pendidikan dan pengajaran, interaksi kelompok. Pada umumnya peran budaya lokal sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku setiap individu. Karakter seseorang dapat terbentuk melalui penanaman nilai-nilai budaya lokal. nilai tersebut akan menjadi pelindung bagi setiap individu dalam menghadapi perubahan nilai dari kebudayaan luar, memfilter setiap nilai yang masuk merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi generasi muda agar tidak berdampak pada pembentukan karakter individu yang tidak diinginkan oleh setiap negara.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Menurut Zed (2008:1) Riset pustaka memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, riset kepustakaan berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Studi pustaka hanya memanfaatkan sumber-sumber pustakan sebagai bahan untuk memperoleh hasil penelitian. Bahan yang digunakan dalam studi kepustakaan ini dapat bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, tabloid maupun koran dan dokumen. Dalam tulisan ini, literatur yang digunakan berkenaan dengan budaya lokal, karakter bangsa dan globalisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berkenaan dengan judul. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan literatur atau bahan yang telah diperoleh, membaca literatur, kemudian di susun serta dikaitkan antara satu sama lain dan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil atau kesimpulan dari sebuah penelitian.

Teknik analisis data dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Teknik analisis data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Lokal dan Globalisasi

Dockery (2012:283) menyatakan bahwa hampir setiap aspek perilaku manusia memiliki beberapa dimensi budaya. Menurut Sujarwa (2011:18) kebudayaan selalu dihubungkan dengan nilai, norma, sikap dan perilaku berpola dari sebagian besar anggota kelompok masyarakat tertentu, kebudayaan adalah milik bersama. Nilai, norma, sikap dan perilaku terbentuk dari kebudayaan, memang kebudayaan merupakan milik bersama, tetapi setiap kebudayaan memiliki perbedaan yang unik. Kebudayaan bukanlah sesuatu yang hanya boleh dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang menganut kebudayaan itu, tetapi kebudayaan merupakan milik bersama dalam artian semua orang dapat mempelajari kebudayaan yang lain dengan tujuan untuk belajar dan menambah pengetahuan, bukan dengan tujuan untuk mengambil kebudayaan itu dan dijadikan menjadi kebudayaan sendiri.

Terdapat perbedaan yang dimiliki oleh budaya lokal dari setiap kelompok. Mulai dari bahasa yang dianut, sistem kepercayaan, cara bertahan hidup, intonasi suara saat berbicara, pakaian, rumah adat, bahkan sampai kepada makanan khas. Ho-Ying Fu dan Yue Chiu (2007:637) menegaskan dua pandangan yang berbeda tentang bagaimana budaya lokal dalam merespon globalisasi, yakni:

1. Pandangan yang memprediksi bahwa globalisasi akan menyebabkan kepunahan dan kematian budaya lokal. budaya global yang lebih mengutamakan konsumerisme, individualisme, persaingan, dan efisiensi yang telah ditandai di beberapa negara non barat.
2. Pandangan yang menyatakan bahwa beberapa aspek budaya lokal akan bertahan dari efek globalisasi, misalnya mencari nafkah di budaya global dengan mengintegrasikan nilai budaya lokal ke pasar global.

Globalisasi merupakan sebuah proses yang terjadi pada lapisan masyarakat dimana mereka tidak mengenal adanya batas dan tidak terikat hanya pada ruang lingkungannya saja. Globalisasi terjadi secara mendunia, setiap masyarakat dapat merasakan dan melihat antar satu wilayah dengan wilayah lain, antara satu kejadian dengan kejadian lain secara cepat. Ridwan (2016:221) menyatakan bahwa globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan sehingga sikap dari banyak remaja yang tingkah lakunya tidak mengenal sopan santun dan cenderung tidak peduli terhadap lingkungan, seperti adanya geng motor yang melakukan tindakan kekerasan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat merupakan salah satu dampak globalisasi yang kaprah.

Dari pernyataan pertama yang memprediksi bahwa globalisasi akan menyebabkan kepunahan pada budaya lokal dapat dilihat dari beberapa contoh secara nyata dari budaya konsumtif generasi muda saat ini, mulai dari konsumtif model pakaian sampai kepada makanan seperti McDonald dan Sturbuck yang mulai merambah sampai ke daerah-daerah disetiap wilayah yang menyebabkan turunnya nilai-nilai budaya lokal dari segi makanan. Sedangkan pada pernyataan kedua budaya lokal akan bertahan dari efek globalisasi, dimana globalisasi memiliki peranan penting dalam memperkuat nilai-nilai moral dan budaya lokal masyarakat. Seperti contoh melalui produk televisi sebagai sarana penyampaian informasi, di negara Korea Selatan berhasil memasukkan nilai-nilai budaya lokal nya melalui serial film, drama maupun acara lainnya yang banyak diminati oleh masyarakat luar negara Korea Selatan sehingga masyarakat luar banyak mengetahui bagaimana nilai-nilai budaya lokal yang ada di Negara Korea selatan dengan melihat tata krama, tutur bahasa, makanan khas dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua perubahan memiliki efek negatif terhadap suatu masyarakat dan negara tetapi bagaimana setiap individu, masyarakat dan negara dapat beradaptasi dan memanfaatkan perubahan yang terjadi.

Budaya Lokal sebagai Penopang Karakter Bangsa di Era Global

Semakin derasnya arus globalisasi yang membawa berbagai bentuk dan ekspresi budaya global merupakan faktor tambahan penting yang mengakibatkan pengikisan watak bangsa berlangsung semakin lebih cepat dan luas. Akibatnya krisis watak bangsa menimbulkan disrupsi dan dislokasi dalam kehidupan

sosial dan kultural bangsa, sehingga dapat mengancam integritas dan ketahanan bangsa secara keseluruhan (Yuliana, 2010:94). Ketahanan pribadi dan keluarga merupakan hal yang paling utama dalam mempertahankan ketahanan nasional. Keluarga dan pribadi memiliki hubungan timbal balik, banyak ketahanan keluarga yang belum bisa memberikan nilai-nilai yang diharapkan untuk membentuk pribadi yang berkarakter di dalam sebuah keluarga. Dampak yang diberikan oleh setiap keluarga yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Tergantung bagaimana orang tua sebagai pemeran utama dalam mendidik pribadi anak-anak, permasalahan yang terjadi di keluarga juga menjadi faktor utama bagaimana karakter pribadi anak akan terbentuk. *Single parent*, perceraian, kekerasan rumah tangga dan keluarga yang penuh kasih sayang akan memberikan dampak pembentukan karakter dan jati diri pribadi yang berbeda-beda. Pembinaan ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Ketahanan pribadi dan ketahanan keluarga sebagai tumpuan ketahanan nasional (Yayasan Jati Diri bangsa)

Setelah pribadi dan keluarga, tumpuan selanjutnya berada di dalam lingkungan masyarakat yang di dalamnya termasuk pergaulan dan kemudian tumpuan selanjutnya terdapat di wilayah. Lingkungan dan wilayah biasanya di pengaruhi oleh berbagai faktor dalam pembentukan karakter yaitu budaya asli dan budaya yang berasal dari luar. pembentukan kepribadian individu berasal dari kebudayaan yang mereka anut, kebudayaan yang telah lama berada dalam lingkungan di sekitarnya akan menanamkan nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan tersebut kepada individu itu. Hal inilah yang akan membentuk pola perilaku dan kepribadian dari setiap individu. Sistem nilai budaya setiap kelompok masyarakat berasal dari masalah pokok kehidupan masyarakat itu sendiri. sistem nilai yang dianggap penting bagi sekelompok masyarakat akan menjadi faktor penentu dalam berperilaku. Hal inilah yang menyebabkan setiap kebudayaan memiliki karakter dan cara berperilaku yang berbeda-beda. Karena masalah pokok yang dihadapi dari setiap budaya itu berbeda-beda sehingga menghasilkan pola perilaku yang berbeda pula.

Di era globalisasi, masyarakat tidak hanya hidup dalam nilai-nilai kebudayaan asli saja, tetapi banyak nilai budaya luar yang akan berbaur kepada budaya asli seseorang, ini disebabkan karena adanya komunikasi antarbudaya yang dilakukan agar bisa terus bertahan dalam perubahan dunia yang terus terjadi. Di era globalisasi manusia dituntut untuk memahami budaya luar selain budaya asli yang dipahami. Saat ini seseorang bergerak dibidang bisnis diperlukan kemahiran dalam berkomunikasi antar wilayah dan negara yang menghubungkan berbagai budaya yang berbeda dengan berbagai tujuan, misalnya untuk kelancaran bisnis yang akan dilakukan, kelancaran pendidikan

atau studi diluar wilayah, pekerjaan yang menetap di suatu daerah yang berbeda denagn kebudayaan asli. Hal ini semua membuthkan adanya komunikasi antar-budaya untuk dapat saling berinteraksi dan emmahami antar budaya yang berbeda. Dalam kerangka Kluckhohn lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya manusia dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kerangka Kluckhohn mengenai lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya manusia.
Sumber. Ranjabar (2014:39)

Masalah dasar dalam hidup	Orientasi nilai budaya		
Hakikat hidup (MH)	Hidup itu buruk	Hidup itu baik	Hidup itu buruk, tetapi manusia wajib berikhtiar supaya hidup itu menjadi baik
Hakikat karya (MK)	Karya itu untuk nafkah hidup	Karya itu untuk kedudukan, kehormatan, dan sebagainya	Karya itu menambah karya
Persepsi manusia tentang waktu (MW)	Orientasi ke masa depan	Orientasi ke masa lalu	Orientasi ke masa depan
Pandangan manusia terhadap alam (MA)	Manusia tunduk kepada alam yang dahsyat	Manusia berusaha menjaga keselarasan dengan alam	Manusia berhasrat menguasai alam.
Hakikat hubungan antara manusia dengan sesamanya (MM)	Orientasi kolateral (horisontal), rasa ketergantungan pada sesama	Orientasi vertikal, rasa ketergantungan kepada tokoh-tokoh	Individualisme menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri.

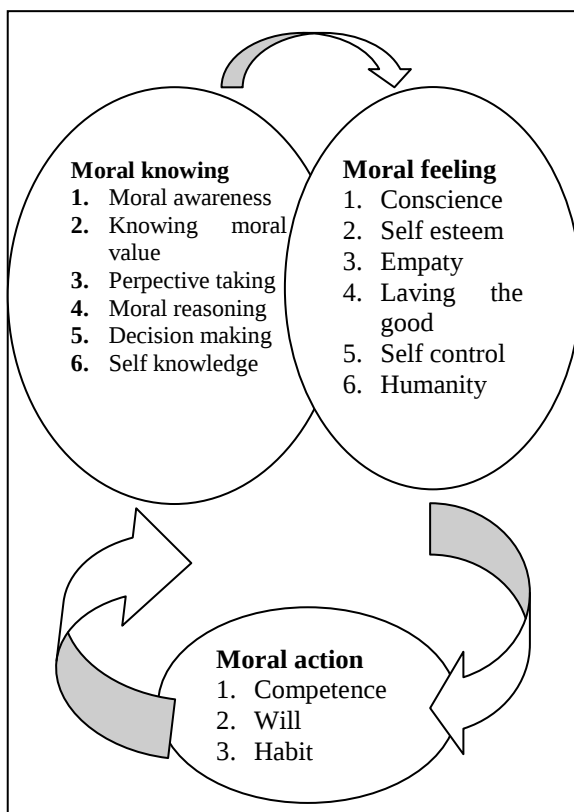
	ya (berjiwa gotong royong).	atasan dan berpangk at	
--	--------------------------------------	---------------------------------	--

Masalah hakikat hidup (MH) manusia dari setiap kebudayaan memiliki hakikat yang berbeda, ada yang beranggapan bahwa hidup itu buruk dan hidup itu baik hal ini berkaitan dengan bagaimana pandangan kelompok budaya tersebut memandang hakikat dari kehidupan. masalah hakikat karya (MK) ada kebudayaan yang beranggapan bahwa karya itu ada untuk mencari nafkah dan karya itu ada dianggap sebagai suatu kedudukan, kehormatan, karya dalam kebudayaan merupakan ciptaan manusia yang diambil dari beberapa nilai dan kebiasaan dalam kehidupan yang menjadikan karya itu ada dan terus menciptakan karya yang baru. Masalah mengenai persepsi manusia tentang waktu (MW) ada kebudayaan yang lebih meninjau pada masa lalu dan ada yang lebih melihat kepada masa saat sekarang ini dan masa yang akan datang nantinya. Masalah pandangan manusia terhadap alam (MA) kebudayaan yang beranggapan bahwa sebagai manusia harus memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah disekitarnya, tetapi ada kebudayaan yang beranggapan bahwa sebagai manusia harus menjaga alam sekitarnya. Masalah hakikat hubungan antara manusia dengan sesamanya (MM) sebagian kebudayaan beranggapan bahwa sebagai manusia harus memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan jabatan, suku, agama dan lain sebagainya kemudian ada kebudayaan yang memandang lebih kepada pandangan individualistis yaitu lebih kepada diri sendiri tanpa memperdulikan manusia sesamanya.

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak budaya lokal dengan nilai-nilai yang sangat berbeda-beda.

Tobroni (2011:101) menyatakan bahwa bangsa yang berbudaya dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai, mengembangkan dan mewariskan budayanya kepada generasi muda dan dengan bangga menunjukkan kepada bangsa lain sebagai identitas dan harga diri bangsa. Bangsa Indonesia dengan keragaman budaya akan menjadi bangsa yang besar jika budaya lokal dari setiap daerahnya dapat dipertahankan dan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Jika kebudayaan itu hanya dimiliki oleh generasi sebelumnya dan diwariskan tetapi nilai dari budayanya tidak di implementasikan maka Indonesia bukanlah bangsa yang besar. Pewarisan nilai-nilai budaya lokal sangat berpengaruh terhadap perilaku dan pembentukan karakter dari setiap individu. Banyak nilai-nilai yang terkandung dalam budaya lokal yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dari nilai-nilai budaya lokal maka karakter setiap individu akan terbentuk sesuai dengan kebudayaan yang dianut.

Grufron (2010:15) menyatakan bahwa secara universal karakter dirumuskan sebagai nilai hidup bersama berdasarkan atas pilar: kedamaian (*peace*), menghargai (*respect*), kerjasama (*cooperation*), kebebasan (*freedom*), kebahagiaan (*happiness*), kejujuran (*honesty*), kerendahan hati (*humility*), kasih sayang (*love*), tanggung jawab (*responsibility*), kesederhanaan (*simplicity*), toleransi (*tolerance*) dan persatuan (*unity*). Sedangkan komponen-komponen karamter yang baik menurut Lickona dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3. Komponen-komponen karakter yang baik
Sumber: Lickona, 2013:74

Moral knowing (pengetahuan moral) yang melingkupi *moral awareness*, *knowing moral value*, *perspective taking*, *moral reasoning*, *decision making*, *self knowledge* merupakan pengetahuan yang diajarkan untuk menghadapi berbagai tantangan moral yang terjadi di dalam kehidupan. *moral feeling* (perasaan moral) yang melingkupi *conscience*, *self-esteem*, *empaty*, *laving the good*, *self control and humanity* merupakan suatu nilai yang perlu ditanamkan agar dapat menjadi manusia yang hormat, adil, jujur terhadap sesama. *Moral action* (moral tindakan) yang melingkupi *competence*, *will and habit* merupakan suatu tindakan yang nyata dari *moral knowing* dan *moral feeling* untuk dapat mewujudkan karakter yang baik pada manusia. Berbeda halnya dengan Mu'in (2011:211-212) menyatakan bahwa ada

enam karakter yang dapat dikatakan sebagai pilar karakter manusia yaitu :

1. *Respect* (penghormatan)
2. *Responsibility* (tanggung jawab)
3. *Citizenship- civic duty* (kesadaran berwarga negara)
4. *Fairness* (keadilan dan kejujuran)
5. *Caring* (kepedulian dan kemauan berbagi)
6. *Trustworthiness* (kepercayaan)

Pada akhirnya, karakter merupakan nilai-nilai baik yang diinginkan untuk ada di dalam diri setiap individu, dengan karakter mewujudkan karakter yang diinginkan akan mudah menjadikan suatu negara menjadi negara yang maju dengan rasa kedamaian dan ketentaraman dalam kehidupan masyarakatnya. Nilai-nilai karakter individu dapat dibentuk melalui nilai budaya lokal misalnya karakter *Trustworthiness* atau kepercayaan, setiap budaya lokal memiliki kepercayaan yang secara umum satu yaitu Tuhan dan kemudian memiliki kepercayaan yang berasal dari kehidupan masyarakat sebelumnya misalnya pada suku Bentong di daerah Sulawesi Selatan. Suku Bentong termasuk dalam kategori suku terasing di Indonesia. Sebelum memeluk agama Islam, suku Bentong menganut sistem kepercayaan yang dinamakan *arajang* yang merupakan sistem pemujaan yang dilakukan untuk mendatangkan keselamatan dan pemujaan ini dilakukan agar terhindar dari kutukan. Benda-benda *arajang* seperti tombak, payung, keris menjadi beberapa benda pemujaan yang dilakukan oleh suku Bentong ini. Dari sistem kepercayaan ini banyak nilai-nilai yang dapat diambil nilai-nilai positif oleh masyarakat yang menganut kepercayaan tersebut. Dalam kehidupan, nilai budaya lokal dalam lingkungan merupakan pembentuk karakter seseorang. Untuk dapat membangun karakter Majid dan Andayani (2013:20)

menyatakan bahwa membangun karakter merupakan :

1. Suatu proses yang terus menerus dilakukan untuk membentuk tabiat, watak, dan sifat-sifat kejiwaan yang berlandaskan pada semangat pengabdian dan kebersamaan
2. Menyempurnakan karakter yang ada untuk mewujudkan karakter yang diharapkan
3. Membina nilai/karakter sehingga menampilkan karakter yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan nilai-nilai dan falsafah hidup.

Karakter yang diharapkan dari masyarakat bangsa Indonesia, berdasarkan Nawacita Presiden Joko Widodo nilai-nilai karakter tersebut meliputi 6 bagian yaitu;

1. Religius (beriman, bertakwa dan toleransi)
2. Nasionalis (semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai kebhinekaan)
3. Integritas (kejujuran, keteladana, kesantunan, cinta pada kebenaran)
4. Mandiri (kerja keras, kreatif, disiplin, berani)
5. Gotong royong (solidaritas, kerja sama, kekeluargaan dan saling menolong)
6. *Respect dan responsibility.*

Di saat sekarang banyaknya karakter menyimpang dari generasi muda sebagai generasi penerus dikatakan dari adanya dampak globalisasi. Nyatanya dalam tulisan (Alam,1998:8) menyatakan bahwa proses globalisasi bukanlah sesuatu yang baru untuk saat ini, proses globalisasi telah ada sejak dulu dan tak pernah absen dalam kehidupan, Indonesia dari zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit ataupun pada masa kolonial selalu merupakan masyarakat

kosmopolitan di mana pengaruh kebudayaan mancanegara dari India, Cina, Arab maupun Eropa menemukan tempat persemaian yang subur. Kondisi sosial saat ini bukan terletak pada proses globalisasi tetapi pada kejelasan, keterbukaan dan sifat “kasat mata” dari berbagai pengaruh kebudayaan luar. Sedangkan menurut Agustin (2011:178) proses perkembangan globalisasi awalnya ditandai dengan kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang ini merupakan penggerak globalisasi yang kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan seperti sektor sosial, politik maupun budaya yang akhirnya akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat seperti budaya berpakaian, gaya rambut dan lain sebagainya.

Perubahan yang terjadi dari setiap karakter individu disebabkan karena adanya sifat transparansi dan tidak adanya penyaringan dan sifat berpikir kembali mengenai hal-hal yang akan mempengaruhi dalam hal pembentukan sifat, watak dan perilaku. faktor luar seperti lingkungan dan pergaulan menjadi salah satu faktor yang sering disalahkan dalam pembentukan karakter seseorang. Sebenarnya, faktor penopang ada di dalam diri setiap individu itu sendiri dan menjadi faktor pendukung yaitu adanya nilai-nilai budaya lokal yang tertanam sejak dulu. Generasi muda sebagai generasi penerus menurut Rajasa (Irhandayaningsih, 2012 : 7) dapat mengembangkan karakter nasionalisme melalui tiga proses yaitu.

1. *Character builder* merupakan peran generasi muda membangun karakter positif melalui kemauan guna menjunjung nilai-nilai moral serta mengimplemetasikan pada kehidupan nyata.
2. *Character enabler* merupakan peran generasi muda sebagai

role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif guna membangun kesadaran kolektif dengan kohesivitas tinggi misalnya dalam penyelesaian konflik.

3. *Character engineer* merupakan peran generasi muda dalam prestasi bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, terlibat dalam proses pembelajaran serta pengembangan karakter positif bangsa sesuai dengan perkembangan zaman

Perlunya nilai-nilai budaya lokal sebagai penopang karakter bangsa dapat dilihat dari *character engineer* peran generasi muda dalam prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, *character builder* peran generasi muda dalam membangun nilai-nilai positif dan nilai moral yang juga berasal dari lingkungan sekitar maupun keluarga dan tentunya dari budaya nya sendiri yang kemudian akan berakibat pada bagaimana peran pemuda dalam *character enabler* yaitu menyelesaikan suatu konflik yang terjadi.

Hal tersebut dilakukan dengan melihat maraknya perilaku yang menyebabkan hancurnya karakter dan moral bangsa bukan hanya terjadi pada generasi muda. Tetapi, sebagai generasi terdahulu yang memberikan contoh bagaimana hancurnya karakter bangsa Indonesia. Contoh terdekat dapat diketahui dari maraknya kasus korupsi yang tidak pernah berhenti. Memakan uang rakyat, masuk dalam sel tahanan, terekspose di media televisi maupun sosial bukanlah hal yang memalukan bagi para koruptor. Hancurnya karakter dan moral tersebut bukan hanya berimbas kepada generasi muda yang akan menjadi generasi yang akan membangun bangsa nantinya, tetapi juga

berpengaruh terhadap *image* suatu bangsa terhadap bangsa lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Nilai-nilai budaya lokal yang telah tertanam mendarah daging di dalam masyarakat maupun secara individu dapat membentengi diri dari perubahan yang terus menerus terjadi dengan nilai-nilai baru yang diberikan. Proses globalisasi dengan dampak yang besar bukan hanya terjadi di saat sekarang, tetapi bagi negara Indonesia globalisasi bahkan telah terjadi di satu zaman kerajaan, yang menjadi kekhawatiran adalah bukan terletak pada zaman apa dan perubahan apa yang terjadi. Tetapi, bagaimana setiap individu dapat menangkal nilai-nilai buruk yang dapat membentuk karakter. Nilai-nilai budaya lokal yang ada merupakan salah satu faktor pendukung setiap generasi sebelumnya dalam mendidik generasi muda sebagai generasi penerus untuk dapat mempertahankan kebudayaan serta nilai yang akan membentuk karakter individu tersebut kemudian akan berdampak pada pertahanan nilai karakter bangsa.

Dengan karakter bangsa yang diharapkan dapat terwujud maka negara tersebut akan berada dalam zona yang aman, jauh dari kata disintegrasi, menjadi bangsa yang mandiri, berkurangnya konflik secara vertikal maupun horizontal, menguatkan pertahanan terhadap nilai-nilai budaya lokal, serta menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan yang terpenting adalah masyarakat dalam memilih mana nilai buruk dan nilai baik dari setiap perubahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D.S.Y. (2011). Penurunan rasa cinta budaya dan nasionalisme generasi muda akibat globalisasi. *Jurnal JSH Sosial humaniora*. Vol, 4. No, 2. Hal : 177-185.
- Alam, B. (1998). Globalisasi dan perubahan budaya : perspektif teori kebudayaan. *Jurnal Antropologi Indonesia*. No,_. Vol, 54. Hal : 1-11.
- Dockery, A.M. (2012). *Do traditional culture and identity promote the wellbeing Australians? Evidence from the 2008 NATSISS*. Dalam Boyd hunter & Nicholas Biddle. *Survey analysis for indigenous policy in Australia*. Australia: ANU Press.
- Grufron. A. Integrasi ilai-nilai karakter bangsa pada kegiatan pembelajaran. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. Eds, khusus dies natalies UNY. Hal : 13-24.
- Ho Ying Fu, J. Dan Yue Chiu, C. (2007). Local culture's responses to globalization exemplary persons and their attendant values. *Journal of cross cultural psychology*, Vol. 38, No. 5, Hal : 636-653.
- Irhandayaningsih, A. (2012). Peranan pancasila dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme generasi muda di era global. *Jurnal Humanika*. Vol, 16. No,_. Hal : 1-12
- Lickona.T. (2013). *Pendidikan karakter : panduan lengkap mendidik siswa menjadi pintar dan baik*. Bandung : Nusa Media.
- Majid, A. Andayani, D. (2013). *Pendidikan karakter perspektif Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mu'in, F. (2011). *Pendidikan karakter konstruksi teoretik dan praktik urgensi pendidikan progresif dan revitalisasi peran guru dan orang tua*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Narwoko, J. D. & Suyanto, B. (2004). *Sosiologi teks pengantar dan terapan*. Jakarta : Prenada Media Group
- Nurgiyantoro, B. (2011). Wayang dan pengembangan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Karakter*. Vol. 2, No.-, (18-34).
- Ranjabar, J. (2014). *Sistem sosial budaya Indonesia*. Bandung : Alfabeta
- Ridwan, A. (2016). *Komunikasi antarbudaya mengubah persepsi dan sikap dalam meningkatkan kreativitas manusia*. Bandung : Pustaka setia.
- Sujarwa. (2011). *Manusia dan fenomena budaya menuju perspektif moralitas agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tobroni. (2011). Pengembangan pendidikan karakter bangsa berbasis kearifan lokal. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*. Vol. 14, No. 2, Hal : 91-108.
- Tukidi (2011). Membangun karakter bangsa di tengah-tengah budaya lokal. *Jurnal Forum Ilmu Sosial*. Vol. 38, No. 1, (44-54).
- Yayasan jati diri bangsa. (___). *Membangun kembali jati diri bangsa*. Jakarta : Yayasan jati diri bangsa.
- Yuliana. E. D. (2010). Pentingnya pendidikan karakter bangsa guna merevitalisasi ketahanan bangsa. *Jurnal Udayana Mengabdi*. No.9, Vol.2, Hal : 92-100.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

OPTIMALISASI PERAN KELUARGA DAN SEKOLAH SEBAGAI BASIS PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Siti Anisah

Program Pascasarjana PPKn UNY, Yogyakarta

E-mail: nonarisol@gmail.com

Abstract. *This article aims to give an overview on the parents and the school as a base of strengthening character education who became the closest environment and provides a major influence on the growth of the optimizing function and role. Strengthening character education given to young generation aims to overcome and prevent the negative effects of globalization that causes action triggered juvenile delinquency and deviant. The research used in the writing of this article is a method of study literacy or preview libraries. The result of the discussion of this article shows that families and schools are the basis for strengthening character education that needs to be optimized function and role. The strengthening of character education in the environment of a family especially done by parents as role models that provide the foundation for the first education firmly on the child. The strengthening of character education at school requires the cooperation of all parties committed to building a school culture as a reinforcement of the environment, then the required modeling by teachers, principals, and another school as examples in behaving and establish good relationships through learning in the classroom in the frame payload subjects. Optimization of the roles of the family and the school can be a base character education strengthening mutual support as government policy that made the characters as the axis of education with the aim of has a value of its own when it is based on cultural values that apply to the personality of the citizens themselves and the nature of the developmental process that requires long and are strengthened between learning activities in curricular activities at school and out of school.*

Keywords: *Parents, Schools, Character Education*

PENDAHULUAN

Abad 21 memunculkan masyarakat global dengan berbagai pemaknaan. Masyarakat global faktual yang secara tradisional didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang yang hidup saling berdampingan, dan masyarakat global artifisial yang merupakan masyarakat imajiner, karena orang-orang di dalamnya berinteraksi secara teknologis, berkomunikasi meskipun tidak pernah bertemu secara langsung (Ratna, 2014:44).

Pendidikan di tengah derasnya arus globalisasi memicu tuntutan yang dipenuhi oleh setiap peserta didik sebagai generasi muda yang mewarisi bangsa.

Menciptakan generasi muda pada era globalisasi dan krisis multidimensional yang berkepanjangan saat ini membutuhkan generasi yang memiliki sifat-sifat luhur seperti kreatif, pantang menyerah, pemberani, visioner, *problem solver*, memiliki jiwa *leadership*, komitmen kuat pada nasionalisme kebangsaan, dan memegang nilai-nilai kebenaran di atas segala-galanya (Wibowo, 2012:134).

Sekolah sebagai *leading sector* yang berupaya memanfaatkan dan memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk inisiasi, memperbaiki, menguatkan dan menyempurnakan secara terus menerus. Di sekolah penguatan

pendidikan karakter dibagi kedalam empat pilar yang meliputi kegiatan belajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya sekolah (*school culture*). Kegiatan kokurikuler dan atau ekstrakurikuler, serta keseharian di rumah dan di masyarakat. (Samani & Hariyanto, 2013: 113).

Harapan dari pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa dalam pedoman sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat kurikulum (2010) menegaskan bahwa bangsa ini masih terus memerlukan berbagai perubahan untuk proses pendidikan. Perubahan tersebut diperlukan untuk menghendaki sikap dan keterampilan baru pada dunia pendidikan.

Fungsi dari Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa meliputi: (1) pengembangan potensi untuk menjadi lebih baik dan memiliki sikap serta perilaku yang mencerminkan budaya karakter bangsa; (2) memperkuat kiprah pendidikan nasional yang bermartabat dan bertanggung jawab dalam membangun potensi; dan (3) menyaring budaya yang tidak sesuai dengan karakter bangsa. Tujuannya meliputi: (1) mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa; (2) mengembangkan kebiasaan dan perilaku yang terpuji dan sejalan dengan nilai universal dan tradisi budaya yang reli¹¹⁷⁴ (3) menenamkan jiwa kepemimpinan yang¹¹⁷³ bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa; (4) mengembangkan kemampuan yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan dan; (5) mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, persahabatan dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan kuat (*dignity*). (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010: 5-8).

Melihat berbagai permasalahan dan berdasarkan pada fungsi serta tujuan

pemerintah terhadap pembentukan watak warga negara maka, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran pada orang tua dan pihak sekolah sebagai basis dari penguatan pendidikan karakter yang menjadi lingkungan paling dekat dan memberikan pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak dalam mengoptimalkan fungsi dan perannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode *study literasi* atau tinjauan kepustakaan dengan melakukan kajian yang terkait dengan topik penelitian serta mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kepustakaan. Sumber kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku dan jurnal serta hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter dalam kurikulum nasional diajarkan secara eksplisit di sekolah-sekolah formal dalam sebuah mata pelajaran yang disebut dengan Pendidikan Budi Pekerti pada kisaran tahun 1960 yang merefleksikan prioritas penting pendidikan nilai bagi setiap peserta didik. Masuknya model pengelompokan mata pelajaran di sekolah menjadikan pelajaran Pendidikan Budi Pekerti yang secara eksplisit pelan-pelan menghilang hingga pada masa Orde Baru pendidikan karakter dimunculkan secara eksplisit melalui program dalam kegiatan resmi penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Orde Baru juga melahirkan pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) (Albertus, 2012:2-3).

PMP sebelumnya dikenal dengan istilah *Civics* pada tahun 1957 yang membahas materi tentang cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, pada tahun 1962 berubah menjadi Kewargaan

Negara yang membahas lebih banyak tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar, Pidato-pidato politik kenegaraan, terutama diarahkan untuk *nation and character building* bangsa Indonesia. Tahun 1968 istilahnya dikenal dengan Pendidikan Kewargaan Negara (PKN), kemudian tahun 1975 muncul dengan nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) (Sumantri, 1972:8-9).

Kurikulum pada tahun 1994 merubah PMP menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Materi yang terkandung dalam PPKn pada tahun 1999 mengalami penambahan (suplemen) disesuaikan dengan perubahan kehidupan ketatanegaraan setelah era reformasi. Era reformasi pada tahun 2000 membawa perubahan dalam bidang pendidikan dengan tuntutan muatan *skill* yang melah 1175 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), perubahan tersebut ikut membawa perubahan istilah dari PPKn menjadi Pendidikan kewarganegaraan (PKN). Kemudian PKN di tingkat SD dan SMP diintegrasikan pada mata pelajaran Pendidikan Ilmu Sosial (IPS), di tingkat SMA dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri (Murdiono, 2008:97).

Albertus (2012:3) menyatakan bahwa dengan perubahan nama pada Pendidikan Kewarganegaraan dianggap telah merubah haluan pembelajaran karkter menuju keutamaan sebagai warga negara, Pancasila tidak dijadikan yang utama, melainkan lebih pada bagaimana negara mempersiapkan warga negara yang baik, aktif dan bertanggung jawab melalui pendidikan dengan metode yang tidak dengan sistem otoriter sehingga memberikan banyak kebebasan untuk merefleksi dan berpikir yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional mengenai pengembangan kemampuan dan pembentukan watak warga negara.

Secara garis besar mata pelajaran PKN pada KBK sudah mulai mengarah pada

paradigma baru yang terdiri dari: (1) dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civics knowledge*) yang mencakup bidang politik, hukum dan moral; (2) Dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civics skills*) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan (3) Dimensi karakter kewarganegaraan (*civics disposition*) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai-nilai religius (Branson, 1999:8-23).

Pada Tahun 2006 kurikulum di Indonesia kembali mengalami perubahan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Melalui Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi menegaskan mata pelajaran PKN pada tingkat SD dan SMP tidak lagi terintegrasi pada mata pelajaran IPS, melainkan berdiri sendiri (Murdiono, 2008: 98).

Berdasarkan pada standar isi kurikulum KTSP ditekankan bahwa Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter, sehingga perlunya penanaman kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Guna mendukung jalannya prinsip-prinsip kehidupan sehari-hari yang demokrasi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi. Mata Pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang baik, mampu dan memahami dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Sudrajat (2011:131) menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya untuk menjadikan sekolah-sekolah

memiliki kualitas yang lebih baik dari kualitas yang bersifat kognitif, tetapi kualitas dari segi sikap dan perilaku dalam kualitas yang bersifat afektif dan psikomotorik. Sehingga pada tahun 2010 pemerintah mencanangkan gerakan nasional pendidikan budaya dan karakter bangsa yang meliputi: aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara konsisten.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia diidentifikasi bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan identifikasi dari empat sumber nilai itu, terdapat 18 nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter yang meliputi: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tau, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab. Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa diintegrasikan melalui mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah dengan prinsip-prinsip yang digunakannya yaitu berkelanjutan melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah, nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan dan proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010: 9-14).

Tahun 2013 kurikulum di Indonesia disebut-sebut telah menyempurnakan kurikulum. KTSP digantikan dengan kurikulum 2013 (K-13), perubahan tersebut membawa kembali Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) seperti kurikulum 1994 menggantikan PKn. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menjadi awal perubahan dan diikuti penerbitan aturan baru.

Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah digantikan dengan Permendikbud No.20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar biaya, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan.

Diberlakukannya Permendikbud No.21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang memuat tingkat kompetensi dan kompetensi inti, menggantikan Permendikbud No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dicabut keberlakuannya dengan diterbitkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang didalamnya memuat kriteria pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan.

Dinyatakan tidak berlakunya Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Permendikbud No. 140 tahun 2014 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Menengah digantikan dengan berlakunya Permendikbud No. 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan yang memuat kriteria, lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, prosedur, cara dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Pendidikan karakter dimaknai sebagai pola berfikir dan berperilaku yang khas dari setiap individu untuk menjalani hidup dan bekerja dengan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Secara universal karakter didasarkan pada lima pilar-pilar yang dirumuskan sebagai nilai

hidup bersama yang meliputi: kedamaian (*peace*), menghargai (*respect*), kerja sama (*cooperation*), kebebasan (*freedom*), kebahagiaan (*happiness*), kejujuran (*honesty*), kerendahan hati (*humility*), kasih sayang (*love*), tanggung jawab (*responsibility*), kesederhanaan (*simplicity*), toleransi (*tolerance*), dan persatuan (*unity*) (Samani & Hariyanto, 2013: 41-43).

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang mengkristalisasi 18 nilai yang dikembangkan pada Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa menjadi menjadi 5 disesuaikan dengan Gerakan Nasional Revolusi Metal (GNRM), kearifan lokal dan kreativitas sekolah nilai utama yang meliputi: religius, nasionalis, gotong royong dan integritas. Karakter sebagai poros pendidikan

2. Pendidikan Karakter di Sekolah

Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntutan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikiran, raga, rasa serta karsa yang dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik mewujudkan kebaikan yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran dan kemauan (Samani & Hariyanto, 2013: 45-47).

Pendidikan karakter di sekolah berkaitan dengan budaya sekolah dan suasana belajar yang dikembangkan guru di kelas melalui proses belajar mengajar. Seperti yang disampaikan oleh Sudrajat (2011:137) budaya sekolah meliputi: keyakinan, nilai, norma, dan kebiasaan yang mempengaruhi setiap sudut sekolah. Sekolah memfokuskan waktu, tenaga, dan sumber daya berkaitan dengan kurikulum dan strategi pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk mendukung penguatan pendidikan karakter seperti pembelajaran (*teaching*), pemodelan

(*modeling*) dan penguatan lingkungan (*reinforcing*).

Dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh Albertus (2012:105) mengagas bahwa kelas merupakan tempat terjadinya proses pendidikan di sekolah yang menuntut terbentuknya komunitas kelas yang berinteraksi antara satu dengan yang lain dalam mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan. Komunitas belajar yang saling menumbuhkan dan mengembangkan, baik secara akademis, moral, kepribadian dan kerohanian.

Suasana belajar di kelas dipengaruhi oleh manajemen kelas yang didalamnya melibatkan komunikasi antara peserta didik dan guru. Selanjutnya Albertus (2012:112-115) menambahkan gagasan mengenai pendampingan dan perwalian yang diberikan oleh wali kelas, wali kelas memiliki peran yang besar bagi perkembangan karakter peserta didik dalam penegakan kedisiplinan di sekolah melalui fungsi yang diembannya. Kemudian konsensus kelas yang akan menimbulkan hubungan timbal balik antar sesama peserta didik berdasarkan kepercayaan (*trust*), rasa hormat (*respect*) dan saling peduli (*caring*). Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, penguatan karakter menggunakan pendekatan yang terintegrasi dalam semua mata pelajaran (*embedded approach*).

Khusus dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendi 1178 Kewarganegaraan fokus pendidikan utama karakternya adalah karakter yang dikembangkan sebagai dampak pembelajaran (*instructional effects*) dan juga dampak pengiring (*nurturant effects*), sedangkan mata pelajaran lain dikembangkan sebagai bagian kegiatan yang hanya memiliki dampak pengiring terhadap berkembangnya karakter dalam diri peserta didik (Samani & Hariyanto, 2013:113)

Asmani (2011: 74-8) mengagas bahwa peran guru dalam pendidikan karakter meliputi keteladanan, Inspirator,

Motivator, Dinamisator, Evaluator. Albertus (2012: 116-122) menegaskan mengenai ciri-ciri dari pendidikan karakter berbasis kelas, yaitu: (1) guru sebagai fasilitator pembelajaran; (2) guru sebagai motivator pembelajaran; (3) guru sebagai desainer program; (4) guru sebagai pembimbing dan sumber keteladanan; (5) isi kurikulum menjadi sumber bagi pembentukan karakter; (6) metode pengajaran dialog bukan monolog; (7) mempergunakan metode pembelajaran melalui kerja sama (*collaborative learning*); (8) partisipasi komunitas kelas dalam pembelajaran; (9) penciptaan kelas sebagai komunitas moral; (10) penegakan disiplin moral; (11) penciptaan lingkungan kelas yang demokratis; (12) membangun sebuah rasa tanggung jawab bagi pembentukan diri; (13) Mengelola konflik moral melalui pembelajaran; dan (14) Solusi konflik secara adil tanpa kekerasan.

Terdapat integrasi antara idialisme lembaga pendidikan (visi dan misi) dengan berbagai macam struktur yang mendefinisikan kinerja individu melalui cakupan tanggung jawab dalam implementasi penguatan pendidikan karakter berbasis sekolah. Albertus (2012:123-130) memberikan gagasan mengenai tanggung jawab sekolah dalam menentukan corak relasional antara warga sekolah dalam rangka realisasi pengembangan program penguatan pendidikan karakter yang terstruktur baik dalam lingkungan lembaga pendidikan maupun realisasi kongkrit dalam kultur sekolah. Terdapat beberapa momen-momen pendidikan karakter berbasis kultur sekolah. (1) momen pengembangan diri; (2) momen perayaan dan kekeluargaan (*caring, celebration, and humor*); (3) Apresiasi dan pengakuan akan prestasi orang lain (*appreciation and recognition*); (4) masa orientasi; (5) pemilihan para pengurus; (6) kebijakan pendidikan (*education policy*); (7) kolegalitas antarguru; (8) pengembangan professional guru; (9)

merawat tradisi sekolah; (10) asosiasi antar guru dan orang tua.

Merujuk dari gagasan Samani & Hariyanto (2013: 140-141) sekolah dapat berkomitmen untuk melaksanakan penguatan pendidikan karakter dengan cara: (1) menekankan pentingnya nilai-nilai adab yang dapat dicontohkan oleh guru sebagai teladan untuk peserta didik; (2) membantu peserta didik membangun ikatan dan tanggung jawab antar sesama; (3) menggunakan kurikulum sebagai wahana untuk mengajarkan nilai dan menguji pernyataan terkait moral; (4) meningkatkan dan mempertajam refleksi moral peserta didik; (5) peningkatan keterlibatan komponen sekolah sebagai strategi pelibatan dengan masyarakat lain; (6) mendukung pengembangan guru dalam dimensi perkembangan moral.

3. Pendidikan karakter di Keluarga

Sejak lahir nalar anak tumbuh dibawah pendidikan yang diberikan oleh orang tua sebagai pondasi ke¹¹⁷⁹percayaan melalui pengasuhan ¹¹⁷⁹ diberikan. Setelah itu pertumbuhan nalarnya berkembang dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang berasal dari lingkungan kerabat, televisi, majalah, internet, dan berbagai sumber lain yang menambah pengetahuannya dan mengantarkan anak dalam memiliki kemampuan untuk dapat menganalisis dan menalar objek luar. Semakin banyak informasi yang diterima dan semakin banyak sistem kepercayaan dan pola pikir yang terbentuk maka semakin jelas tindakan, kebiasaan yang disebut karakter pada anak. Berdasarkan pada hal tersebut sebagaimana yang digagas oleh Majid dan Andayani (2012: 18-19) bahwa setiap individu memiliki sistem kepercayaan (*belief system*), citra diri (*self-image*), dan kebiasaan (*habit*) yang unik.

Anak merupakan bagian dari keluarga yang pendidikannya penting untuk diutamakan, pendidikan keluarga

merupakan lingkungan pertama yang didapatkan oleh anak. Selain memiliki fungsi ekonomis dengan memberikan pembiayaan untuk kehidupan anak, orang tua juga memiliki fungsi edukatif yang lebih dibutuhkan dalam mengembangkan karakter. Sebagaimana penegasan mengenai fungsi orang tua yang disampaikan oleh Albertus (2012: 148-151) dalam mengembangkan karakter pada anak meliputi: (1) orang tua sebagai model peran; (2) orang tua sebagai sumber pengetahuan; (3) orang tua sebagai pintu masuk ke kebudayaan lain; (4) orang tua sebagai rekan belajar; dan (5) orang tua memiliki harapan dan cita-cita bagi anak-anak mereka.

Pendidikan karakter di keluarga dilakukan melalui teladan orang tua sebagaimana digagas oleh Wibowo (2012:123-125) terdapat beberapa kiat yang dapat dilakukan dalam menginternalisasi pendidikan karakter meliputi: (1) Sering mengungkapkan cinta dan kasih sayang; (2) Menjadi pendengar yang baik; (3) Ciptakan suasana yang membuat anak merasa aman; (4) Hindari favoritism; (5) Ajari anak tentang aturan dan batasan; (6) Berikan tanggung jawab dengan memberikan anak pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan, dan sebagai imbalannya mereka berhak atas penghargaan, pujian dan hadiah; (7) Ajari anak mengenai benar dan salah; (8) Jangan membandingkan dengan anak orang lain, terutama dengan saudaranya sendiri; (9) Ajari anak menjadi diri sendiri; (10) Berbuat tegas bila anak melakukan kesalahan dan hindari pernyataan yang bersifat mengumpat atau menyumpahi.

4. Optimalisasi Peran Keluarga dan Sekolah dalam Penguatan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan sikap yang perkembangannya mempengaruhi tingkah laku, cara berfikir dan berorientasi dalam menentukan keputusan dan melibatkan banyak aspek, baik secara

internal dalam diri sendiri maupun eksternal yang meliputi pengaruh orang tua sebagai lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan sosial. Sehingga dalam pendidikan karakter berdasarkan uraian dari Albertus (2012:89-93) secara sederhana terdapat tiga mitra: (1) mitra individu; (2) mitra sosial atau komunitas; dan (3) dan mitra moral. Lembaga pendidikan tentunya diharapkan menjadi tempat dimana mitra tersebut saling berdialog satu sama lain agar pengembangan program pendidikan karakter dalam mengembangkan nilai-nilai karakternya semakin utuh dan menyeluruh. Individu dan lembaga pendidikan dapat berperan aktif sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Albertus (2012:143); Gerakan PPK Kementrian dan Kebudayaan Republik Indonesia, (2017:13) menguraikan penguatan pendidikan karakter berbasis komunitas melibatkan beberapa komunitas. (1) komunitas keluarga (orang tua, wali siswa, dan komite sekolah); (2) komunitas masyarakat (akademisi, LSM, Pengusaha penggiat pendidikan, pelaku seni, dan perkumpulan sosial yang lainnya); dan (3) komunitas politik (pejabat birokrasi negara bidang pendidikan). Berdasarkan pada hal tersebut, komunitas yang dinilai paling dekat dengan peserta didik adalah keluarga dan sekolah sebagai basis penguatan karakter.

Sekolah dan keluarga dapat bersama-sama membantu peserta didik dalam penguatan pendidikan karakter, Sudrajat (2011:150-151) memberikan gagasannya bahwa orang tua sebagai wali dari peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah melalui pemantauan perkembangan tingkah laku anak melalui buku kegiatan siswa, turut datang dan ikut dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Sehingga dalam pertemuan tersebut antara orang tua dan pihak sekolah dapat saling bertukar informasi demi kebaikan peserta didik.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a) Penguatan pendidikan karakter di keluarga lebih mengedepankan aspek keteladanan orang tua berdasarkan pada kepercayaan, citra diri dan kebiasaan.
- b) Optimalisasi peran sekolah sebagai basis penguatan karakter dimulai dari kelas yang membentuk hubungan melalui manajemen kelas dalam bingkai mata pelajaran, dan didukung oleh budaya sekolah yang melibatkan seluruh pihak dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti kegiatan ekstra kulikuler yang terangkum dalam pembelajaran, pemodelan dan penguatan lingkungan.

2. Saran

- a) Bagi sekolah diharapkan mampu senapas dalam penguatan pendidikan karakter dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah dan menyesuaikan dengan kearifan sekolah.
- b) Bagi orang tua diharapkan mampu menjalin komunikasi yang harmonis agar dapat mendukung penguatan pendidikan karakter anak di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Albertus, D. K. 2012. *Pendidikan karakter utuh dan menyentuh*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Asmani, J. M. 2011. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Branson, M.S. 1999. *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKIS.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. *Pemaparan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kemendikbud (online), (http://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/content/modul_dan_buku_saku?page=5), diakses 22 Oktober 2017.
- Kementrian Pendidikan Nasional Badan penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. 2010.
- Lickona, T. 2013. *Pendidikan Karakter Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*. Bandung: Nusa Media
- Majid, A. & Andayani, D. 2012. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset.
- Murdiono, M. 2008. Pemanfaatan Lingkungan Sosial sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Majalah Ilmiah Pembelajaran*, 4 (1): 92-105.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87. Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Samani, M., & Hariyanto. 2013. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Sudrajat, A. 2011. Membangun Budaya Sekolah Berbasis Kaeakter Terpuji. dalam Zuchdi, D. *Pendidkan Karter dalam Perspektif dan Praktik*. (hlm: 131-156). Yogyakarta: UNY Press.
- Wibowo, A. 2012. *Pendidikan Karakter Strategi Mambangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Tri Desti

Program Pascasarjana PPKn UNY, Yogyakarta

E-mail: tridesti19@gmail.com

Abstract. *Persons with disabilities are citizens who have the same rights as other citizens. One of the rights of persons with disabilities is political rights. The article use descriptive method with literature study approach. The data of the article from various literature sources such as books, journals and other scientific articles collected through documentation techniques, discourse identification of books, journals, papers, online articles, magazine, newspapers, and other relevant literature related to the rights political parties with disabilities in Indonesia. Data analysis technique in this research is content analysis by organizing and categorizing data to obtain the result of research which will be conclusion. The result of the discussion of this article indicate that the political rights for persons with disabilities can be seen in terms of political socialization and also political accessibility. So, the government must give political rights for the person with disability as it should be.*

Keywords: *Person with Disabilities, Political Rights*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya. Hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan dan juga mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Hak Asasi Manusia memiliki lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam Hak Asasi Manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik yang dikenal dengan *political rights* atau hak politik.

Berkaitan dengan hak politik, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1), serta pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemilu serta hak untuk

bergabung serta mendirikan partai politik tertentu. Hikmawati dan Rusmiyati (2011: 30) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa penyandang disabilitas membutuhkan kebutuhan yang sama dengan manusia pada umumnya. Salah satunya adalah aksesibilitas yaitu lingkungan yang akses untuk memperlancar dan memudahkan mobilitas karena keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Dalam prakteknya, penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam aksesibilitasnya. Salim (2015: 143) dalam penelitiannya selanjutnya menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mengalami hambatan aksesibilitas dalam ruang publik baik bersifat fisik seperti gedung yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas, hambatan informasi yang menyulitkan dengan ketiadaan atau ketidaksesuaian dengan alat bantu akses informasi yang penyandang disabilitas gunakan, maupun hambatan mental yang dialami oleh penyandang disabilitas karena merasa di kelas duakan dengan mereka

yang non disabilitas sebagai warga yang tidak dapat berkomunikasi.

Berbagai permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam sehingga dapat diperoleh kajian yang komprehensif tentang hak asasi manusia pada umumnya dan khususnya politik penyandang disabilitas di Indonesia untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai Warga Negara Indonesia. Dengan demikian, pembahasan dalam artikel ini memfokuskan kajian pada hak penyandang disabilitas di Indonesia dengan beberapa topik bahasan diantaranya: Bagaimana hak asasi manusia di Indonesia? Bagaimana perlindungan hukum hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia? Bagaimana hak politik penyandang disabilitas di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah lainnya yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, identifikasi wacana dari buku, jurnal, makalah, artikel online, majalah, surat kabar, dan sumber bacaan lain yang relevan dan berhubungan dengan hak politik penyandang disabilitas di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan menggunakan mengorganisasikan dan mengkategorikan data untuk memperoleh hasil penelitian yang akan menjadi kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia secara kodrati, universal dan abadi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga,

hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak kemanan dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan oleh siapapun. John Locke dalam Effendi (1994: 3) menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang bersifat kodrati, yang bahkan kekuasaan apapun termasuk negara tidak dapat mencabutnya. Maka, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hal tersebut dikarenakan Hak Asasi Manusia yang bersifat mendasar dan kodratiah sehingga tidak dapat dipisahkan dari dalam kehidupan manusia.

Menurut Jack Donney dalam Rhona (2008: 28) menjelaskan bahwa HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. Maka, perbedaan yang ada dalam setiap diri individu sama sekali tidak dapat menghambat seseorang untuk memiliki hak tersebut karena hak tersebut telah melekat dan tidak dapat oleh siapapun.

2. Hak Politik Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas sering memperoleh hambatan untuk mendapatkan berbagai akses dan kontrol terhadap pembangunan, sumber daya keluarga maupun masyarakat. Hambatan terhadap penyandang disabilitas tersebut dilakukan oleh keluarga, masyarakat bahkan negara yang menimbulkan ketidakadilan akibat diskriminasi. Bentuk diskriminasi tersebut bermacam-macam dan berbeda-beda dari tempat ke tempat dan waktu ke waktu. Dari segi sumbernya bisa dari kebijaksanaan pemerintah, keyakinan atau tafsiran keagamaan, keyakinan tradisi atau bahkan asumsi ilmu sosial. Menurut Peter (1997: 145) kecacatan adalah kondisi fisik

atau mental yang menyulitkan atau membuat mustahil bagi orang yang bersangkutan untuk memenuhi peranan yang normal secara memadai dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB pada tanggal 18 Oktober Tahun 2011 lalu dengan diadakannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi ini memuat hak-hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya kehidupan berpolitik, termasuk dalam hal pemilihan umum. Hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu dijamin Pasal 29 CRPD mengenai hak-hak kehidupan politik dan publik bagi penyandang disabilitas.

Pasal 29 mengenai hak partisipasi dalam kehidupan politik dan publik memuat tentang kewajiban negara untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam pemilu. Dengan demikian negara-negara pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

- a. Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.
- b. Secara aktif mengembangkan lingkungan dimana penyandang disabilitas secara efektif dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan

bermasyarakat, tanpa adanya diskriminasi dan berdasarkan atas azas kesetaraan dengan warga Negara lain, serta mendorong partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Landasan Hukum Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan manusia normal lainnya yang diakui dalam peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (Sutrisni, 2015: 110). Ridlwan (2013: 237) juga menjelaskan bahwa perlindungan penyandang disabilitas merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan penyandang disabilitas.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia banyak peraturan yang mengatur tentang kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Sejalan dengan hal tersebut Rompis (2016: 175) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki prinsip-prinsip hukum yang kuat dalam menjadikan Indonesia sebagai negara hukum dengan adanya peraturan tentang jaminan terhadap perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang tercermin dalam Pancasila sebagai filosofi negara, pembukaan UUD 1945, UU, TAP MPR, Konvensi dan juga Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik). Isi dalam konvenan tersebut terdapat jaminan bagi setiap manusia untuk terpenuhinya haknya seperti hak hidup, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak bebas

dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak atas keamanan pribadi, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, atinya, penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan haknya dengan perlindungan dan fasilitas tanpa perbedaan dari negara.

Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran serta penyandang disabilitas adalah sama dengan warga negara lainnya. Tidak terkecuali dengan kesempatan disabilitasnya dalam memperoleh dan ikut serta mewujudkan upaya peningkatan dalam segala aspek sebagai wujud terpenuhinya hak dan kesempatan yang sama, terutama dalam aspek politik. Pelaksanaan hak politik bagi penyandang disabilitas tersebut harus berasaskan: penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Terkait hak politik yang diberikan oleh negara kepada warga negara tersirat dalam pasal 28 UUD 1945 bahwa negara memberikan kemerdekaan untuk mengeluarkan apa yang menjadi ide dalam bnetuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 dinyatakan bahwa negara memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan peluang yang sama pada bidang pemerintahan. Dari rumusan kedua pasaltersebut dapat disimpulkan bahwa negara menjamin hak setiap warga negaranya untuk dapat turut serta dalam pemerintahan menyampaikan

apa yang menjadi idenya demi kemajuan negra atau kelancaran pemerintahan sehingga hak politik merupakan hak yang dapat dimiliki oleh setiap warga Negara termasuk di dalamnya penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi. Selain dalam UUD 1945 ketentuan lain yang memberikan perlindungan hak politik bagi penyandang disabilitas adalah Pasal 23 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Ketentuan demikian menguatkan dasar hokum dan perlindungan hukum atas hak politik bagi penyandang disabilitas.

Hak politik untuk dipilih dan memilih yang mempunyai arti bahwa setiap warga negara sama-sama mempunyai hak mendapatkan hak politiknya untuk dipilih sebagai pelaksana perkumpulan, organisasi ataupun partai politik dipertegas dengan deklarasi universal HAM Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan neerinya sendiri, baik langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas, dan ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahannya.

Hak politik bagi penyandang disabilitas diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu ada Pasal 13 yang meliputi hak: memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk, menjadi anggota, dan/ atau pengurus organiasasi masyarakat dan/ atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilita pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/ atau bagian

penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/ walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan, pendidikan politik.

Salah satu bentuk pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas adalah mendapatkannya aksesibilitas non fisik yang berupa pendidikan politik dalam pemilihan umum, penyampaian informasi terkait pemilu (seperti ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan pemilu, pengenalan visi dan misi dan program-program yang ditawarkan oleh para calon kepala daerah), calon serta sosialisasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon DPD, sebagai calon Presiden/ wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

4. Sosialisasi Penyandang Disabilitas

Pendidikan politik pada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari sekolah, pemerintah ataupun partai politik. Sejalan dengan hal tersebut, Alfian (1990: 245-246) menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga mereka mampu memahami nilai-nilai politik ideal yang akan di bangun dalam negara.

Menurut Kantaprawira (2004: 55), pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi warga negara agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal. Surbakti (2010: 150) juga memberikan kontribusinya dalam mendefinisikan pendidikan politik, yaitu suatu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Menurut Kantaprawira

(2004: 55), pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi warga negara agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal. Surbakti (2010: 150) juga memberikan kontribusinya dalam mendefinisikan pendidikan politik, yaitu suatu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan.

Sosialisasi politik menurut Kantaprawira (2004: 56) dapat dilakukan melalui: (1) Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi yang biasa membentuk pendapat umum; (2) Siaran radio dan televisi serta film (*audio visual media*); (3) Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

Suharti (2015: 71-72) selanjutnya menyebutkan bahwa sosialisasi politik dapat dilakukan dengan kegiatan sosial ditempat-tempat sosial seperti, masjid dan juga sekolah. Lebih lanjut Suharti (2015: 74) menjelaskan pendidikan politik dapat dilakukan dengan jalan memberikan pengarahan kepada warga masyarakat bahwa ketika memilih wakil rakyat dan berorganisasi, masyarakat harus tahu dan memahaminya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. KPU memberikan sosialisasi pemilu pada penyandang disabilitas melalui tatap muka secara langsung dengan menyediakan penerjemah bahasa isyarat bekerjasama dengan pihak Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (Rita, Nurmalisa dan Yunisca 2015: 7).

Bahan-bahan sosialisasi yang disebar di publik senantiasa memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Video pemungutan dan penghitungan suara yang disebar lewat media *youtube* seperti video

tahapan dan persiapan pemungutan suara dan proses penghitungan suara dilengkapi terjemahan dalam bentuk bahasa isyarat sesuai dengan kebutuhan pemilih yang tunarungu. Untuk memenuhi kebutuhan pemilih yang tunanetra, KPU juga menggunakan radio sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih (Manik, 2015: iv).

5. Aksesibilitas Politik Penyandang Disabilitas

Pemungutan dan penghitungan suara adalah puncak dari penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. KPU memberi jaminan bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan hak suaranya di bilik suara dengan mudah. Lokasi TPS, jalan menuju lokasi TPS, lebar pintu masuk dan keluar TPS, ruang di dalam TPS, ketinggian meja bilik suara dan keberadaan ruang kosong di bawahnya untuk memudahkan ruang gerak penyandang disabilitas tidak luput dari perhatian penyelenggara pemilu (Manik, 2015: iv). Penyediaan sarana aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik merupakan kebutuhan bagi penyandang disabilitas (Priscyllia, 2016: 110).

Kriteria TPS aksesibel (Prayudi 2015: 14) diutamakan pada lokasi sebagai berikut: (1) Tidak didirikan di lahan yang berbatu-batu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang ada anak tangganya; (2) Tinggi meja bilik setidaknya 75-100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS; (3) Tinggi meja kotak suara setidaknya 35 cm dari lantai; (4) Tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tunanetra terbentur; (5) Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara eluasa di TPS.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 183 Tahun 2015 tentang Desain dan Spesifikasi Teknis Alat

Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menegaskan bahwa aat bantu cobos (*template*) bagi pemilih tunanetra untuk memberikan kemudahan dalam mencoblos pilihan. Sejalan dengan hal tersebut layanan ramah disabilitas dalam pemungutan suara bagi disabilitas netra (Prayudi, 2015: 31-32) dapat dilakukan dengan: (1) Sentuh pundak atau tangan disabilitas netra saat hendak memulai pembicaraan; (2) Apabila mereka butuh bantuan; (3) KPPS, perkenalkan mereka untuk memegang lengan anda dan menentukan apakah mereka lebih nyaman berada di sebelah kiri atau kanan anda; (4) Saat menggambarkan berbagai benda gunakan kata-kata yang lugas dan tepat; (5) Saat mendekati tangga, berhenti sejenak saat anda berada di awal anak tangga. Jelaskan arah tangga (naik atau turun); (6) Bila melangkahi lobang, berhenti sejenak sebelum melangkah dan melangkah lebih dulu sehingga pemilih disabilitas dapat memperkirakan seberapa jauh ia harus melangkah; (7) Bila melewati lorong/pintu yang sempit, lipat tangan di belakang punggung agar pemilih disabilitas dapat memegang pergelangan tangan anda dan berjalan sejajar di belakang dengan anda.

Lebih lanjut Prayudi (2015: 32) menjelaskan layanan disabilitas dalam pemungutan suara bagi disabilitas netra dapat dilakukan dengan: (1) Tepuk bahunya atau lambaikan tangan disabilitas runggu. Tatap dia secara langsung dan berbicaralah dengan gerak mulut yang jelas dan pelan sehingga ia dapat membaca gerak bibir anda; (2) Gunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk membantu berkomunikasi; (3) Gunakan perbendaharaan kata yang baku dan sederhana. Jelaskan arti dari istilah yang tidak dikenal yang anda gunakan secara tertulis; (4) Komunikasi secara tertulis dan

melalui gambar akan sangat membantu komunikasi; (5) Bicaralah langsung kepada pemilih, jangan meminta penerjemah bahasa isyarat atau anggota keluarga/rekan pemilih untuk menjawab pertanyaan bagi pemilih.

Sedangkan layanan ramah disabilitas daksa dalam pemungutan suara (Prayudi, 2015: 32-33) diantaranya: (1) Sebelum memberikan bantuan, tanyakan kepada pemilih disabilitas daksa apakah mereka memerlukan bantuan atau tidak; (2) Biarkan mereka berpegangan apabila kaki mereka kurang stabil; (3) Bila ia terjatuh dan berusaha untuk berdiri, ulurkan tangan anda sebagai pegangan; (4) Bagi pengguna kursi roda, tawarkan posisi duduk di pinggir barisan atau dekat pintu agar mereka dapat bergerak secara leluasa; (5) Saat membantu mendorong kursi roda, hindari jalan berbatu dan berlobang.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Setiap warga negara memiliki hak asasi yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh warga negara lain maupun oleh negara. Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia memiliki hak politik yang dilindungi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan hak politik bagi penyandang disabilitas harus berdasarkan atas *equality* tanpa adanya diskriminasi. Hak politik bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui sosialisasi politik dan juga aksesibilitas politik yang ramah atau bebas hambatan bagi penyandang disabilitas.

2. Saran

Berbagai peraturan yang ada sebagai payung hukum penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya seharusnya dapat dilaksanakan sesuai apa yang ada di dalam peraturan baik dalam UUD 1945, UU, TAP MPR, PP, maupun peraturan perundangan lainnya yang menunjang bagi

penyandang disabilitas. Sehingga, tidak ada diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. (1990). *Masalah dan prospek pembangunan politik Indonesia, kumpulan karangan*. Jakarta: Gramedia
- Coleridge, Peter. (1997). *Pembebasan dan Pembangunan: Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar Offset.
- Effendi, Mansyur. (1994). *Dimensi dan dinamika hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Himawati, Eny., & Rusmiati, Catarina. (2011). Kebutuhan pelayanan sosial penyandang cacat. *Jurnal informasi* 16(01),17-32.
- Kantaprawira, Rusadi. (2004). *Sistem politik Indonesia suatu model pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Edisi revisi
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 183 tahun 2015 tentang desain dan spesifikasi teknis alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih netra pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota
- Manik, Husni Kamil. (2016). *Modul ringkas pemilu akses bagi penyandang disabilitas: Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat*. Jakarta: KPU
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilihan dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil

- bupati dan/atau walikota dan wakil walikota
- Prayudi, Ketut Udi. (2015). Panduan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tps. Jakarta: kpu
- Priscylia, Fanny. (2016). Kajian hukum terhadap fasilitas pelayanan public bagi penyandang disabilitas. *Jurnal lex crime*, 5(3), 105-112.
- Ridlwan, Zulkarnain. (2013). Perlindungan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas (rights of persons with disability). *Jurnal fiat justisia*, 7(2), 231-243.
- Rita, Maria Desti., Nurmalisa, Yunisca., & Yanzi, Hermi. (2016) Peranan kpu dalam sosialisasi pemilukada kepada penyandang disabilitas di kota Bandar lampung. *Jurnal kultur demokrasi*, 4(1). 1-15.
- Rompis, Kartika Gabriela. (2016). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam perpektif hukum hak asasi manusia. *Jurnal lex adminisstratum*, 4(2), 171-177.
- Salim, ishak. (2015). Perspektif disabilitas dalam pemilu 2014 dan kontribusi gerakan difabel Indonesia bagi terbangunnya pemilu inklusif di Indonesia. *Jurnal magister ilmu politik universitas hasanuddin*, 1(2), 127-156.
- Smith, Rhona K. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII
- Suharti, Bangun. Sosialisasi politik dan komunikasi politik anggota dewan dalam memberikan pendidikan politik dan menjaring aspirasi masyarakat (studi pada dprd kota Bandar lampung dari partai democrat). *Jurnal sosiologi*, 16(2), 67-76
- Surbakti, Ramlan. (2007). *memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.
- Sutrisni, Ni Komang. (2015). Pengaturan advokasi terhadap hak-hak penyandang disabilitas terhadap diskriminasi di bidang penegakan huku. *Jurnal magister hukum udayana*, 4 (1), 101-111.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan international covenant on civil and political rights
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan convention on rights of person with disability
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabili

REKULTURISASI NILAI-NILAI PERDAMAIAN MELALUI PEMBELAJARAN PKN TRANSFORMATIF

Diana Wulandari

Program Pascasarjana PPKn UNY, Yogyakarta

E-mail: dianawulandari130587@gmail.com

Abstrak. Pendidikan kewarganegaraan mengemban tugas penting dalam pembudayaan nilai-nilai perdamaian untuk mewujudkan warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan sebagai perantara untuk mentransfer nilai-nilai perdamaian bagi peserta didik membutuhkan pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan transformatif. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi: 1) nilai-nilai perdamaian yang perlu direkulturasikan melalui pendidikan kewarganegaraan, 2) strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan transformatif yang dapat diterapkan oleh guru dalam upaya rekulturasikan nilai-nilai perdamaian. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan analisis literasi melalui instrumen berupa anotasi literasi. Prosedur teknik analisis data dilakukan melalui pengaduan data, reduksi data, analisis data, dan inferensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai perdamaian yang perlu direkulturasikan melalui pendidikan kewarganegaraan mencakup beberapa nilai inti yang dibutuhkan untuk hidup bersama secara damai yakni nilai inti perdamaian, hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan. Setiap nilai inti memiliki indikator nilai-nilai yang saling mendukung dan berkaitan untuk membentuk perdamaian. Rekulturasikan atas nilai-nilai ini menjadi penting dilakukan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan transformatif. Strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan transformatif dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis disorientasi dilema, refleksi kritis, wacana dialektis, pembelajaran berbasis pengalaman, dialog atau pembelajaran melalui musyawarah, pembelajaran afektif dan relasional, pembelajaran berbasis konteks, membangun hubungan otentik antara peserta didik dan pendidik dengan mendorong peserta didik untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi informasi secara terbuka, pembelajaran berbasis masyarakat multikultural, pedagogi responsif kultural dan berkelanjutan melalui pembelajaran tanggap budaya, serta program aksi sipil. Beragam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan transformatif tersebut hanya dapat diterapkan dalam suasana atau iklim kegiatan belajar mengajar yang demokratis baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Kata kunci : Nilai-Nilai Perdamaian, Strategi Pembelajaran PKN Transformatif

PENDAHULUAN

Kebutuhan merekulturasikan nilai-nilai perdamaian menjadi amat penting dilakukan di negara-negara rawan konflik seperti Indonesia. Hasil penelitian UNESCO (2015: 6) menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu daftar negara yang terkena dampak konflik pada periode 2002-2011. Potensi konflik muncul dari persoalan-persoalan baik internal (pengelolaan kebhinekaan) maupun

eksternal (implikasi globalisasi berupa cepatnya arus informasi, tingginya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerusakan dan pencemaran lingkungan, defisit energi dan sumber daya alam akibat ekspansi dan eksploitasi, tingginya laju migrasi dan urbanisasi, serta bertambahnya hubungan timbal balik dan interaksi global). Beragam peristiwa konflik sering disertai dengan tindakan kekerasan, anarkhis, radikal, dan

permusuhan laten yang rentan terpolarisasi dan bersifat divergen ke berbagai kalangan termasuk generasi muda.

Kalangan generasi muda pun menjadi kelompok rentan terhadap konflik sehingga mereka mudah terlibat dalam pusaran konflik. Hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pelaku kekerasan (*bullying*) di sekolah mengalami peningkatan dari 67 kasus pada tahun 2014 menjadi 79 kasus pada tahun 2015, pelaku tawuran mengalami peningkatan pula dari 46 kasus pada tahun 2014 menjadi 103 kasus pada tahun 2015 (Republika, 2015: 7). Hasil survei yang dilakukan Setara Institute (2016) dengan responden pelajar SMA Negeri di Jakarta & Bandung Raya menunjukkan bahwa meskipun 61,6% pelajar dikategorikan toleran, namun masih ada a) 35, 7% pelajar yang masuk dalam kategori intoleran pasif, b) 2, 4% pelajar berkategori intoleran aktif, dan c) 0,3% pelajar dikategorikan teror. Data ini memperlihatkan bahwa perilaku pelajar berpotensi mengarah pada tindakan-tindakan anti perdamaian; demoralisasi; krisis nilai-nilai kemanusiaan; degradasi toleransi; krisis kepedulian terhadap orang lain, kelompok lain, dan lingkungan; krisis resiliensi; dan minim kemampuan penyelesaian masalah dengan damai. Oleh karena itu, peranan pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan dalam rekulturasasi nilai-nilai perdamaian menjadi sangat krusial dan strategis.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi kebutuhan di sekolah, sebab salah satu aspek dari pendidikan kewarganegaraan adalah menumbuhkan nilai-nilai perdamaian untuk menghasilkan kebaikan sekaligus keterlibatan warga negara secara produktif dalam penyelesaian masalah

baik lingkup lokal, nasional, maupun global dengan mengedepankan sikap anti kekerasan dan kemampuan resolusi konflik. Hasil penelitian Angulo, et all (2016: 169) mengenai pendidikan kewarganegaraan di Spanyol menjelaskan bahwa visi pendidikan kewarganegaraan selama periode transisi demokrasi adalah terwujudnya perdamaian yakni suatu keadaan yang tidak hanya dimaknai sebagai kondisi tanpa perang, tetapi juga kondisi yang kondungsif untuk terwujudnya kesetaraan sosial dan solidaritas. Tidak jauh berbeda dengan Spanyol, transisi demokrasi di Indonesia pun membutuhkan kemampuan warga negaranya untuk mewujudkan perdamaian sehingga proses demokratisasi dapat berjalan dengan baik.

Pendidikan kewarganegaraan mengemban tugas penting dalam mempromosikan berbagai nilai-nilai perdamaian untuk mewujudkan warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan sebagai perantara untuk mentransfer nilai-nilai perdamaian bagi peserta didik membutuhkan proses pembelajaran yang tidak sekedar informasi searah dari pendidik. Namun untuk mewujudkan peserta didik yang mempunyai keunggulan sebagai warga negara yang transformatif, pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus dilaksanakan secara transformatif pula atau diistilahkan sebagai pendidikan kewarganegaraan transformatif.

Pendidikan kewarganegaraan transformatif dipandang mampu mewujudkan warga negara transformatif. Warga negara transformatif dikategorikan sebagai *deep citizen* yang bercirikan a) pelibatan tindakan sipil yang dirancang untuk mengaktualisasikan nilai, prinsip moral dan cita-cita di luar hukum dan

konvensi yang ada, b) warga negara transformatif mampu mengambil tindakan untuk mempromosikan keadilan sosial bahkan jika dipandang perlu tindakan tersebut dilakukan dengan melanggar, menantang, membongkar hukum, konvensi, atau struktur yang ada yang dinilai tidak sesuai dengan keadilan sosial, c) tindakan warga negara transformatif didasarkan pada argumentasi rasional empiris dan kritis dengan berlandaskan pada kebenaran (Banks, 2008: 136). Karakteristik warga negara transformatif tersebut dipandang esensi pada abad 21.

Fokus pendidikan kewarganegaraan harus menjangkau pada pembentukan warga negara transformatif, tidak hanya berhenti atau sebatas pembentukan warga negara yang mendapatkan pengakuan legal dari negara atau *recognized citizenship* dan warga negara yang partisipatif atau *participatory citizenship* (Banks, 2017: 367). *Recognized citizenship* memiliki karakteristik pengakuan legal negara terhadap status kewarganegaraan individu atau kelompok yang memberikan hak dan kesempatan individu atau kelompok untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat sipil negara-bangsa, termasuk dalam bidang politik. Namun tipe ini tidak menjamin tingginya partisipasi warga negara, akibatnya individu atau kelompok berpartisipasi pada tingkat yang sangat berbeda bahkan ada yang nonpartisipan. *Participatory citizenship* memiliki karakteristik individu atau kelompok warga yang menyadari arti penting hak dan kesempatan berpartisipasi dalam urusan negara-bangsa termasuk bidang politik, sehingga warga berupaya mengoptimalkan keterlibatan mereka untuk mempengaruhi keputusan politik

dan mengaktualisasikan undang-undang dan konvensi yang ada.

Tipe *recognized citizenship* dan *participatory citizenship* yang paling berkuasa dalam negara-bangsa cenderung melihat kepentingan mereka sebagai kepentingan umum, sehingga kepentingan kelompok minoritas menjadi terpinggirkan (Banks, 2017: 370). Kondisi ini kontradiktif dengan keadilan sosial dan nilai-nilai hak asasi manusia. Oleh karena itu posisi *transformative citizenship* menjadi penting sebagai perwujudan warga negara yang berkeadilan sosial dan mampu mengambil tindakan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dan prinsip moral universal.

Deskripsi latar belakang ini mendorong perlunya penyusunan rumusan masalah mengenai: 1) apa saja nilai-nilai perdamaian yang perlu direkulturasikan melalui pendidikan kewarganegaraan?, 2) apa saja strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan transformatif yang dapat diterapkan oleh guru dalam upaya rekulturasikan nilai-nilai perdamaian? Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi: 1) nilai-nilai perdamaian yang perlu direkulturasikan melalui pendidikan kewarganegaraan, 2) strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan transformatif yang dapat diterapkan oleh guru dalam upaya rekulturasikan nilai-nilai perdamaian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi literatur merupakan jenis penelitian yang mengkaji beragam dokumen yang relevan dengan rumusan dan tujuan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Metode penelitian yang berjenis studi literatur tidak mengikat

peneliti untuk menentukan tempat penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan analisis literasi melalui instrumen berupa anotasi literasi. Prosedur teknik analisis data dilakukan melalui pengadaan data, reduksi data, analisis data, dan inferensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekulturasasi dapat dimaknai sebagai proses pembudayaan kembali perilaku individu dan kelompok berdasarkan keyakinan, nilai, dan norma yang dicita-citakan. Rekulturasasi merupakan salah satu pendekatan budaya perdamaian (Galtung, 2000: 8). Rekulturasasi nilai-nilai perdamaian merupakan bagian esensi dari pembentukan budaya perdamaian. Budaya perdamaian didefinisikan sebagai proses aktif, positif, partisipatif dimana keragaman dihormati, perbedaan ditoleransi, dialog didorong, konflik dipecahkan dalam semangat saling pengertian dan kerjasama, serta tumbuh dari keyakinan dan tindakan orang-orang yang berkembang secara berbeda di masing-masing negara dan wilayahnya tergantung pada tradisi, budaya, dan agama mereka (UNESCO, 2005: vii).

Rekulturasasi nilai-nilai perdamaian melalui pendidikan kewarganegaraan dalam pendekatan perdamaian perspektif Galtung dikategorikan sebagai bentuk *peace building*. Pendekatan *peace building* merupakan upaya penciptaan perdamaian positif yakni perdamaian yang pemaknaannya tidak sebatas nonkekerasan (perdamaian negatif) namun lebih luas mencakup kehadiran keadilan sosial (Galtung, 1996: 103), keadilan struktural (Fischer & Hanke, 2009: 229), hubungan non-eksploitatif, keseimbangan hubungan antara manusia dan ekologi, kesejahteraan yang akan mendorong berkurangnya akar

penyebab konflik (Castro & Galace, 2010: 14), perdamaian yang dapat dibudidayakan melalui latihan mengendalikan diri, mengembangkan toleransi, menghormati perbedaan, perhatian dan cinta kepada orang lain, menekankan kerjasama, kepedulian, berkeadilan sosial, dan kebebasan berekspresi (UNESCO, 2005: 2-6).

Nilai-nilai perdamaian secara terminologi berasal dari dua kata yaitu nilai dan perdamaian. Nilai dimaknai sebagai sifat yang melekat pada subjek yang berguna sebagai acuan tingkah laku manusia (Thoha, 1990: 61). Nilai-nilai merupakan prinsip moral yang diterima oleh masyarakat dan mencerminkan kualitas manusia yang positif intrinsik (UNICEF & UNESCO, 2008: 8). Sedangkan perdamaian mengacu pada pemaknaan *peace building*. Dengan demikian, nilai-nilai perdamaian didefinisikan sebagai kualitas manusia yang mencerminkan perdamaian negatif dan positif yang berguna sebagai acuan tingkah laku dan prinsip moral manusia.

UNESCO (1998: 5) mengidentifikasi beberapa nilai inti yang dibutuhkan untuk hidup bersama secara damai dan harmonis dalam perspektif Asia Pasifik. Nilai-nilai inti tersebut mencakup perdamaian, hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan. Masing-masing nilai inti memiliki indikator nilai yang saling mendukung dan berkaitan. Nilai inti perdamaian memuat indikator nilai berupa cinta, sayang, harmoni, toleransi, saling merawat dan berbagi, saling ketergantungan, empati, kerohanian dan bersyukur menjadi pendukung bagi terbentuknya nilai inti perdamaian. Nilai hak asasi manusia memuat indikator nilai berupa kebenaran, kesetaraan dan keadilan, menghormati martabat manusia, integritas, akuntabilitas, kejujuran,

penerimaan/apresiasi keanekaragaman, kebebasan dan tanggung jawab, serta kerjasama menjadi pendukung bagi terbentuknya hak asasi manusia.

Nilai demokrasi memuat indikator nilai berupa menghormati hukum dan ketertiban, kebebasan dan tanggung jawab, persamaan, disiplin diri, kewarganegaraan yang aktif partisipatif dan bertanggungjawab, keterbukaan melalui dialog, berpikir kritis, serta solidaritas melalui pengambilan keputusan kolektif, kerjasama, kerja tim, dan penyelesaian masalah dengan damai. Nilai pengembangan berkelanjutan memuat indikator nilai berupa efisiensi, orientasi masa depan, kepedulian lingkungan, pengelolaan sumber daya yang bertanggungjawab dan berkeadilan sosial, kreativitas melestarikan sumber daya fisik, sosial, budaya, dan lingkungan berhemat/kesederhanaan ekologi pribadi dengan menghormati kehidupan manusia dan alam.

Nilai-nilai tersebut saling berkorelasi satu sama lain untuk membentuk perdamaian dan keharmonisan. Nilai-nilai yang membentuk perdamaian ini perlu disalurkan dan diinternalisasi kepada peserta didik melalui pendidikan kewarganegaraan. Proses ini tentu membutuhkan pendekatan pembelajaran yang tepat, salah satunya melalui pendekatan transformatif. Rekulturasasi atas nilai-nilai yang membentuk perdamaian ini dipandang linier dengan pendekatan transformatif dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Linieritas keduanya dapat ditelusuri dari konstruksi teoritis yang membangun paradigma pendidikan kewarganegaraan transformatif.

Konstruksi teoritis yang membangun paradigma pendidikan kewarganegaraan transformatif tidak

dapat dipisahkan dari kemunculan konsepsi pembelajaran transformatif, serta tipologi kewarganegaraan transformatif dalam perspektif Banks yang memunculkan istilah pendidikan kewarganegaraan transformatif. Berikut ini merupakan uraian atas hasil penelusuran teoritis mengenai pembelajaran transformatif dan pendidikan kewarganegaraan transformatif, serta keterkaitannya dengan nilai-nilai yang membentuk perdamaian.

Pembelajaran transformatif dianggap penting dalam proses pembelajaran sebab diyakini mampu membawa efek belajar sekaligus efek perubahan yang lebih baik bagi kehidupan pembelajar baik dari ditinjau dari sisi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan (Howie & Bagnall, 2013: 827). Pembelajaran transformatif didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang menekankan keterlibatan peserta didik dalam memandang dan memaknai dunia menjadi lebih inklusif, anti diskriminasi, mampu mengelola emosi, reflektif, dan terbuka (Mezirow, 2012; Jones, 2015: 268). Mezirow menjelaskan proses pembelajaran transformatif secara garis besar diawali dengan peserta didik: 1) mengidentifikasi ide, nilai, keyakinan, dan perasaan secara kritis; 2) memeriksa asumsi dan menguji pembenaran mereka melalui wacana rasional; 3) membuat keputusan didasarkan pada konsensus yang dihasilkan (Mezirow, 2012; Henderson, 2002: 202). Kunci pembelajaran transformatif dalam pandangan Mezirow (Taylor & Laros, 2014: 136) adalah penggunaan pembelajaran berbasis disorientasi dilema, refleksi kritis, dan wacana dialektis. Penggunaan kunci pembelajaran ini akan menghasilkan transformasi

kognitif berupa tumbuhnya kesadaran akan cara berpikir alternatif serta menguji alternatif.

Penekanan kognitif pada pembelajaran transformatif versi Mezirow mendorong pemikir lain seperti Taylor, Laros, Shan, Butterwick, Turay, English untuk mengintegrasikan aspek-aspek afektif dan keterampilan. Shan & Butterwick (2016: 5-6) menyatakan bahwa dengan mendasarkan pada perspektif Paulo Freire mengenai pembelajaran yang berbasis emansipatoris sosial, pembelajaran transformatif dipandang sebagai proses multidimensi yang mencakup bagaimana peserta didik berhubungan dengan diri mereka sendiri sebagai individu dan bagian dari masyarakat, sehingga perubahan yang dihasilkan pun tidak hanya sebatas perubahan individu namun juga perubahan sosial seperti perubahan perspektif masyarakat mengenai marginalisasi dan pengucilan.

Taylor & Laros (2014: 137) mengembangkan beberapa komponen pembelajaran transformatif untuk membangun kognitif, afektif, dan *skills* peserta didik yang dapat mempromosikan nilai-nilai perdamaian antara lain: 1) pembelajaran berbasis pengalaman, 2) promosi refleksi kritis, 3) dialog, 4) orientasi holistik termasuk pembelajaran afektif dan relasional, 5) kesadaran akan konteks serta membantu peserta didik mengembangkan apresiasi tentang bagaimana faktor personal dan sosiokultural mempengaruhi pembelajaran, 6) pentingnya membangun hubungan otentik antara peserta didik dan pendidik dengan mendorong peserta didik untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi informasi secara terbuka.

Upaya pengembangan komponen pembelajaran transformatif juga

dilakukan Turay & English. Turay & English (2008: 292) mengembangkan pembelajaran transformatif untuk mengajarkan nilai-nilai perdamaian melalui model transformatif pendidikan perdamaian yang berakar pada kerangka partisipatif, transformatif, dan emansipatoris. Turay & English mengajukan lima komponen model transformatif pendidikan perdamaian yakni: 1) keragaman yang diinformasikan secara konsisten melalui teori dan praktik, 2) penekanan pembelajaran partisipatif, 3) perlunya perspektif global, 4) integrasi pengetahuan pribumi/literasi-literasi lokal, 5) dasar spiritual religius. Beragam pembelajaran transformatif tersebut memberikan kontribusi berupa variasi implementasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dapat diterapkan oleh pendidik dalam rangka merekulturasikan nilai-nilai perdamaian.

Rekulturasikan nilai-nilai perdamaian melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan transformatif juga dapat ditelusuri dari pemikiran Banks, yang memperkenalkan pendidikan kewarganegaraan transformatif untuk mengurangi gagalnya kewarganegaraan bagi peserta didik serta menghadirkan partisipasi peserta didik dalam keragaman. Warga negara yang gagal ditandai dengan orientasi individu pada kebutuhan mereka sendiri untuk kemandirian politik, identitas kelompok, dan struktural daripada tujuan menyeluruh dan bersama sebagai negara bangsa (Bank, 2017: 367).

Pendidikan kewarganegaraan transformatif diyakini mampu mewujudkan warga negara transformatif, yaitu warga negara yang mampu mengambil tindakan untuk menerapkan dan mempromosikan kebijakan, tindakan, dan perubahan

yang sesuai dengan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan persamaan. Aktualisasi nilai dan prinsip moral universal yang diambil oleh warga negara transformatif melampaui batas negara-bangsa dan nasional, bahkan mereka berani menentang dan melanggar hukum lokal, negara bagian, atau nasional untuk mempromosikan nilai-nilai kosmopolitan dan universal. Contohnya tindakan yang dilakukan oleh beberapa tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi, Eleanor Roosevelt, Martin Luther King, dan Nelson Mandela yang mampu bertindak secara transformatif untuk mengaktualisasikan nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan sosial, menghilangkan diskriminasi dan rasisme yang dilembagakan (Bank, 2017: 367). Westheimer & Kahne (2004: 369) menyatakan bahwa masyarakat transformatif memiliki karakteristik kritis dalam menilai struktur, sosial, politik, dan ekonomi, serta mampu mengidentifikasi akar penyebab ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, eksistensi masyarakat transformatif menjadi sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial warga.

Akar pendidikan kewarganegaraan transformatif adalah pengetahuan akademis transformatif (Banks, 2008: 135). Banks (2009: 19) menjelaskan bahwa ada perbedaan signifikan antara pengetahuan akademis transformatif dengan *mainstream* atau pengarusutamaan pengetahuan akademik. Perbedaan kedua tipe pengetahuan tersebut terletak pada asumsi epistemologis tentang sifat pengetahuan, pengaruhnya terhadap kepentingan manusia, nilai-nilai yang ada pada konstruksi pengetahuan, serta tujuan dari pengetahuan. Pengetahuan akademis transformatif cenderung bersifat dinamis dan interaktif,

sedangkan *mainstream* pengetahuan akademis cenderung kaku dan statis (Banks, 2009: 11). Prinsip penting dari *mainstream* pengetahuan akademis adalah netral, obyektif, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan dan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan pengetahuan akademis transformatif berangkat dari asumsi dan tujuan *postmodern* tentang sifat dan tujuan pengetahuan. Banks menelusuri pemikiran para ilmuwan seperti Foucault, Rorty, Rosenau, Code, Harding, King & Mitchell yang berpendapat bahwa pengetahuan tidak netral namun dipengaruhi oleh kepentingan manusia, sehingga semua pengetahuan mencerminkan kekuatan dan hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penting dari konstruksi pengetahuan akademis transformatif adalah untuk membantu orang memperbaiki masyarakat agar lebih adil dan manusiawi.

Banks (2009, 19-20) mencontohkan bagaimana pengetahuan akademis transformatif dapat menantang pengetahuan sejarah mengenai penemuan Amerika oleh Columbus. Banks menyatakan bahwa Columbus tidak menemukan Amerika, sebab orang-orang Indian telah tinggal di Amerika selama sekitar 40.000 tahun sebelum orang-orang Eropa tiba, sehingga konsep seperti 'Penemuan Eropa Amerika' dan 'Barat perlu dikonseptualisasikan dan dilihat dari perspektif berbagai kelompok budaya dan etnis. Banks menyatakan bahwa sejarah dari Amerika Serikat belum menjadi salah satu kemajuan untuk menuju cita-cita demokrasi. Sebaliknya sejarah bangsa ini telah ditandai oleh siklus demokrasi dan konflik, perjuangan, kekerasan, dan pengucilan, sehingga tantangan utama bagi Amerika sebagai negara demokrasi adalah bagaimana membuat cita-cita demokrasi

menjadi kenyataan bagi semua anggota warganya.

Pendidikan kewarganegaraan yang berakar pada pengetahuan akademis transformatif membantu siswa untuk: 1) memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menentang ketidaksetaraan di dalam komunitas, bangsa, dan dunia, 2) mengambil tindakan untuk menciptakan masyarakat multikultural yang demokratis dan adil, 3) berkembang dalam pengambilan keputusan dan keterampilan aksi sosial yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi permasalahan di masyarakat, 4) mengembangkan nilai-nilai dan perspektif kosmopolitan, 5) mengambil tindakan dalam upaya mewujudkan keadilan, 6) mendorong keterampilan berpikir kritis (Bank, 2009: 21; Murdiono, 2014: 352).

Banks (2017: 372-374) mengidentifikasi beberapa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan transformatif yang dapat diterapkan antara lain: pembelajaran berbasis masyarakat multikultural, pembelajaran melalui musyawarah, pembelajaran berbasis pengalaman, pedagogi responsif kultural dan berkelanjutan melalui pembelajaran tanggap budaya, serta program aksi sipil. Pembelajaran berbasis masyarakat multikultural, musyawarah, dan berbasis pengalaman terbukti mampu meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan peserta didik, koneksi sosial, partisipasi politik, serta memperdalam pemahaman demokrasi di sekolah dan masyarakat. Pembelajaran tanggap budaya mempromosikan inklusi struktural dan sebagai bentuk pengakuan dan persamaan kewarganegaraan peserta didik. Pembelajaran tanggap budaya membutuhkan isi dan pedagogi pembelajaran yang mencerminkan keragaman budaya peserta didik.

Program aksi sipil dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis penelitian, pembelajaran berbasis pelayanan, dan proyek aksi masyarakat yang melibatkan organisasi-organisasi berbasis masyarakat. Program aksi sipil melibatkan partisipasi peserta didik untuk menyelidiki masalah penting yang terjadi di masyarakat dan mengambil tindakan untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan.

Beragam pembelajaran transformatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan baik dari Mezirow, Taylor & Laros, dan Banks hanya dapat diimplementasikan dalam suasana atau iklim kegiatan belajar mengajar yang demokratis baik di dalam kelas (Dewey, 1959) maupun di luar kelas (Loewen, 1999). Banks (2009: 21) menyatakan bahwa untuk membelajarkan pendidikan kewarganegaraan transformatif, siswa harus mengalami suasana sekolah yang demokratis, ruang kelas yang demokratis, dan tempat-tempat publik yang dapat dijadikan situs untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi. Suasana pembelajaran yang demikian akan mendorong persamaan dan pengakuan peserta didik dari berbagai kelompok sehingga membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan dalam upaya menyelesaikan segala persoalan komunitas, negara, dan dunia secara damai dan dialogis.

KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan mengemban tugas penting dalam pembudayaan nilai-nilai perdamaian untuk mewujudkan warga negara yang baik. Ada beberapa nilai inti yang dibutuhkan untuk hidup bersama secara damai yakni nilai inti perdamaian, hak asasi manusia, demokrasi, dan

pembangunan berkelanjutan. Setiap nilai inti memiliki indikator nilai-nilai yang saling mendukung dan berkaitan untuk membentuk perdamaian. Rekulturasasi atas nilai-nilai ini menjadi penting dilakukan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan transformatif.

Dari hasil kajian pemikiran para ahli pembelajaran transformatif, strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan transformatif dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis disorientasi dilema, refleksi kritis, wacana dialektis, pembelajaran berbasis pengalaman, dialog atau pembelajaran melalui musyawarah, pembelajaran afektif dan relasional, pembelajaran berbasis konteks, membangun hubungan otentik antara peserta didik dan pendidik dengan mendorong peserta didik untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi informasi secara terbuka, pembelajaran berbasis masyarakat multikultural, pedagogi responsif kultural dan berkelanjutan melalui pembelajaran tanggap budaya, serta program aksi sipil. Beragam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan transformatif tersebut hanya dapat diterapkan dalam suasana atau iklim kegiatan belajar mengajar yang demokratis baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Oleh karena itu penting bagi guru dan institusi pendidikan (baik sekolah dan pemerintah) untuk bersama-sama secara kolaboratif membangun dan menciptakan suasana atau iklim demokratis dalam lingkup pendidikan dan pembelajaran. Guru dan institusi pendidikan hendaknya memiliki konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan transformatif sebagai salah satu upaya rekulturasasi nilai-nilai perdamaian kepada peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Angulo, K. M., Groves, T., Barone, C. C. M., Laina. Y.H. 2016. *Civic education and visions of war and peace in the Spanish transition to democracy*. Paedagogica Historica, 52(1-2), 169-187.
- Bank, J.A. 2008. *Diversity, group identity, and citizenship education in a global age*, Educational researcher, 37(3), 129–139.
- . September 2009. *Knowledge construction and the education of citizens in diverse societies*, A paper presented in The Conference Interkulturell Pedagogik, at the Gothenburg, Sweden.
- . 2017. *Failed citizenship and transformative civic education*, Educational Researcher, 46: 7, 366–377.
- Castro, L. N., Jasmin N. G. 2010. *Peace education: A pathway to a culture of peace*, Miriam College, Quezon City.
- Dewey, J. 1959. *Experience and education*, Macmillan, New York.
- Fischer, R., Hanke, K. (2009) *Are societal values linked to global peace and conflict?*, Journal of Peace Psychology, 15(3), 227-248.
- Galtung, J. 1996. *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*, International

- Peace Research Institute, Oslo.
- . 2000. *Conflict transformation by peaceful means (the transcend method)*, United Nations.
- Henderson, G.M. 2002. *Transformative learning as a condition for transformational change in organizations*, Human Resource Development Review, 1(2).
- Howie, P. & Bagnall, R. 2013. *A beautiful metaphor: Transformative learning theory*, International Journal of Lifelong Education, 32(6), 816-836.
- Jones, P. Transformative learning theory: Addressing new challenges in social work education. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication> pada 5 September 2017.
- KPAI: Kasus bullying di sekolah meningkat selama 2015, 30 Desember 2015, Republika, halaman 7.
- Loewen, J. W. 1999. *Lies across America: What our historic sites get wrong*, The New Press, New York.
- Mezirow, J. 2012. *Learning to think like an adult: Core concepts of transformation theory*. In Taylor, E. & Cranton, P. (Eds). *The handbook of transformative learning: Theory, research and practise*. Jossey-Bass, San Francisco.
- Murdiono, M. 2014. *Pendidikan kewarganegaraan untuk membangun wawasan global warga negara muda*, Cakrawala Pendidikan, 3, 349-357.
- Setara Institute. 2016. Laporan Survei Status Toleransi Siswa SMA di Jakarta dan Bandung Raya. Diakses dari <http://setara-institute.org/laporan-survei-status-toleransi-siswa-sma-di-jakarta-dan-bandung-raya/>, pada 5 September 2017.
- Shan, H. & Butterwick, S. 2016. *Transformative learning of mentors from an immigrant workplace connections program*, Routledge, New York.
- Taylor, E. W. & Laros, A. 2014. *Researching the practice of fostering transformative learning: Lessons learned from the study of andragogy*, Journal of Transformative Education, 12(2), 134-147.
- Thoha, M. C. 1990. *Kapita selekta pendidikan islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Turay, T. M. & English, L.M. (2008). *Toward a global culture of peace: A transformative model of peace education*, Journal of Transformative Education, 6(4), 286-301.

United Nations Children's Fund & United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. 2008. *Learning to live together an intercultural and interfaith programme for ethics education*, ATAR Roto Presse SA, Geneva.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. 1998. *Learning to live together in peace and harmony*, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, Bangkok.

———. . 2005. *Peace education framework for teacher education*, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, New Delhi.

———. . 2015. Education for peace: Planning for curriculum reform. Diakses dari <http://unesdoc.unesco.org> , pada 5 September 2017.

Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). *What kind of citizen? The politics of educating for democracy*, American Educational Research Journal, 41, 237–269.

PERAN INTERNET DALAM MEWUJUDKAN *DIGITAL CITIZENSHIP* (STUDI DI KAMPUNG *CYBER* KOTA YOGYAKARTA)

Darto Wahidin
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
E-mail: dartowahidin2@gmail.com

Abstrak. Modernisasi telah membawa segala aktivitas manusia yang ada saat ini selalu digerakkan melalui serangkaian teknologi digital. Sehingga seorang individu seolah belum layak dikatakan sebagai manusia modern jika tidak bersentuhan dengan teknologi. Era modern yang ada sekarang ini selalu diidentikkan dengan era kewarganegaraan digital. Keberadaan teknologi tersebut bukan hanya telah menimbulkan dampak positif, tetapi juga mengakibatkan dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan ini bisa disaksikan melalui berbagai media massa dan elektronik, yakni terjadinya pelecehan terhadap kepala negara maupun pejabat lainnya. Proses informasi yang cepat berkembang dan mudah disaksikan tersebut dengan menggunakan internet. Maka dalam hal ini pentingnya penggunaan internet bagi semua kalangan. Tujuan dalam penelitian yang dilakukan di kampung *cyber* Kota Yogyakarta ini untuk mengetahui peran internet dalam mewujudkan *digital citizenship* studi di kampung *cyber* Kota Yogyakarta. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori dari Talcott Parsons. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Strategi dalam penelitian ini yang digunakan studi kasus, yang di dalamnya seorang peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran internet dalam mewujudkan *digital citizenship* di kampung *cyber* Kota Yogyakarta dapat merubah *mindset*, menimbulkan perubahan perilaku warga, menimbulkan perubahan sosial pada warga, mendapatkan informasi, dan untuk pengembangan unit usaha ekonomi. Saran dalam penelitian ini agar ada perhatian dari pihak pemerintah khususnya dari Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kebetulan kampungnya dekat dengan Keraton Yogyakarta, dan Pemerintah pusat khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kata kunci: *internet, citizenship, cyber*

PENDAHULUAN

Modernisasi telah membawa segala aktivitas manusia yang ada saat ini selalu digerakkan melalui serangkaian teknologi *digital*. Sehingga seorang individu seolah belum layak dikatakan sebagai manusia modern jika tidak bersentuhan dengan teknologi. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk proses mempermudah pekerjaan manusia dan untuk memenuhi segala

kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Sebagaimana yang dijanjikan dari teknologi diantaranya: (1) teknologi menjanjikan perubahan; (2) teknologi menjanjikan kemajuan; (3) teknologi menjanjikan kemudahan; (4) teknologi menjanjikan peningkatan produktivitas, dan (5) teknologi menjanjikan ketepatan serta kecepatan (Martono, 2014:217-220).

Era modern yang ada sekarang ini selalu diidentikkan dengan era kewarganegaraan *digital*. Keberadaan teknologi tersebut bukan hanya telah menimbulkan dampak positif, tetapi juga mengakibatkan dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan ini bisa disaksikan melalui berbagai media massa dan elektronik, yakni terjadinya pelecehan terhadap kepala negara maupun pejabat lainnya. Pelecehan terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan berita *hoax* mengenai keturunan komunis maupun wajah seorang Presiden disamakan dengan babi. Pelecehan yang ditunjukkan kepada kepala negara tersebut, sesungguhnya tidaklah *etis* bahkan tidak sopan. Seperti diketahui khalayak bahwa kepala negara merupakan simbol dari negara itu sendiri, artinya jika kepala negara telah dilecehkan sama saja melecehkan negara ini.

Proses informasi yang cepat berkembang dan mudah disaksikan tersebut dengan menggunakan internet. Internet seolah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk era saat ini. Kebutuhan terhadap akses informasi tersebut, sesungguhnya telah menjadikan manusia haus akan proses informasi. Sehingga diperlukan suatu proses pembelajaran yang baik terhadap akses internet tersebut oleh warga negara. Maka dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran yang sangat penting, mengingat untuk mewujudkan *digital citizenship* di Indonesia dibutuhkan proses yang panjang.

Kebanyakan dari proses perubahan teknologi dan informasi didasarkan kepada produksi informasi yang berkembang sangat cepat tanpa batas. Sehingga memunculkan isu-isu sosial lebih cepat berkembang apabila

dalam media *online* yang menggunakan internet dimana proses mendapatkan informasi sekarang begitu mudah bisa melalui gadget, laptop dan lain-lain. Sehingga penggunaan internet pada semua warga negara di Indonesia perlu menjadi perhatian serius oleh semuanya untuk mencegah penyalahgunaan internet tersebut.

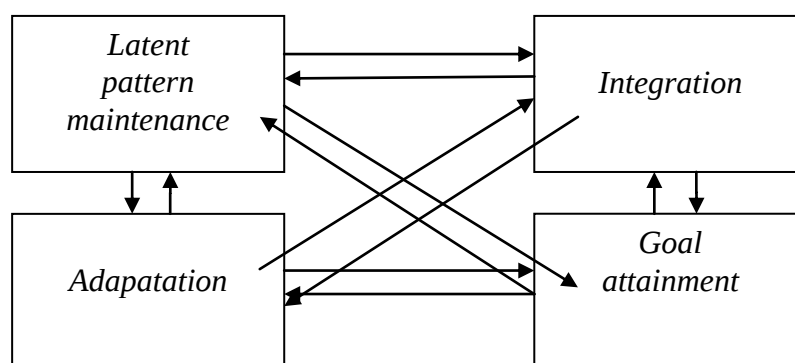
Warga negara *digital* yang cerdas dan baik, merupakan konsep yang ideal sebagai seorang warga negara hidup di era *digital*. Warga negara *digital* yang cerdas dan baik tercermin melalui perilaku cerdas dan baik ketika beraktifitas dengan menggunakan internet. Perilaku warga negara *digital* yang cerdas dan baik menjadi kunci utama agar seorang warga negara dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan *digital*. Ketika warga negara *digital* tidak cerdas dan tidak baik dalam beraktifitas maka akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Maka dalam hal ini pentingnya penggunaan internet bagi semua kalangan. Sehingga peran internet tersebut harus dapat mempunyai dampak positif bagi negara dan bangsa ini, agar terwujudnya *digital citizenship*. Berdasarkan permasalahan dan pentingnya penggunaan internet di atas, sesungguhnya ada pertanyaan menarik yakni bagaimana peran internet dalam mewujudkan *digital citizenship* di kampung *cyber* Kota Yogyakarta?. Dari rumusan masalah tersebut penulisan makalah yang berasal dari hasil penelitian ini mempunyai tujuan yakni untuk mengetahui peran internet dalam mewujudkan *digital citizenship* studi di kampung *cyber* Kota Yogyakarta.

Penulisan makalah ini dianalisis dengan menggunakan teori Talcott Parsons. Parsons yang merupakan salah satu pengikut aliran struktural fungsional. Menurut Parsons (Parsons,

1951; Cuff, et. al., 1990; Johnson, 1994; Poloma, 2007; Martono, 2014), agar sistem sosial dapat bekerja dengan baik, setidaknya harus ada empat fungsi yang harus terintegrasi. Keempat fungsi tersebut sangat mutlak dibutuhkan bagi semua sistem sosial, yaitu adaptasi atau *adaptation* (A), pencapaian tujuan atau *goal attainment* (G), integrasi atau

integration (I), dan pemeliharaan pola-pola laten atau *latent pattern maintenance* (L). Keempat fungsi tersebut sering disebut AGIL. Dalam sebuah sistem diwajibkan untuk dimiliki agar tetap bertahan (*survive*). Hubungan keempat fungsi tersebut menurut Parsons dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1
Hubungan sistem keempat fungsi dalam sistem sosial

Keempat fungsi tersebut menurut Parsons merupakan fungsi imperatif atau persyarat berlangsungnya sistem sosial. Ada fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap sistem yang hidup. Dua pokok penting yang termasuk ke dalam kebutuhan fungsional ini yaitu: (1) yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya; (2) yang berhubungan dengan sistem sasaran atau tujuan serta sarana yang perlu untuk mencapai tujuan tersebut (Parsons, 1951; Cuff, et. al., 1990; Johnson 1994; Poloma, 2007; Martono, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2013:4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Creswell, 2013:20). Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk deskriptif yang merupakan pencarian fakta dengan menggunakan interpretasi yang tepat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang dijadikan untuk penelitian ini di RT 36 / RW 09 Taman Kelurahan Patehan

Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta.



Gambar 1

Mural dalam tulisan *monggo pinarak ing kampoeng cyber*

Alasan pemilihan di RT 36 / RW 09 Taman Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta karena dikenal sebagai kampung cyber dan pernah mendapat kunjungan diantaranya dari pemilik Facebook Mark Zuckerberg bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sering berkunjung di kampung cyber. Kampung cyber sangat strategis karena berada di kawasan Keraton Yogyakarta. Adapun informan dalam penelitian ini penggagas kampung cyber dan warga di RT 36 / RW 09 Taman Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta. Informan dalam penelitian ini penggagas kampung cyber yaitu Antonius Sasongko dan Heri Sutanto serta masyarakat kampung cyber. Penentuan informan penelitian dilakukan secara *purposive sampling* yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini juga dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai subjek penelitian dalam melakukan aktivitas yang dilakukan. Dalam teknik pengumpulan data wawancara digunakan untuk menggali data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian mengenai peran internet dalam mewujudkan *digital citizenship*. Wawancara dilakukan secara *directive* dalam artian peneliti berusaha mengarahkan pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang akan dipecahkan. Sedangkan dokumentasi diperlukan sebagai upaya untuk menunjang data-data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Setelah dilakukan teknik pengumpulan data maka dilakukan teknik analisis data dengan memilih

data secara selektif serta disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini diperlukan langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi. Reduksi data dalam penelitian ini diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dipilih data yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting sehingga data menjadi jelas dan sistematis. Setelah dilakukan reduksi, maka data tersebut disajikan dalam bentuk naratif yang mendeskripsikan mengenai subjek penelitian dalam mewujudkan *digital citizenship* dan dihubungkan dengan teori AGIL dari Talcott Parsons. Kemudian setelah data disajikan dilakukan penarikan simpulan, simpulan harus dapat menghubungkan data dengan teori AGIL dari Talcott Parsons. Agar simpulan penelitian yang disajikan dalam makalah menjadi lebih bisa dipercaya maka dilakukan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran internet dalam mewujudkan *digital citizenship*, ditemukan beberapa temuan yakni terjadinya perubahan *mindset*, menimbulkan perubahan perilaku warga, menimbulkan perubahan sosial warga, mendapatkan informasi, dan untuk pengembangan unit usaha ekonomi. Kelima temuan itu akan dijelaskan secara dirinci dengan hasil beserta pembahasannya dan juga dielaborasi dengan teori Talcott Parsons. Sebagian data percakapan yang ditunjukkan telah diolah, dengan tujuan untuk mempermudah pembaca. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

Merubah *Mindset*

Sejak digagasnya internet di kampung *cyber* oleh Antonius Sasongko alias Koko dan Heri Sutanto pada tahun 2008. Terjadi banyak perubahan pada warga di RT 36 / RW 09 Taman Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta. Tak terkecuali terjadi perubahan pola pikir (*mindset*). Pola pikir sangat erat terkait dengan individu itu sendiri, sehingga dalam merubahnya dibutuhkan waktu yang tidak mudah. Internet harus dapat *adaptation* atau adaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang begitu kompleks, karena warga yang masih kurang memahami dalam penggunaan internet itu sendiri. Sehingga penggunaan internet dalam hal ini harus menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhan warga sekitar. Bisa dikatakan bahwa ini berkaitan dengan organisme atau sistem organis tingkah laku.

Kampung *cyber* yang dekat dengan Keraton Yogyakarta, tentunya pola pikir warganya pun masih sangat era kaitannya dengan *cultural* Keraton tersebut. Adanya internet di kampung *cyber*, dimana wilayah tersebut sangat dekat dengan Keraton menyebabkan *cultural* yang berasal dari Keraton mengalami kontak dengan budaya modern. Dalam hal ini *latent pattern maintenance* sebagaimana yang diungkapkan oleh Parsons, seharusnya sistem harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan *cultural*. Sebagaimana yang dikutip (Parsons, 1951; Cuff, et. al., 1990; Poloma, 2007; Martono, 2014), bahwa fungsi ini merupakan fungsi *cultural* (budaya).

Menimbulkan Perubahan Perilaku Warga

Adanya akses internet yang mudah di kampung *cyber*, menimbulkan berbagai macam perubahan. Salah satunya perubahan perilaku warga itu sendiri. Berdasarkan pengamatan penulis di kampung *cyber*, adanya rasa kebanggaan bahwa kampungnya dimudahkan oleh fasilitas internet. Fasilitas internet tersebut dalam sebulan hanya membayar Rp 45.000-/ rumah, harga yang murah dengan menikmati akses internet yang bagus dan lancar. Perubahan perilaku ini lebih disebabkan oleh kesadaran akan adanya keinginan untuk maju sebagai sebuah kampung kecil yang mendunia di era digital ini.

Jika merujuk pada teori Parsons, diantara warga yang ada di kampung *cyber* tersebut bahwa keberadaan internet di kampung *cyber* dapat memperkuat proses *integration* atau integrasi (I), dalam hal ini sebuah sistem tersebut harus mampu untuk mengatur dan menjaga hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Bahkan juga aktivitas warga di kampung *cyber* dapat disatukan melalui internet tersebut. Namun, internet juga dapat merusak *latent pattern maintenance* atau pola-pola pemeliharaan (L) sistem dalam sebuah kampung *cyber* itu sendiri. Keberadaan internet di rumah berdasarkan pengamatan yang terjadi dapat mengubah dan merusak perilaku anggota keluarga dengan berbagai tatanan nilai-nilai baru melalui internet ini.

Menimbulkan Perubahan Sosial pada Warga

Internet yang ada saat ini sesungguhnya telah membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yang memudahkan proses interaksi terhadap sesama manusia. Adanya

internet tersebut tentunya telah menimbulkan perubahan sosial, bukan hanya pada individu melainkan juga pada warga yang ada di kampung *cyber*. Melihat proses perubahan sosial tersebut tentunya harus secara jernih dari *past, present and future*. Maka secara singkat berdasarkan penuturan yang disampaikan bahwa sebelum tahun 2008 dan sesudah tahun 2008, terjadinya perubahan sosial yang sangat drastis. Sebagaimana yang dituturkan oleh Heri Sutanto berikut ini: “...internet yang ada disini memudahkan interaksi sesama warga, untuk komunikasi dengan saudara, kerabat, maupun keluarga yang jauh. Sehingga timbul proses sosial antar warganya jadi mudah dan lancar...” (Data Primer: 3 November 2017).

Dalam penuturan tersebut terlihat bahwa internet telah mempermudah proses interaksi sesama warga di kampung *cyber*. Interaksi sebagaimana yang dijadikan indikator dalam penuturan tersebut. Sehingga setiap sistem harus dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi ini akan memunculkan kesepakatan atau konsensus. Konsensus inilah yang menjadi kunci stabilitas sebuah sistem dan ketika antar sistem tidak mampu menghasilkan sebuah konsensus, maka yang terjadi adalah konflik yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Ketika sub sistem internet masuk dalam sebuah sistem, maka setiap komponen yang ada dalam sistem tersebut harus melakukan berbagai penyesuaian. Proses ini terjadi dalam setiap sistem apapun. Internet dapat mempengaruhi tujuan sistem, internet dapat mempengaruhi pola-pola pemeliharaan sistem, dan internet dapat mempengaruhi proses adaptasi sistem.

Mendapatkan Informasi

Informasi di era globalisasi ini begitu sangat deras bahkan tanpa batas. Kemudahan mendapatkan informasi yang dengan mudahnya diakses melalui internet, membikin dunia ini tidak mempunyai batasnya. Sehingga informasi tersebut harus diimbangi dengan pengawasan dari semua kalangan. Kemudahan mendapatkan informasi di Kampung *cyber* bukan hanya dirasakan oleh orang tua maupun remaja saja, melainkan juga dirasakan oleh anak-anak. Adanya perubahan dalam kurikulum di negeri ini, yang menjadikan siswa sebagai *student center* dan guru sebagai *fasilitator*. Sehingga mengharuskan anak-anak sekolah mencari informasi dari berbagai sumber, termasuk dari internet. Anak-anak di kampung *cyber* menjadikan internet sebagai sumber untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Heri Sutanto sebagai berikut: “...anak-anak disini lebih mudah mendapatkan informasi untuk mengerjakan tugas sekolahnya, tentu dalam mencari informasi diinternet tersebut harus dengan pengawasan dari orang tua juga agar tidak salah dalam menggunakan internet...” (Data Primer: 3 November 2017).

Dari penuturan tersebut sesungguhnya anak-anak dimudahkan dalam mendapatkan informasi untuk tugas-tugas sekolahnya melalui internet. Namun, akses kemudahan melalui internet tersebut yang dilakukan oleh anak-anak tentunya harus dengan pengawasan dari orang tua. Disisi lain pola pengawasan ini dianggap baik, namun orang tua tidak selamanya mengawasi anak-anaknya dalam mengakses internet tersebut selama 24 jam *full*. Maka dalam konteks ini diperlukan pembatasan jam terhadap akses internet tersebut. Mengingat

bahwa anak-anak juga butuh proses bermain secara langsung bukan bermain melalui teknologi yang menggunakan internet.

Sehingga dalam teori Parsons mengenai *goal attainment* bahwa sistem harus memiliki, mendefinisikan, dan mencapai tujuan utamanya. Tujuan adanya internet di kampung *cyber* tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh warga tersebut yakni untuk mendapatkan informasi yang baik. Kemudahan informasi tersebut juga bukan bagi kalangan orang tua, namun juga kalangan anak-anak. Anak-anak menggunakan internet untuk mendapat informasi terkait tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Penggunaan internet tersebut tentunya harus dengan pengawasan orang tua, dalam hal ini keluarga mempunyai peran besar untuk mewujudkan tujuan tersebut, tentunya dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan setiap keluarga memiliki cara yang sangat berbeda.

Untuk Pengembangan Unit Usaha Ekonomi

Dunia saat ini telah mengalami proses perubahan dalam bidang ekonomi, terjadinya perubahan tersebut disebabkan oleh era digital yang berkembang pesat. Warga dunia saat ini disuguhkan dengan pergantian pembangunan ekonomi dari industrialisasi ke ekonomi kreatif. Sesungguhnya ekonomi kreatif membutuhkan kreativitas dari semua kalangan pelaku ekonomi. Tentunya dengan adanya ekonomi kreatif, siap tidak siap Indonesia harus mengikutinya. Apalagi dengan penduduk usia produktif yang besar, dapat menjadikan Indonesia sebagai produsen jika bisa memanfaatkannya, manakala tidak bisa memanfaatkannya dengan baik maka Indonesia hanya sebagai konsumen semata. Proses itu

yang dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan oleh warga di kampung cyber. Dengan adanya internet, maka dapat dilakukan pengembangan unit usaha ekonomi yang lebih luas oleh warga kampung cyber, untuk memasarkannya melalui internet. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Heri Sutanto, berikut ini: “...dengan adanya kemudahan akses internet disini, kami warga kampung cyber ini mudah dalam memasarkan hasil-hasil kerajinan dan produk-produk unggulan warga, dengan cara online jika dijual...” (Data Primer: 3 November 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut, sesungguhnya internet dimanfaatkan oleh warga kampung cyber untuk memasarkan hasil kerajinan dan produk unggulan yang dihasilkan oleh warga tersebut. Dalam konteks ini terjadi

pergeseran (*shifting*), jika dulu dalam memasarkan hasil kerajinan dan produknya secara langsung (*face to face*), namun dengan adanya internet warga tidak perlu bertatapans langsung melainkan cukup dijual secara *online* melalui kemudahan internet yang ada. Proses pengeseran (*shifting*) dalam penjualan tersebut, tentunya harus dibarengi dengan kepercayaan (*trust*) antara penjual dan pembeli. Jika tidak adanya kepercayaan (*trust*) antara penjual dan pembeli tersebut, maka bisa mengarah pada kejahatan kriminal. Dan juga masalah kualitas barang yang diperjual belikan tersebut, karena dalam membeli barang itu pembeli hanya melihat gambar tanpa melihat langsung. sehingga dalam hal ini bukan hanya kepercayaan (*trust*) melainkan juga harus adanya kejujuran (*honesty*).



Gambar 2
Unit usaha ekonomi

Secara teoritik sebagaimana yang telah ada dalam teorinya Parsons, bahwa adanya *goal attainment* merupakan sebuah keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Mengingat yang dijanjikan melalui internet telah memudahkan akses dalam memasarkan hasil kerajinan dan produk unggulan warga di kampung *cyber*. Dengan adanya kemudahan dalam proses pengembangan unit usaha ekonomi ini setidaknya telah memajukan dari sektor ekonomi mikro. Terlebih lagi dapat memajukan ekonomi kreatif warganya, yang dalam hal ini adanya kemandirian dari warga itu sendiri.

Internet yang ada di kampung *cyber* sesungguhnya bisa untuk mewujudkan *digital citizenship*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa pola penggunaan internet tersebut telah diarahkan ke hal yang positif seperti untuk mendapatkan informasi dan pengembangan unit usaha ekonomi. Namun, dibalik itu semua ternyata telah merubah pola pikir (*mindset*) dari warga kampung *cyber* itu sendiri. Bahkan hal ini menimbulkan perubahan perilaku warganya sehingga mengarah para perubahan sosial pada warga itu sendiri. Adanya internet di kampung *cyber* ini, sesungguhnya dalam rangka mendukung program dan kebijakan negara. Kesadaran dalam kehidupan bernegara telah mengarahkan sebuah warga di kampung yang kecil ke dalam kehidupan global.

KESIMPULAN

Dari berbagai hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik benang merahnya untuk dijadikan kesimpulan dalam penulisan makalah ini. Bahwa peran internet dalam mewujudkan *digital citizenship* di Kampung *Cyber* Kota Yogyakarta ini telah merubah *mindset* warga RT 36 / RW 09 Taman Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton

Kota Yogyakarta. Dari *mindset* tersebut sehingga menimbulkan perubahan perilaku warga sekitarnya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Yang menimbulkan perubahan sosial juga pada warga di kampung *cyber* tersebut. Namun, adanya internet tersebut telah memudahkan warga untuk mendapatkan informasi. Yang tak kalah pentingnya peran internet sangat penting karena untuk pengembangan unit usaha ekonomi yang ada di kampung tersebut.

Dengan adanya internet di kampung *cyber* dalam rangka untuk mewujudkan *digital citizenship*. Proses ini disadarkan oleh warga di kampung *cyber* tersebut, bahwa internet yang ada harus dapat mendukung pada kebijakan dan program dari negara, yang akan mengantarkan negara ini ke dalam era *digital*. Saran dalam penelitian ini agar ada perhatian lebih dari pihak pemerintah khususnya dari Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kebetulan kampungnya dekat dengan Keraton Yogyakarta, dan Pemerintah pusat khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan makalah ini tentunya banyak pihak yang telah terlibat, terutama dalam proses pengambilan data di lapangan. Sehingga dalam kesempatan ini izinkanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya pada Antonius Sasongko alias Koko dan Heri Sutanto, serta seluruh warga RT 36 / RW 09 Taman Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta. Kesempatan yang diberikan tersebut sangat bermanfaat bagi saya untuk menyelesaikan penulisan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, & Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Cuff, E. C., et. al. 1990. *Perspectives in Sociology*, Routledge, New York.
- Johnson, D. P. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Martono, Nanang. 2014. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Parsons, Talcott. 1951. *The Social System*, Free Press, New York.
- Poloma, Margaret. 2007. *Sosiologi Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, New York.

STRATEGI PENANGANAN SISWA KORBAN *BULLIYING* DI *HOMESCHOOLING* KAK SETO SOLO

Laili Mufatakhah

PPKN Pasca sarjana UNS, Surakarta
E-mail: lailimufatakhah@gmail.com

Abstrak. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, dan sikap. pendidikan adalah tempat yang nyaman bagi setiap individu untuk belajar. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa 84 % di sekolah masih sering terjadi perilaku *bullying*. Dampaknya adalah bagi siswa yang menjadi korban *bullying* mengalami rasa cemas, takut, kecewa, sedih, tertekan, malu, rasa tidak nyaman, kurang percaya diri, lemah mental bahkan trauma yang mendalam sehingga berdampak pada proses belajar di sekolah. Penerapan *homeschooling* sebagai lembaga pendidikan informal memberikan kualitas proses belajar yang fun, nyaman dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan menjadi pilihan banyak siswa korban *bullying* di sekolah formal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penanganan siswa korban *bullying* yang dilakukan oleh *homeschooling* kak seto solo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pengambilan data observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di *homeschooling* kak seto solo dan wawancara dilakukan kepada tutor, konselor dan siswa korban *bullying* di *homeschooling* kak seto solo. Hasilnya bahwa siswa yang mengalami korban *bullying* merasa nyaman, senang, dan semangat belajar yang tinggi setelah sekolah di *homeschooling* kak seto solo.

Kata kunci: pendidikan, *homeschooling* kak seto solo, *bullying*

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Pendidikan juga dipandang sebagai sarana untuk melahirkan insan-insan yang cerdas, terampil, kreatif, bertanggung jawab, produktif, dan berbudi pekerti luhur. Hal ini sebagaimana pengertian pendidikan yang ada didalam UU RI nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 1:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bermasyarakat, bangsa, dan negara.

Hal tersebut selaras dengan pengertian pendidikan yang disampaikan oleh Dictionary of Psychology dalam Faturrahman., dkk (2012: 3) ialah suatu tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan (seperti sekolah dan madrasah) yang dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya.

Di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 ada beberapa macam pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, bertingkat/berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk kedalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan professional, yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa. Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, di luar sistem persekolahan dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.

Sekolah merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk melakukan proses pemerolehan pengetahuan, pengembangan keterampilan dan pematangan sosial melalui kegiatan pembelajaran. Di sekolah terjadi interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru dan seluruh warga sekolah lainnya yang dapat mengembangkan rasa sosialnya.

Berdasarkan fakta, kasus *bullying* di sekolah menjadi isu penting di Indonesia. Pada tahun 2015, LSM Plan International and international center for research on women (IRCW) melakukan

riset terkait *bullying*. Hasilnya 84 % anak Indonesia mengalami *bullying* di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di ASIA. Riset ini dilakukan di beberapa negara ASIA, mencakup Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan dan Indonesia.

Perundungan (*Bullying*) merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan orang lain yang lebih lemah dimana tujuannya adalah untuk menyakiti (Coloroso, 2006).

Di luar negeri, *school bullying* sering disebut sebagai *peer victimization* (Elsenberg & Aalsma, 2005; disitasi (Siswati & Widiyanti, 2009) karena peristiwa ini bisa terjadi di antara siswa/siswi seangkatan. Penelitian Olweus (dalam Roland, 2006) menunjukkan karakteristik pelaku secara umum adalah pelaku sering melakukan tindak kekerasan dibanding siswa lain. Mereka memiliki sifat yang selalu ingin mendominasi siswa lain. Sedangkan pada korban akan muncul perasaan rendah diri. Korban perundungan (*bullying*) memiliki perasaan lebih cemas dan tidak aman dibandingkan siswa lain, mereka sering bersikap hati-hati, peka dan diam. Korban memiliki pandangan negatif terhadap diri sendiri dan situasi yang dihadapi. Mereka sering menyalahkan diri sendiri tentang kegagalan yang dialami.

Argiati (2010) mengatakan bahwa seseorang yang mengalami korban perundungan (*bullying*) biasanya merasa cemas, takut, kecewa, sedih, tertekan, malu, rasa tidak nyaman, dan kurang percaya diri sehingga berdampak pada proses belajar di sekolah.

Kondisi sekolah seperti tersebut diatas, menyebabkan beberapa orang tua memilih mendidik anak-anaknya di rumah (*homeschooling*), dengan resiko menyediakan banyak waktu dan tenaga. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa 70% siswa yang belajar di *homeschooling* kak seto solo adalah korban *bullying* dari sekolah formal sebelumnya. Maka dari itu *Homeschooling* menjadi tempat harapan orang tua untuk meningkatkan mutu pendidikan anak - anak, mengembangkan nilai - nilai iman/agama dan moral serta mendapatkan suasana belajar yang menyenangkan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penanganan siswa korban *bullying* yang dilakukan oleh *homeschooling* kak seto solo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di *Homeschooling* kak seto solo. Pengambilan data menggunakan wawancara dan observasi. Informan meliputi: konselor, tutor (guru), *homeschooler* (siswa). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Persepsi guru/tutor terhadap *bullying*

Berdasarkan hasil wawancara dengan tutor mata pelajaran sejarah ST terkait dengan perilaku *bullying* tutor menganggap bahwa perilaku *bullying* itu berbahaya karena bisa menyebabkan pada kematian siswa, baik fisik maupun mental:

“*bullying* itu berbahaya, sesuatu yang kelihatannya sederhana yaitu membully tetapi dampaknya bisa pada kematian mental atau kematian fisik,” (ST,Tutor; 16-11-2017)

Tutor ST memiliki persepsi bahwa *bullying* adalah suatu perbuatan yang sangat tidak baik. Menurut tutor ST siswa-siswa yang menjadi korban *bullying* dikelasnya selalu memiliki masalah dalam hal komunikasi dan bersosialisasi dengan teman. Hal tersebut karena ada murid di kelasnya (murid tersebut adalah korban *bullying* seorang siswa perempuan) yang ketika bertemu teman cowok di kelasnya dia langsung menutup diri dan langsung mengalihkan muka untuk tidak menatapnya, bahkan dengan tutor laki laki pun juga sama. Walaupun siswa masih dalam masa perkembangan psikologis, perilaku *bullying* sangat tidak dibenarkan. Jadi perilaku *bullying* itu merupakan kenakalan remaja yang tidak bisa dimaklumi dan dibiarkan begitu saja.

Berdasarkan wawancara dengan tutor ST, OM, dan U mengenai *bullying* dapat disimpulkan bahwa perilaku *bullying* merupakan perilaku yang tidak wajar dan tidak baik. Hal ini disebabkan pada kebanyakan siswa yang menjadi korban *bullying* selalu mengalami akibat negatif terutama pada mentalnya. Oleh karena itu guru atau tutor memiliki peran yang sangat penting untuk mengontrol perilaku siswa saat di kelas maupun di lingkungan sekolah agar perilaku *bullying* tidak terjadi.

Kondisi korban *bullying* yang pindah ke *homeschooling* kak seto solo

Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor OM dinyatakan bahwa kondisi siswa *homeschooling* kak seto solo (HSKS solo) yang menjadi korban

bullying pada awalnya adalah menutup diri, trauma bahkan ada yang lemah mental.

“ Siswa siswa korban *bullying* yang pindah dari sekolah formal ke HSKS itu kondisi awalnya ada yang menutup diri, ketika mendengar kata *bully* langsung diam dan takut salah satu contohnya isryad kelas 8, dia sampai tidak mau ditanya soal *bully* dan tidak mau membahas. Terus ada siswa yang mentalnya lelah, awalnya di sekolah tidak krasan karena dia introvet, dan sejak kelas 4 sd dia betah tetapi tiba tiba menjadi pendiam. Ketika pulang sekolah kantongnya penuh sampah bahkan sampai kancingnya sobek terus kalau pakai baju dobel-dobel. Setelah itu dia periksa ke psikolog dan setelah pemeriksaan dan konsultasi dikira sudah sembuh tetapi ternyata tidak. Jadi, sekarang kalau mengajar dia seperti ngajar anak PAUD. Tidak hanya itu saja ada siswa kelas 10 johana namanya, dia suka ngomong sendiri dan berkomunikasi seperti sedang ngobrol sama orang lain tapi dia sendirian, terus abil dia siswa DL, pada awalnya di sd dia anak yang baik, terus kelas 4 sd ada bos geng di kelasnya, minta abil nyembunyiin abil sepatu temen sekelas tapi abil tidak mau. Bos geng akhirnya memprovokasi temen yang lain jangan sampai ada yang mau berteman dengan abil dan akhirnya abil tidak punya temen. Terus abil pindah pindah sekolah dan tidak dapet temen yang sesuai yitu dapet temen yang usianya diatasnya tetapi pergaulannya salah seperti ngedrug munum-minuman keras dll. Dia berteman dengan anak yang usianya lebih tua karena dia lebih dihargai daripada berteman dengan teman yang usianya sama dengan dia. “ (OM, konselor; 16-11-2017)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut di ketahui bahwa kondisi anak korban *bullying* ketika pindah ke

HSKS solo pada awalnya memiliki gangguan yaitu menutup diri, trauma, lemah mental, suka berbicara sendiri, suka minum-minuman keras, dan ngedrug. Kondisi korban *bullying* seperti ini merupakan akibat dari perilaku pembulian baik secara verbal maupun non verbal. Faktor lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah menjadi faktor yang berkontribusi cukup signifikan dalam perilaku *bullying* .

Strategi penanganan korban *bullying* di *homeschooling* kak seto solo

Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor OM dan U dinyatakan bahwa untuk menangani strategi *bullying* diperlukan beberapa cara, yaitu

1. Pendekatan dengan siswa
 - Mengadakan seminar baik untuk orang tua, murid maupun tutor sebagai tenaga pendidik, untuk memberikan pengetahuan apa itu *bullying* , macam-macamnya dan bagaimana cara mengatasi agar tidak ada lagi korban *bullying* .
 - Pendekatan kepada korban *bullying* dan pemberian pemahaman secara pelan-pelan bahwa tidak semua teman di lingkungan sekolahnya itu seperti temen-temen di sekolahan dulu.
 - Di HSKS Solo tutor di tuntut untuk lebih dekat dan perhatian kepada murid-muridnya.
 - Prinsip belajar di kelas dibuat lebih Fun, ceria dan mengedepankan kekeluargaan.
 - Pemberian punishment kepada siswa yang nakal di kelas diberi punishment yang lebih melatih rasa tanggung jawab, yaitu siswa yang bersalah langsung dituntun untuk meminta maaf dan berteman kembali. Kemudian

memberikan pengertian dan perhatian bahwa kita semua yang disini adalah sama, yaitu sama - sama mau belajar dan menjadi anak yang pintar dan cerdas.

2. Pendekatan dengan orang tua

- Diadakan kegiatan *circle parenting* selama 3 bulan sekali, *happy sharing* untuk mengetahui kondisi anak di sekolah, klarifikasi kondisi anak, dan kegiatan *insidental* kalau memang diperlukan yaitu diadakannya pertemuan orangtua dengan pihak konselor atau tutor untuk menjelaskan kondisi perkembangan atau pemunduran kondisi siswa saat di sekolah.
- Diadakan *broad casting* per tiga hari sekali kepada masing-masing orang tua. Tujuannya untuk menciptakan kedekatan orang tua dengan anak khususnya anak-anak yang *introvet*. Sebab, kedekatan orang tua dengan anak merupakan salah satu penyebab kenapa *bullying* bisa terjadi. Isi dari *broad casting* lewat sms atau *watsapp* tersebut adalah :
 - 1) Sudahkan anda menanyakan bagaimana kondisi anak hari ini?
 - 2) Sudahkan anda membantu anak mengerjakan tugas?
 - 3) Apakah anda sudah memiliki waktu berkualitas (*quality time*) bersama anak?
- *Home visit*, yaitu kegiatan dimana konselor dan walikelas berkunjung ke rumah siswa yang DL (*Distance Learning*) yaitu siswa yang belajar di rumah sendiri dan tutor yang berkunjung kerumahnya untuk

menyampaikan pelajaran. Tujuan *home visit* adalah untuk mengetahui bagaimana keseharian anak dan untuk mengontrol anak, serta memberikan pemahaman untuk berubah. Selain itu, *home visit* juga dilakukan kepada siswa komunitas yang jarang berangkat sekolah.

- Melakukan *broad casting* (BC) kepada setiap orang tua siswa.

“ Kegiatan *broad casting* (BC) untuk menangani anak yang *introvet*, harapannya dengan ada bc sms ini ortu memiliki komunikasi dengan anak dengan baik, anak tidak lagi hanya diam dan menyimpan sendiri masalahnya tetapi juga mau berbagi dengan orang tuanya. Ortu lebih peka dan *introvet* lebih terbuka dengan ortu....” (OM, Konselor: 17-11-2017).

3. Pendekatan kepada tutor

- Mengadakan acara seminar tentang *bullying*
- Mengadakan pelatihan mengenai cara mengajar siswa dengan baik berdasarkan karakter siswa dan menyenangkan.
- *Meet and greet* antara semua warga belajar di *homeschooling* kak seto solo satu tahun sekali, dimana siswa, tutor, orang tua, dan management dengan didampingi kak seto bersama-sama saling bertemu dan menciptakan kedekatan sebagai satu keluarga, yaitu keluarga *homeschooling* kak seto solo.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, *homeschooling* kak seto solo melakukan berbagai pendekatan untuk menciptakan suasana belajar yang Fun, ceria dan mengedepankan kekeluargaan agar korban *bullying* tidak lagi merasa dikucilkan melainkan dirangkul sebagai sesama warga belajar di *homeschooling* kak seto solo. Pendekatan dilakukan baik kepada siswa, orang tua, maupun kepada tutor sebagai tenaga pendidik yang sangat dekat dengan siswa setiap harinya. pendekatan tersebut termasuk dalam pendekatan langsung maupun tidak langsung. Pendekatan langsung dimana pendekatan langsung dengan siswa melalui kontak langsung maupun melalui strategi konseling yaitu *behavioristik therapy* termasuk didalamnya yaitu *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) dan *Logo therapy*. Pendekatan yang tidak langsung yaitu pendekatan melalui kegiatan seminar, pelatihan dan acara meet and greet.

Kondisi korban *bullying* setelah sekolah di *homeschooling* kak seto solo

Perkembangan siswa korban *bullying* setelah sekolah di *homeschooling* kak seto solo hasil wawancara dengan konselor dan juga tutor U, bahwa:

- 1) Apabila dilihat dari sudut pandang cara sosialisasi korban *bullying*
Perkembangan positif lumayan besar yang dari awal mereka belum bisa beradaptasi dan kesulitan dengan teman sekelas tetapi sudah mau berteman dengan teman-temannya yg lain. Disini di HSKS untuk anak yang korban dll kita tidak mengotak-ngotakkan atau dengan kata lain kita samakan, dan mereka yang normal malah mau merangkul, mau kebersamaan mau mengajak bermain dan peduli. Akhirnya karena perlakuan yang

bersahabat itu mereka korban *bullying* menjadi semakin lebih baik sosialisasinya

- 2) Apabila dilihat dari sudut pandang belajar.

Siswa yang menjadi korban *bullying* tidak mengalami cukup besar hambatan belajar, karena mungkin dahulu dia dulu itu dibuliy temannya dengan diejek akhirnya mereka merasa takut dan akhirnya berdampak lurus dengan perkembangan belajarnya. Kadang pelaku bully itu bukan saja temannya tetapi gurunya. Akhirnya dia paranoid dengan guru. Tetapi dengan kondisi tutor di HSKS berbeda dengan guru di formal maka mereka semakin lama semakin menunjukkan peningkatan lebih positif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa didapatkan data, bahwa siswa korban bullying semakin lama semakin menunjukkan perkembangan yang semakin positif baik dari segi cara bersosialisasi maupun dari segi belajar. Siswa korban *bullying* merasa lebih senang belajar di HSKS karena teman-temannya baik dan juga tutor/ gurunya sangat perhatian kepada siswa.

“aku senang belajar disini, karena teman-teman gak jahat, terus gurunya baik, belajarnya santai...”(JH, siswa; 16-11-2017)

Berdasarkan wawancara dengan siswa JH diketahui bahwa, belajar *homeschooling* kak seto solo itu menyenangkan dan nyaman hal ini berdampak pada perubahan mereka dalam bersosialisasi, belajar dan menghilangkan trauma yang mereka alami dari sekolah sebelumnya. Semua ini disebabkan oleh konsep belajar HSKS yang digunakan adalah fun, ceria dan mengedepankan kekeluargaan serta

tutor yang tidak hanya mampu menjadi guru melainkan juga mampu menjadi sebagai teman dan sahabat belajar anak-anak HSKS.

Pembahasan

Bullying merupakan perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang, tindakan yang bersifat ringan ataupun berat (Olweus dalam Siswati, 2009: 2).

Menurut (Sheras, 2002) karakteristik korban perundungan (*bullying*) yaitu mereka yang secara terus menerus atau dalam kurun waktu tertentu mendapat perlakuan agresif dari orang lain dan cenderung pemalu, penakut, cemas, memiliki harga diri rendah, terisolasi secara sosial, secara fisik lemah, bersifat emosional dan tidak tegas. Menurut Joseph; James; & Susan, (2003), korban perundungan (*bullying*) mengalami rasa kesepian, memiliki harga diri yang rendah, cemas, kurang populer daripada anak-anak lain, susah dalam menjalin hubungan pertemanan sehingga cenderung menghabiskan banyak waktu sendirian.

Menurut Sri Wahyuni (2011: 109) ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku *bullying*, antara lain faktor keluarga, lingkungan sekolah, dan karakteristik internal individu. Faktor interaksi dalam keluarga yang berperan penting dalam perkembangan psikososial anak adalah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak, dan ketika anak mencapai usia remaja maka anak akan memiliki persepsi tersendiri terhadap pola asuh orang tuanya tersebut.

Diperlukan sebuah cara untuk menangani para korban *bullying*, yaitu sebuah cara yang mampu membuat para korban *bullying* tetap belajar,

bersosialisasi dan mampu menjadi pribadi yang tidak lagi memiliki rasa cemas, takut dan risau ketika sedang belajar. Salah satunya yaitu melalui menempuh pendidikan melalui *homeschooling*.

Homeschooling (HS) menurut Danik Wijayanti (2010) yang dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah Sekolah Rumah adalah model alternatif belajar selain di sekolah. Pengertian dari *homeschooling* menurut Danik Wijayanti (2010) adalah sebuah keluarga yang memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anak dan mendidik anaknya dengan berbasis rumah.

Homeschooling diterapkan dalam beberapa bentuk yaitu *homeschooling* tunggal, *homeschooling* majemuk, dan komunitas *homeschooling*. Penerapan *homeschooling* ini tergantung dari kebutuhan setiap homeschooler dan disesuaikan dengan kemampuan orang tua dan minat anak (Kembara, 2007: 30). Dalam proses mengajar tidak hanya sekedar menerangkan dan menyampaikan sejumlah materi pelajaran kepada peserta didik, namun pengajar hendaknya memberikan dorongan agar terjadi proses belajar pada diri anak.

Lingkungan Sekolah, Menurut Ali dan Asrori (2004), sekolah berperan dalam proses perkembangan hubungan sosial remaja. Sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mempunyai disiplin yang baik, memberikan pembelajaran emosional, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan adanya hubungan guru-siswa yang baik pula.

Pada penerapannya *homeschooling*, Saputra (2007: 139-142) menyebutkan bahwa ada beberapa metode *homeschooling* yang dapat diterapkan mulai dari yang sangat

terstruktur (sekolah) sampai dengan yang tidak terstruktur. Akan tetapi homeschooler tidak perlu berpatokan pada satu metode saja, dengan kata lain homeschooler boleh menggunakan berbagai macam metode yang mungkin dapat dikerjakan. Adapun metode-metode *homeschooling* sebagai berikut: metode homeschool Charlotte Mason, metode homeschool klasik, metode elektik, metode homeschool montessori, metode unschooling, metode unit studies, metode homeschool waldorf.

Dalam praktiknya model pendidikan Homeschooling ini berbeda dengan sekolah formal, *homeschooling* dilakukan dirumah bersama dengan orang tua atau guru secara privat dengan jadwal yang sudah ditentukan dari pihak keluarga. Aturan-aturan yang ada di *homeschooling* juga berbeda dengan aturan di sekolah formal, dari jam belajar, seragam, mata pelajaran, tempat belajar, sampai metode pembelajaran.

Pendekatan pendidikan *homeschooling* kak seto solo dalam menangani korban *bullying* menggunakan cara pendekatan dari berbagai pihak, yaitu tutor/guru, siswa dan orang tua. Ketiga pihak itu saling bekerjasama untuk membentuk karakter siswa *homeschooling* yang tidak lagi menutup diri, minder, trauma, dan cemas ketika belajar dan berinteraksi dengan sesama teman maupun berinteraksi dengan guru/tutor.

Menurut Yamamoto, belajar mengajar akan mencapai titik optimal ketika guru dan murid mempunyai intensitas belajar yang tinggi dalam waktu yang bersamaan. Kedudukan guru dan siswa haruslah dianggap sejajar dalam belajar, jika kita memandang siswa adalah subyek pendidikan (Sumarsono, 1993). Guru

dan siswa sama-sama belajar, kebenaran bukan mutlak di tangan guru.

Parker dan Gottman (1988) mengemukakan bahwa teman sebaya mempunyai sejumlah peran dalam proses perkembangan sosial remaja (Santrock & Yussen 1989). Adapun peran-peran tersebut adalah: 1) sebagai sahabat, 2) sumber dukungan semangat, 3) sumber dukungan fisik, 4) sumber dukungan ego, 5) fungsi komparasi sosial, 6) fungsi kasih sayang

Perhatian orang tua kepada anaknya ada lima macam, yaitu, orang tua dapat memberikan perhatian pada anaknya dengan cara memberikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan anak dalam belajar. Orang tua harus mengawasi kegiatan anaknya dan penggunaan waktu belajar anak saat di rumah. Orang tua juga harus tau kesulitan-kesulitan yang dihadapi anaknya dan berusaha untuk membantu mengatasinya.

Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun kepribadian anaknya, karena orang tua merupakan pusat pendidikan yang pertama bagi anaknya. Sehingga orang tua lah yang memiliki peranan besar dalam membentuk watak dan kepribadian anak. Seperti dijelaskan oleh Hasbullah (2006: 88), sebagai (1) cara orang tua melatih anak untuk menguasai cara-cara mengurus diri, seperti: cara makan, buang air, berbicara, berjalan, berdoa, sungguh-sungguh membekas pada diri anak, karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi, dan (2) sikap orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung mempengaruhi reaksi emosional anak.

Strategi *homeschooling* kak seto solo dalam menangani kasus korban *bullying* selain hal diatas yaitu melakukan berbagai macam teraphy konseling kepada siswa. Teraphy konseling yang digunakan yaitu teraphy behavioristik termasuk didalamnya *logo teraphy* dan *Rational Emotive Behavior Therapy*.

Behavioristik teraphy memiliki tujuan membantu klien untuk mendapatkan perubahan tingkah laku (Sayekti, 2010: 81). *Logo teraphy* dapat di terapkan pada remaja dengan memperhatikan hubungan terapeutik, meningkatkan pemahaman tentang nilai, identitas dan tujuan, menjelaskan tentang kerangka permasalahan yang dihadapi, membantu menemukan makna dari masalah yang dihadapi (Corey, 2001 dalam Blair, 2004; Jeffries, 1995).

Rational emotive behavior therapy atau yang disingkat REBT yang dikembangkan oleh Albert Ellis (seorang ahli Clinical Psychology (Psikologi Klinis) dalam meningkatkan percaya diri siswa. Ellis (Corey, 2009) menjelaskan bahwa “terapis *rational emotive therapy* berusaha membantu mereka untuk mengatasi segenap manifestasi dari depresi, kesakitan, kehilangan rasa berharga, dan kebencian”. Uraian tersebut menjelaskan bahwa *rational emotive behavior therapy* dapat mengatasi masalah ketidak percaya diri yang muncul akibat dari pemikiran yang irrasional terhadap orang lain.

Rational emotive behavior therapy mampu mengembangkan karakteristik berikut dari mental dan emosional individu yang sehat, seperti kepentingan pribadi, kepentingan sosial, arahan diri, toleransi, penerimaan ambiguitas dan ketidakpastian, fleksibilitas, berpikir ilmiah, komitmen, pengambilan risiko, penerimaan diri,

hedonisme jarak jauh, kesediaan menjadi tidak sempurna, dan tanggung jawab terhadap gangguan emosi sendiri (Ellis dalam Corey, 1990). Teknik *rational emotive behavior therapy* ini, mampu meningkatkan kepercayaan diri dengan mengubah respon-respon emosional siswa yang mengalami seperti rasa kurang percaya diri. Siswa akan mampu melihat dengan jelas hal-hal irrasional dalam pikiran mereka sendiri. *Rational emotive behavior therapy* akan dapat mengajari siswa bagaimana caranya agar dapat secara aktif dan tegas membantah keyakinan-keyakinan irrasional tersebut menjadi rasional.

Terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pihak sekolah khususnya guru dalam menangani korban *bullying*. Korban *bullying* dipandang sebagai korban atas berbagai kondisi lingkungan keluarga dimana orang tua kurang memberikan perhatian, kehangatan, penghargaan, sehingga dalam perkembangan kepribadiannya mengalami hambatan dalam pembentukan *self esteem* (harga diri), (Amita, 2017).

Hambatan dan tantangan dalam mengatasi pada korban *bullying* menurut Fellinda (2016:1) adalah (1) kesulitan dalam mengontrol perilaku siswa saat berada diluar sekolah, (2) tidak terbukanya siswa korban *bullying* kepada guru, (3) kurangnya pemahaman guru terhadap perilaku *bullying*.

KESIMPULAN

Strategi penanganan yang dilakukan oleh *homeschooling* kak seto solo kepada korban *bullying* adalah dengan cara menciptakan suasana belajar yang fun, nyaman dan menjunjung tinggi kekeluargaan. Penanganan korban *bullying* tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, melainkan dilakukan bersama-sama

dengan tutor, siswa dan orang tua. Selain itu, dihunakan pula stratgei teraphy untuk menterapi para korban *bulliying* yang memiliki permasalahan mental dengan cara melakukan konseling bihavioristik teraphy yang termasuk didalamnya logo teraphy dan *Rational emotive behavior therapy*. Hasilnya bahwa siswa korban *bulliying* yang bersekolah di *homeschooling* kak seto solo merasa nyaman, senang dan memiliki motivasi belajar yang tinggi tanpa risau diganggu oleh teman-temannya.

Oleh karena itu disarankan kepada:

1. Anak-anak remaja atau siswa dimanapun berada dan bagaimana pun kondisinya, jadilah diri sendiri. jangan takut dengan perilaku bulliy yang dilakukan oleh orang lain. yakinlah bahwa seriap makhluk ciptaan Tuhan itu sama dan memang terlahir secara unik sesuai dengan karakter masing-masing. Oleh karena itu setiap individu harus memiliki self defance yang kuat agar tidak mudah di remehkan dan di bulliy oleh orang lain.
2. Orang tua, untuk menerapkan rasa kepedulian dan perhatian kepada anak, agar anak merasa bahwa dirinya masih dihargai dan disayangi. Peran orang tua sangat besar dalam membangun self defance seorang anak, melalui perahatian dan kasih sayanganya kepada anak. Sehingga anak tidak memiliki karakter penakut, tertutup, dan minder.
3. Pihak sekolah sebagai lingkungan terpenting kedua setelah keluarga, perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, nyaman dan mengemberika. Suasana lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa.

Ucapan terimakasih

Terimakasih kepada *homeschooling* kak seto solo atas kesediaannya menjadi tempat penelitian peneliti.

Terimakasih kepada para tutor, konselor dan siswa yang telah berkenan peneliti wawancarai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Asrori, M. 2004.*Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Arini Putri,Fellinda.2016.*Strategi guru dalam menangani korban bulliying di SMP Negeri Mojokerto*.Jurnal penelitian: UNESA
- Argiati, B.H. (2010).*Studi Kasus Perilaku Bullying Pada SMA di Kota Yogyakarta*. Jurnal Penelitian, ISSN 1978-0052, April. Bappeda kota yogyakarta.
- Blair, et.al. (2004).*Helping older adolescent search for meaning in depression*.Journal Of Mntal Health Counseling, 26 (4).
- Coloroso, B. (2006). *Stop Bullying, Memutuskan rantai Kekerasan anak dari pra sekolah hingga SMU*. (Terjemahan oleh Santi).Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Corey, Gerald. 1988. *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. PT. Eresco
- Corey, Gerald. 2010.*Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*.Diterjemahkan Koswara. Bandung:PT Refika Aditama.
- Diananda,Amita.2017.*Pengaruh perhatian prang tua dan self esteem terhadap intensitas perilaku bulliying remaja*.Jurnal
- Gottman, J., DeClaire, J. 2001.*Kiat-kiat Membesarkan Anak yang Memiliki Kecerdasan Emosional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jakarta globe.2011.diakses pada november 2017, dari buliyingin

- schools worry in Indonesia:
<http://jakartaglobe.id/archive/bullying-in-schools-a-worry-in-indonesia/>
- Roland, E. 2006. *ZERO Teachers' Guide to the Zero Anti-Bullying Programme Centre for Behavioural Research, University of Stavanger*. 1. Edition © Norway 2006 ISBNNR82-7578-032-2 Design: Apropos Communication Photographer: Sigbjørn Sigbjørnsen Layout: Grafo Trykkeri AS.
- Sheras., P. (2002). *Your Child: Bully or Victim? Understanding and ending schoolyard tyranny*. USA : Skylight Press.
- Siswati dan Widiyanti. (2009). *Fenomena bullying di Sekolah Dasar Negeri di Semarang: Sebuah Studi Deskriptif*. Jurnal . 5 (12).
- Sumarsono. (1993). *Pendidikan nilai dan profesi guru, dalam Pendidikan nilai memasuki tahun 2000*. Jakarta: Grasindo
- Thaberani, Hasbullah, 1994. *Rahasia Sukses Belajar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- widiananta, Wahyu. 2013. *implementasi pendidikan karakter melalui homeschooling (studi kasus di homeschooling kak seto surakarta tahun 2012)*. jurnal penelitian: UMS
- Wijayanti, Danik. 2010. *Perbedaan kreativitas antara anak pendidikan formal dengan anak homeschooling*. Jurnal Spirits. 1 (2-3)

PROJECT KINERJA SOSIAL SEBAGAI MODEL PENGEMBANGAN BELA NEGARA DI KALANGAN MAHASISWA

Natal Kristiono, Tijan

Universitas Negeri Semarang, Semarang

E-mail: natalkristiono@unnes.ac.id

Abstrak. Upaya bela negara merupakan suatu unsur penting dalam penyelenggaraan negara. Dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan negara bela negara menjadi unsur pokok yang tidak dapat dikesampingkan. Hal yang mendasar dalam upaya bela negara yang perlu mendapat perhatian adalah dalam tataran penanaman sikap kepada generasi muda kita salah satunya melalui pendidikan karakter yang ditanamkan dalam pendidikan formal. Mahasiswa menjadi sasaran penting sebagai generasi muda yang pada hakikatnya memiliki karakter dengan intelektualitas yang tinggi dan kecerdasan berpikir yang matang untuk masa depannya, memiliki kebebasan emosional untuk memiliki pergaulan dan menentukan kepribadiannya, memiliki tanggung jawab dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah, serta mulai memikirkan nilai dan norma-norma di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat dimana dia berada. Penelitian ini memfokuskan pada model pengembangan bela negara berbasis project kinerja sosial. Dalam ranah yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana konsep penanaman bela negara harus memiliki konsep yang jelas dan bervariasi dalam pengembangannya sehingga penerapan dan pendekatannya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Integrasi materi bela negara kedalam materi perkuliahan tentunya paling mendekati dengan materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan. Pengembangan model bela negara yang diintegrasikan dalam pendidikan kewarganegaraan dilakukan melalui project kinerja sosial. Pengembangan model bela negara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran mahasiswa dalam upaya bela negara serta mengetahui bagaimana metode project kinerja sosial dapat membangun upaya bela negara. Dalam melatih kemampuan dasar bela negara perlu adanya project nyata yang dilakukan oleh mahasiswa di masyarakat sebagai wujud upaya kesediaannya untuk bela negara. penanaman karakter bela negara generasi muda menjadi sasaran utama dalam program ini. Dalam tataran penanaman ini generasi muda kita mendapatkan pendidikan karakter melalui dunia pendidikan formal yang diatur sedemikian rupa terintegrasi melalui mata pelajaran maupun dalam materi perkuliahan

Kata Kunci: *PKn, Bela Negara, Kinerja Sosial, Model*

PENDAHULUAN

Dilihat dari struktur kependudukannya, Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk. Hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 mencatat, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.6 juta jiwa dengan rata-rata angka pertumbuhan 1.49 dan rata-rata angka kematian 0.4. Dilihat dari aspek etnis,

Indonesia termasuk negara yang sangat multi etnik dengan 1340 etnik yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Demikian pula dari aspek agama dan kepercayaan, Indonesia termasuk masyarakat yang sangat multi religious, dengan enam agama resmi, Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu, dan masih banyak sistem kepercayaan yang berkembang dan

menjadi sempalan dari berbagai agama yang ada, tapi tidak bisa menyatu dalam agama besarnya, kendati belum memperoleh pengakuan negara. Dilihat dari kemampuan ekonomi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumbangan GDP (Gross Domestic Product) terbesar ke-10 di dunia. Dengan demikian, Indonesia termasuk salah satu dari 10 negara kaya. Akan tetapi, kemiskinan masih cukup tinggi dengan 11.25% dari total populasi nasional hasil perhitungan BPS tahun 2014. Dengan demikian, persoalannya kemudian adalah distribusi dan pemerataan. Dan sampai kini negara belum memiliki sistem bagaimana mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat miskin kecuali dengan bekerja, dan untuk bekerja diperlukan skill dan ketrampilan.

Memang persoalan bela negara masih menyisakan pekerjaan bagi kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia, karena aksi-aksi terorisme yang menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk pembenaran aksi mereka, masih sesekali terjadi ataupun mengenai gerakan gerakan radikal lainnya. Ancaman dari dalam maupun dari luar harus selalu diantisipasi agar tidak menjadi bahaya yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. Sebagai bentuk antisipasi yang paling baik adalah meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan terutama mengenai upaya bela negara. Dalam penanaman karakter bela negara generasi muda menjadi sasaran utama dalam program ini. Dalam tataran penanaman ini generasi muda kita mendapatkan pendidikan karakter melalui dunia pendidikan formal yang diatur sedemikian rupa terintegrasi melalui mata pelajaran maupun dalam materi perkuliahan. Dalam ranah yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana konsep penanaman bela negara ini harus

memiliki konsep yang jelas dan bervariasi dalam pengembangannya sehingga penerapan dan pendekatannya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Integrasi materi di sekolah maupun perkuliahan menjadi hal yang akan membosankan apabila tidak diimbangi dengan metode yang menarik perhatian dari para generasi muda kita.

Penelitian yang perlu dikembangkan dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah yang dikembangkan saat ini terkait bela negara adalah bagaimana mengarahkan generasi muda kita menyadari dengan baik tentang kewajibannya sebagai salah satu bagian dari warga negara. Saat ini negara kita masih mengembangkan konsep bela negara dengan konteks *character building*, sehingga metode apakah yang penting untuk dikembangkan dalam menumbuhkan rasa, sikap maupun mental bela negara ini. Pendidikan sebagai tempat berkembang yang baik dalam membangun karakter bela negara ini, dengan pertimbangan inilah sangat menarik untuk dikaji tentang bagaimana suatu metode penanaman karakter ini perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan dengan sasaran para mahasiswa yang pada dasarnya memiliki kecenderungan sikap mental yang menurut Siswoyo (2007: 121) mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi.

Tinjauan Pustaka

1. Bela Negara

Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan

hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa serta dalam upayanya mencari penghidupan. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara, pembelaan negara secara non fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Nasionalisme adalah rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan dalam negara dan bangsa, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Selain itu, pembelaan bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara.

Upaya bela negara sangat penting bagi berlangsungnya bangsa dan negara. Alasan mendasar mengapa bela negara penting adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan aparat TNI. Sehingga tidak semua wilayah di Indonesia bisa dijaga oleh aparat TNI. Dengan peran serta masyarakat, maka akan terjadi sinergi antara warga dan TNI dalam proses penjagaan kedaulatan bangsa.
- b. Wujud rasa terimakasih warga atas segala kenikmatan yang didapat selama menjadi penduduk suatu bangsa.

Semua warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam bela negara,

sebagaimana ditegaskan pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi: *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan terhadap negara.”* Akan tetapi, kini pemaknaan bela negara itu tidak mutlak dengan berperang atau aktifitas heroik lain yang menggunakan senjata, karena berperang itu harus profesional dan terlatih. Sejalan dengan itu, Pasal 9 UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui :

- a. Pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, siswa maupun mahasiswa yang mengikuti mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dapat dikatakan telah ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Salah satu materi/bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi adalah Pendidikan Kewarganegaraan (Pasal 37 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Persoalan yang hendak kita telusuri adalah mengapa usaha pembelaan negara dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan?

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UURI Nomor 3 Tahun 2003 dijelaskan, bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pembentukan rasa kebangsaan dan cinta tanah air peserta didik dapat

dibina melalui pendidikan kewarganegaraan.

Konsep rasa kebangsaan dan cinta tanah air sangat berkaitan dengan makna upaya bela negara. Kecintaan kepada negara kesatuan RI merupakan realisasi dari konsep nasionalisme (rasa kebangsaan) dan cinta tanah air (patriotisme). Sedangkan kecintaan kepada tanah air dan kesadaran berbangsa merupakan ciri kesadaran dalam bela negara. Konsep bela negara adalah konsepsi moral yang diimplementasikan dalam sikap, perilaku dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan bela negara, pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana untuk membina kesadaran peserta didik ikut serta dalam pembelaan negara.

Dengan demikian, pembinaan kesadaran bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan usaha pertahanan negara. Pendidikan kewarganegaraan mendapat tugas untuk menanamkan komitmen kebangsaan, termasuk mengembangkan nilai dan perilaku demokratis dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.

b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib

Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun dalam organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa) atau UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Bela Negara. Memasuki organisasi resimen mahasiswa

merupakan hak bagi setiap mahasiswa, namun setelah memasuki organisasi tersebut mereka harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Anggota resimen mahasiswa tersebut merupakan komponen bangsa yang telah memiliki pemahaman dasar-dasar kemiliteran dan bisa didayagunakan dalam kegiatan pembelaan terhadap negara

c. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib

Sejalan dengan tuntutan reformasi, maka dewasa ini telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan khususnya yang menyangkut pemisahan peran dan fungsi TNI (TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL) dan POLRI. POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, POLRI berperan dalam bidang keamanan negara, sedangkan TNI berperan dalam bidang pertahanan negara.

d. Pengabdian sesuai profesi.

Yang dimaksud pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya (penjelasan UURI Nomor 3 Tahun 2002).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sudah secara eksplisit menjelaskan bahwa salah satu bentuk bela negara adalah berkarya yang dedikatif untuk bangsa

dengan skil, ketrampilan dan keahlian untuk kemajuan bangsa. Dengan adanya usaha bela negara sangat membantu dalam menciptakan ketahanan Nasional yang dikatakan oleh Sutarman (2011) adalah kondisi yang dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan menghadapi dan mengatasi segala ancaman , baik dalam maupun dari luar negeri yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta dalam mencapai tujuan nasionalnya.

2. Mahasiswa

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas (Hartaji, 2012: 5). Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI), mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di Perguruan Tinggi (Kamus Bahasa Indonesia Online, kbbi.web.id) Menurut Siswoyo (2007: 121) mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi. Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap

perkembangan yang usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pemantapan pendirian hidup (Yusuf, 2012: 27).

3. Project Kinerja Sosial

Bela negara untuk memperkuat ketahanan nasional harus di diversifikasi tidak sekedar dalam pengertian pertahanan negara, tapi juga ketahanan dalam pancagatra ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang harus dimotori oleh inovasi dan kreativitas bangsa untuk membina dan membangun bangsa untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, memiliki stabilitas ideologi dan politik serta memiliki ketahanan sosial dan budaya, dengan membina basis filosofi bangsa *harmony in diversity*. Ketahanan nasional juga harus siap menghadapi tantangan yang muncul dari luar, karena Indonesia tidak sendirian di dunia ini, tapi berdampingan dengan negara-negara serumpun di ASEAN, dan juga berdampingan dengan negara-negara Asia Pasifik, yang kemajuan dan perubahan di negara-negara tersebut, akan berakibat langsung pada Indonesia. Dengan demikian, ketahanan Nasional Indonesia akan sangat ditentukan oleh ketahanan dalam semua komponen baik sosial, ideologi, politik, ekonomi , sosial dan budaya, ketahanan aspek demografi, geografi dan sumber daya alam.

Hampir semua komponen yang terkait dengan ketahanan nasional memerlukan dukungan karakter ke-Indonesiaan yang kuat, karena banyak dari anak-anak bangsa Indonesia yang berdiaspora di luar negeri, dan merasa nyaman di luar negeri, tidak memiliki skema untuk kembali ke Indonesia atau

paling tidak memperkuat ekonomi dan *dignity* Indonesia dengan keahliannya. Dengan demikian, pendidikan karakter bangsa menjadi sangat urgen untuk menjadi agenda penting pendidikan nasional, dalam rangka menghadapi Indonesia Emas 2045, satu abad Indonesia, yang diperkirakan Indonesia akan memiliki 130 juta jiwa dalam usia produktif, dan merupakan jumlah yang sangat besar untuk menguasai dunia.

Kemampuan melatih kemampuan dasar bela negara perlu adanya proyek nyata yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai wujud upaya kesediaannya untuk bela negara. Proyek ini dikemas sebagai upaya perguruan tinggi melatih karakter mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan perguruan tinggi yaitu mengabdikan kepada masyarakat. Untuk itulah proyek kinerja sosial memberikan pelatihan nyata kepada mahasiswa dalam mewujudkan tujuan tersebut. Kinerja sosial yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang akan melakukan proyek kinerja sosial disiapkan secara fisik dengan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dengan melibatkan TNI sebagai pelatih. Durasi pelatihan militer ini dilakukan kurang lebih 4 kali pertemuan.
- b. Perguruan tinggi memberikan kesempatan kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk memberikan tugas kepada mahasiswa selama 2 bulan dengan pembelajaran di masyarakat
- c. Proyek kinerja sosial meminta kepada mahasiswa untuk membuat suatu rancangan kerja sosial yang akan dilakukan mahasiswa di masyarakat.

- d. Mahasiswa diberikan waktu selama 2 bulan untuk melaksanakan program kerja yang telah dibuat
- e. Mahasiswa harus memberikan laporan secara jelas tentang program kerja yang telah dilakukan dengan menguraikan tantangan dan hambatan yang dialami
- f. Evaluasi kinerja yang telah dilakukan dengan tipe uji unjuk kerja yang dilakukan oleh tim dosen yang ditunjuk.

C. Pembahasan

Bela Negara dalam Pendidikan

Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki cita-cita. Cita-cita yang diperolehnya dilakukan dengan melalui usaha dan cara sepanjang hidupnya. Untuk meningkatkan usaha dan cara manusia membutuhkan pendidikan. Sehingga dengan demikian sepanjang hidupnya manusia membutuhkan pendidikan. Tanpa pendidikan manusia tidak dapat berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-citanya), dan oleh karena itu manusia dijuluki sebagai "*homo-educandum*". Pendidikan harus dibedakan dengan ilmu pengetahuan. Pendidikan objek materinya adalah manusia, maka nilai-nilai yang berkenaan dengan kemanusiaan menjadi muatan dalam teori pendidikan. Menurut Pratte, teori pendidikan disusun sebagai latar belakang yang hakiki dan sebagai rasional dalam praktek pendidikan, yang pada dasarnya bersifat direktif. Bersifat direktif menunjukkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian pendidikan mengarah pada tujuan terwujudnya manusia yang seutuhnya. Sedangkan ilmu pengetahuan objeknya adalah peristiwa sosial maupun peristiwa alam. Titik berat ilmu pengetahuan adalah pemikiran tentang hubungan sebab akibat. Orang yang berilmu, tetapi

kurang memahami soal pendidikan cenderung dapat menyalahgunakan ilmunya untuk berbagai kepentingan, baik yang positif maupun yang negatif. Sedangkan pendidikan mengarahkan manusia kepada perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jika dapat disimpulkan pendidikan dapat berfungsi sebagai mengawal ilmu pengetahuan menuju ke arah yang manusiawi. Sedangkan pelatihan merupakan upaya melatih peserta didik agar apa yang didikannya dapat tercapai. Jadi pelatihan hanyalah merupakan cara, dalam hal ini cara yang paling dasar (*basic training*), sedangkan pendidikan merupakan bagian utama yang dibicarakan.

Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan manusia dalam menghadapi persoalan hidup. Manusia memiliki jiwa dan raga, sehingga yang perlu dididik itu adalah jiwa dan raganya. Pendidikan jiwa akan menghasilkan kemampuan intelektual, spiritual, emosional, sedangkan pendidikan raga akan menghasilkan keterampilan motorik, misalnya kemampuan menembak, kemampuan bela diri dan lain-lain. Pada intinya pendidikan merupakan suatu proses yang menghasilkan kesadaran dalam melihat persoalan kehidupan dan membentuk kemampuan intelektual, spiritual, emosional, sikap serta kecakapan dan keterampilan (keterampilan motorik), yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, atas dasar itu manusia dapat mengatasi persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya yang luhur.

Bila ingin dikaitkan dengan bela negara, maka pendidikan bela negara harus menghasilkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bela negara. Bela negara berdasarkan pasal 9 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Jadi pendidikan bela negara adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan intelektual, spiritual dan emosional, sikap dan keterampilan dalam rangka pertahanan negara yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan objek material dan formal kita dapat menentukan fenomena yang harus diamati dan pengembangan konsep yang terkait dengan fenomena tersebut. Objek Material. Objek material merupakan sasaran atau isi suatu kajian, dalam hal ini kajian yang akan dibahas dalam pendidikan bela negara. Sebagaimana telah disinggung diatas yang dimaksud dengan bela negara disini adalah upaya pertahanan negara.

Untuk mendapatkan objek materialnya, maka harus diketahui terlebih dahulu apa tujuan pertahanan negara. Tujuan pertahanan negara dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 4 ialah "...menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa". Jadi objek yang dikaji adalah kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Dalam buku "Tataran Dasar Bela Negara" yang diterbitkan oleh Ditjen Potan Dephan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dilandasi oleh nilai-nilai bela negara, yaitu : cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila, rela berkorban, memiliki kemampuan fisik dan psikis. Berdasarkan pemahama ini, maka objek kajian secara materi, mencakup : 1) Kesadaran untuk menjaga, melindungi kedaulatan negara, meliputi; a) menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, b) kesadaran menjaga batas wilayah ; 2) Kesadaran melindungi, menjaga keutuhan wilayah, mencakup; menjaga keamanan wilayah,

pertahanan wilayah, ketertiban wilayah, menata wilayah, membangun wilayah; 3) Kesadaran untuk menjaga, melindungi dan mencegah terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan bangsa, mencakup; menjaga keamanan penduduk dari bahaya penyakit, perang, bencana alam, kebakaran, dan konflik. Fenomena yang diamati.

Suatu kajian hendaknya harus diketahui dengan pasti apa yang hendak diamati, agar kita dapat benar-benar fokus. Pendidikan bela negara berdasarkan kajian materialnya, maka fenomena (gejala) yang perlu diamati berkaitan dengan : 1) respon-respon masyarakat terhadap kehidupan demokrasi mempunyai hubungan langsung dengan kedaulatan rakyat sebagai dasar kedaulatan negara; 2) rasa kemanusiaan ; munculnya rasa tolong menolong (menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan, dengan sendirinya perlu memperhatikan gejala kurangnya rasa tolong menolong, yang dapat mengindikasikan adanya pengabaian terhadap persatuan dan kemanusiaan ; 3) respon masyarakat terhadap perilaku korupsi, hal ini perlu menjadi perhatian, sebab mempunyai implikasi terhadap terancamnya keselamatan bangsa dari dalam ; 4) respon-respon masyarakat terhadap konflik horisontal dan vertikal yang muncul, yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Objek formal adalah metode atau pendekatan yang digunakan dalam, mengkaji masalah. Dalam rangka pendidikan bela negara diperlukan metode :1) Metode aspek keruangan (spasial), 2) Metode aspek Lingkungan (misalnya , politik, demokrasi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan-keamanan, tolong ,menolong, kesadaran berorganisasi, kesadaran berkumpul, kesadaran menjaga lingkungan hidup dll), 3) kesadaran menjaga kewilayahan

(teritorial), diantaranya peka terhadap persoalan perbatasan, pembinaan teritorial, sadar pentingnya daerah pangkal perlawanan dll, serta 4) aspek waktu (temporal). Berdasarkan objek formal tersebut dapat dicari hubungan antara fenomena dari aspek manusia yang melihat pentingnya menjaga kedaulatan neghara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan bangsa, yang selanjutnya akan menghasilkan teori, model, prosedur dan keputusan tentang bagaimana itu membela negara secara manusiawi.

Jika sudah jelas objek formal dari pendidikan bela negara, maka dapat dikembangkan konsep dasar bela negara, antara lain : 1) kedaulatan negara ; 2) Keutuhan wilayah sebagai wadah untuk melindungi bangsa dan negaranya guna tercapainya tercapai cita dan tujuan hidup ; 3) Keselamatan bangsa merupakan hal yang mutlak untuk dilindungi dari segala hal yang mengancam untuk mencapai cita dan tujuan hidupnya serta kelangsungan hidupnya. Guna memahami dan mengembangkan konsep dasar bela negara, maka perlu diperhatikan hal-hal esensial yang perlu menjadi perhatian, yaitu : 1) Konsep pola konflik , yang mencakup : mengkaji pola konflik pada daerah yang seimbang antara jumlah pemeluk agama, contoh di Palu, Poso, dan Ambon. Munculnya konflik pada daerah yang menimbulkan kesenjangan antara penduduk asli dan pendatang. Contoh : kasus Sampit ; 2) Konsep Jarak (semakin jauh dari pusat kekuasaan semakin mudah terjadinya disintegrasi bangsa, sehingga perlu memperhatikan daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain.); 3) Konsep keterjangkauan (*accessibility*), dimana hubungan satu tempat ketempat lain harus dipermudah, misalnya dengan pembuatan jalan, alat komunikasi dan transportasi dll). Penduduk di wilayah

perbatasan lemah terhadap keterjangkauan sehingga dapat terpengaruh oleh negara tetangga (rawan sebagai daerah frontier); 4) Konsep kesadaran nilai-nilai bela negara, mencakup : cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, memiliki kemampuan fisik dan psikis. Berdasarkan objek kajian material dan kajian formal, maka pendidikan bela negara dapat diarahkan kepada tujuan yang jelas dan terarah. Dan selanjutnya dapat disusun kedalam kurikulum pendidikan bela negara yang disesuaikan dengan berbagai jenjang pendidikan kedinasan yang ada.

Ilmu/Pengetahuan Penunjang. Untuk menunjang pendidikan bela negara diperlukan ilmu/Pengetahuan penunjang, antara lain : 1) Ilmu Pendidikan, 2) Psikologi, 3) Sosiologi, 4) Ilmu Politik, 5) . Geografi politik, 6) Ketahanan Nasional, 7) Pengetahuan Militer/Pertahanan (misalnya, Tataran dasar Bela Negara, Potensi Pertahanan, Doktrin Pertahanan Negara, Sishankamrata, Strategi Pertahanan Negara, Manajemen Pertahanan Negara), 8) Etika Politik, 9) Etika Umum/Dasar.

Persepsi Mahasiswa Unnes Terhadap Bela Negara sebagai Kewajiban Warga Negara Indonesia

Kepemilikan kartu tanda penduduk yang dimilikinya didukung pernyataanya sebagai warga negara Indonesia ketika mendaftarkan diri menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Semarang (Unnes). Hal tersebut telah membuktikan kedudukan mahasiswa Unnes sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat luas sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Mahasiswa Unnes

merupakan kaum muda Indonesia yang diharapkan memiliki kesadaran hidup berkonstitusi atau menjalankan kehidupannya berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), secara otomatis mahasiswa Unnes telah mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara baik disadari maupun tidak disadari. Keadaan yang aman dan kondusif yang diusahakan negara demi menjamin terpenuhinya hak –hak mahasiswa dalam menuntut ilmu , baik dari segi finansial dengan usaha pemenuhan sarana dan prasarana kuliah hingga bantuan biaya pendidikan yang sejak di tingkat dasar telah diusahakan dibantu oleh pemerintah maupun dari segi peraturan mengenai pendidikan yang mengarahkan perkembangan mutu pendidikan di Indonesia. Mahasiswa Unnes pun memiliki hak untuk berkumpul , menyatakan pendapat, ketika terdapat kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional sesuai pasal 28 UUD 1945. Adanya berbagai macam beasiswa yang disediakan oleh pemerintah, contohnya seperti beasiswa bidikmisi dimana pemerintah juga turut memberikan biaya hidup sebagai wujud penghidupan yang layak bagi warga negaranya.

Mahasiswa Unnes sebagai warga negara Indonesia yang berada pada usia produktif secara umum berperan sebagai penjaga nilai-nilai masyarakat, agen perubahan di berbagai disiplin ilmu pengetahuan, penggerak perbaikan moral pada masyarakat, serta pengontrol kehidupan sosial di masyarakat dengan ikut serta memberikan solusi permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya berdasarkan konstitusi pula para leluhur bangsa telah mengamanahkan generasi muda untuk meneruskan perwujudan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan

sejahtera yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mencapai tujuan nasional yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sesuai pasal 27 ayat (3) amandemen keempat UUD 1945 sebagai mahasiswa yang telah dipenuhi hak-haknya oleh negara, mahasiswa Unnes memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara Indonesia. Kewajiban bela negara juga erat kaitannya dengan pertahanan dan keamanan nasional. Mahasiswa Unnes juga menyadari kewajibannya membela negara dengan berbagai cara ikut serta menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan di organisasi kampus seperti BEM KM, DPM KM, UKM-UKM yang sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan lain yang berlaku. Ikut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing dengan giat belajar dan mengikuti perlombaan demi meningkatkan kualitas diri menjadi sumber daya manusia sesuai bidang keahlian yang diambil di Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang dapat membantu memajukan bangsa dan negara sehingga dapat mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Mengikuti pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai langkah awal program pemerintah dalam memberikan pendidikan Pendahuluan Pembelaan Negara (PPBN) atau kegiatan lain sejenisnya. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, taat, patuh terhadap peraturan perundangan dan demokratis di bangku perkuliahan

dengan mematuhi tata tertib yang ada di Universitas. Menjadi laskar konservasi dengan menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat. Selain itu mahasiswa Unnes juga dapat berkontribusi dalam mempertahankan keamanan negara dengan menjadi komponen rakyat seperti menjadi anggota resimen mahasiswa, menjadi perwira cadangan, organisasi keamanan desa, laskar, dan lain-lain. Mahasiswa Unnes juga senantiasa mengikuti acara-acara peringatan hari nasional sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas jasa-jasa pahlawan serta penghormatan akan identitas bangsa.

Makna Bela Negara bagi Mahasiswa Unnes

Perjuangan para leluhur bangsa untuk menjadikan Indonesia sebuah negara yang berdaulat dan bersatu, bukanlah hal yang mudah. Amanah untuk selalu mengisi kemerdekaan dan melanjutkan cita-cita dan tujuan nasional menjadi tugas generasi selanjutnya. Mahasiswa Unnes pun juga menyadari makna dari bela negara sebagai bentuk perwujudan penghormatan dan penghargaan terhadap negara yang menjadi tempat tinggalnya. Pada dasarnya Implementasi bela negara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara kesatuan RI daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, bela negara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Untuk

mengetuk hati nurani setiap mahasiswa Unnes agar sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan beberapa pendekatan secara tidak sadar telah dilakukan mahasiswa Unnes, dengan menjadi warga negara yang baik dan taat hukum, mahasiswa telah memaknai bela negara itu sendiri sebagai hak dan kewajibanya.

Keikutsertaan Mahasiswa Unnes dalam Upaya Bela Negara Sebagai Implementasi PKN

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, dilanjutkan dengan era merebut dan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan era mengisi kemerdekaan, menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Pada dasarnya mahasiswa Unnes telah ikut serta dalam upaya bela negara sejak berada di bangku sekolah dasar. Di dalam lingkungan pendidikan, pendidikan bela negara dilakukan secara bertahap, yaitu pada tahap awal telah diberikan pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah atas, dan dalam Gerakan Pramuka. Selanjutnya pendidikan bela negara diberikan dalam bentuk pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi. Hal itu sejalan dengan banyaknya mahasiswa Unnes yang berkontribusi dalam resimen mahasiswa (menwa).

Mahasiswa Unnes mengikuti pendidikan Pancasila dan pendidikan Kewarganegaraan yang mengenalkan para mahasiswa tentang wawasan kebangsaan. Mahasiswa Unnes juga ikut melestarikan lingkungan hidup dan berkontribusi memajukan bangsa dan negara dengan mengikuti berbagai ajang perlombaan untuk peningkatan skill dan pengetahuan. Mahasiswa Unnes juga menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan di lingkungan kampus,

masyarakat, dan keluarga dengan bertingkah laku sopan dan tidak menimbulkan keributan yang merugikan banyak orang. Mahasiswa Unnes juga berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan dan yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia. Dengan mengirimkan ide-ide melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang memberikan solusi terhadap permasalahan disekitar mahasiswa. Mahasiswa Unnes juga memiliki kecerdasan emosional, spiritual serta inteligensia, senantiasa memelihara jiwa dan raganya serta memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras dan tahan uji. Sedangkan secara fisik yaitu memiliki kondisi kesehatan, keterampilan jasmani untuk mendukung kemampuan awal bina secara psikis dengan cara gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan.

Secara naluriah mahasiswa Unnes telah mengetahui gangguan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dapat mengganggu kelancaran kegiatan masyarakat dan pada prinsipnya juga akan mengganggu pribadinya dan secara spontan berusaha meniadakannya baik secara perorangan maupun berpartisipasi ke dalam fungsi keikutsertaan rakyat dalam pertahanan keamanan negara. Kepribadian dengan tanggung jawab yang demikian merupakan faktor penting dalam memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan kehidupan masyarakat dan akan menganggap partisipasinya ke dalam fungsi pertahanan keamanan negara sebagai kewajiban dan kepentingan pribadinya.

Implementasi Pendidikan Bela Negara

Bertitik tolak dari Visi dan Misi Universitas Negeri Semarang (UNNES), maka Unnes memiliki ciri khas dan keunggulan dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam statuta Unnes” dinyatakan bahwa Unnes harus menjadi Perguruan Tinggi yang mengedepankan semangat dan sikap serta nilai nilai konservasi. Ciri perguruan tinggi yang demikian inilah yang harus diwujudkan. Dalam rangka mewujudkan Unnes yang menjadi Universitas konservasi bereputasi internasional, maka diperlukan visi dan kesamaan persepsi dari segenap unsur pengelola pendidikan yang ada di lingkungan Unnes. Dalam rangka menyiapkan Perguruan Tinggi yang memiliki ciri ini maka secara substansi segenap proses pendidikan dan outputnya harus dapat menumbuhkan konservasi yang didalamnya ada kepedulian dan kesadaran Bela Negara.

Unnes sebagai kampus teladan dan terdepan di bidang kependidikan, harus dapat mewujudkan konsep yang lebih maju tentang bela negara. Konsep tentang Pendidikan Bela Negara harus terintegrasi antara kurikuler dengan kegiatan yang ko-kurikuler. Pendidikan Bela Negara secara kognitif telah disampaikan kepada para mahasiswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen PKn yang memberikan transfer nilai-nilai Bela Negara seakan menjadi bagian pengajaran yang mandiri. Disisi lain kegiatan ko-kurikuler yang mengedepankan aspek afektif dan psikomotorik dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang menanamkan sikap bela negara juga merupakan kegiatan yang belum sinergis dalam bingkai Pendidikan Bela Negara. Akibatnya nuansa implementasi

Pendidikan Bela Negara dalam kehidupan kampus dinilai masih terkesan kurang. Memperhatikan dan menyadari uraian tersebut di atas, maka dipandang perlu ada suatu kajian tentang penjabaran Pendidikan Bela Negara secara komprehensif. Pendidikan Bela Negara sudah seyogyanya dikaji baik dari tinjauan perundang-undangan dan pemerintahan negara, serta dalam ranah pendidikan dan pengajaran. Materi bela negara ini diberikan untuk membangun karakter bangsa yang memiliki tekad jiwa bersatu, kesadaran berbangsa dan bernegara yang gigih, memiliki kemampuan awal bela negara baik secara psikis maupun fisik, dalam membangun kekuatan pertahanan.

Diselenggarakan secara dini dan simultan, terpadu, menyeluruh dan berlanjut, selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Sasaran secara psikis untuk menumbuhkan sikap mental antara lain: cerdas, kritis, kreatif, proaktif, disiplin, tangguh, pantang menyerah, bertanggung jawab, dan bangga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sedangkan sasaran fisik dimaksudkan untuk membentuk sikap dan perilaku antara lain: menghargai nilai-nilai budaya bangsa, nilai kesehatan dan fisik yang kuat, tangkas, trampil, sehingga memiliki kemampuan pengembangan dan kepercayaan diri, dalam membela negara. UUD 1945 pada bagian pembukaan telah dikemukakan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan-tujuan luhur itu didasarkan pada Pancasila sebagai

ideologi dan falsafah bangsa dan negara dan Undang Undang Dasar 1945. Pencapaian tujuan-tujuan di atas dilakukan berbagai upaya pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Upaya yang paling mendasar adalah menemukan dan menerapkan cara yang paling efektif untuk menyadarkan warga negara agar tergerak ikut serta dalam pembelaan negara. Di sini pendidikan bela negara berperan penting untuk membangkitkan kesadaran setiap dan seluruh warga negara akan hak dan kewajiban dan semua potensi dirinya untuk membela bangsa dan Negara.

Selain melalui pendidikan, upaya membangun kesadaran bela Negara bagi setiap warga Negara dapat dilakukan melalui (pemberian) motivasi dalam berbagai bentuk dan cara. Motivasi mempunyai kekuatan tersendiri dalam mempengaruhi sikap dan pola pikir warga Negara. Motivasi ini dapat juga muncul secara spontan dalam diri para warga Negara, karena mereka menyaksikan langsung kemampuan Negara dalam mengemban amanat rakyat dan mereka melihat dan merasakan langsung bahwa Negara sungguh bermanfaat bagi kehidupan mereka, bahwa tanpa Negara, mereka tidak berdaya mengembangkan dirinya. Kemampuan dan manfaat Negara itu tampak di dalam inisiatif negara menyediakan berbagai kebutuhan hidup mereka, menyiapkan aneka fasilitas yang memudahkan mereka meraih kesejahteraan hidup, melindungi mereka dari berbagai ancaman, menciptakan iklim kebebasan, kesamaan, keadilan dan solidaritas. Menyaksikan semua itu, mereka termotivasi sendiri untuk bangkit membela negara. Pada akhirnya mereka sendiri merasa bahwa mereka berhak untuk tidak memenuhi hak dan

kewajibannya membela negara, baik di masa damai maupun di masa perang.

Di sisi lain, motivasi untuk membela negara dapat muncul, karena para warga Negara merasa terhormat jika mereka mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya bagi kepentingan umum, bangsa dan negara. Bagi para warga negara, pengorbanan demi pengabdian kepada bangsa dan negara merupakan suatu kehormatan dan kepercayaan. Dengan begitu, setiap warga negara akan berusaha menjadi orang yang dengan sukarela mau berkorban untuk bangsa dan negaranya. Namun demikian demi rasa keadilan dan kepastian bagi mereka dalam menunaikan hak dan kewajibannya membela negara, maka hal ihwal bela negara perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses motivasi ini akan berhasil jika setiap warga Negara dan seluruh warga Negara Indonesia selain mengenal dan memahami keunggulan dan kelebihan Negara dan bangsa Indonesia, juga sekaligus mengenal dan memahami kemungkinan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap eksistensi bangsa dan Negara Indonesia.

Landasan sosiologis bagi pendidikan bela negara bertumpu pada negara sebagai kesatuan atau ikatan sosial terbesar yang memiliki kekuasaan tertinggi atas bentuk-bentuk masyarakat lainnya, dan manusia (rakyat, warga negara) sebagai makhluk sosial yang membentuk negara. Sebagaimana kita ketahui, oleh kesosialannya, manusia selalu mau atau tergerak untuk hidup bersama orang lain. Kecenderungan ini menghasilkan berbagai tingkatan kesatuan atau ikatan sosial, mulai dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, lalu meluas kepada masyarakat hingga bangsa dan negara.

Di dalam kesatuan-kesatuan sosial itu, manusia individual berinteraksi

dengan sesamanya di dalam lingkungan sekitar tempat ia tinggal dan beraktivitas. Dalam dunia modern dewasa ini, ia tidak saja berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya, tetapi juga dengan lingkungan seluas dunia melalui segala sarana teknologi modern. Ia di satu pihak (dapat) mempengaruhi sesama dan masyarakat dengan pola pikir dan seluruh sikap hidupnya, tetapi di pihak lain ia juga dipengaruhi oleh masyarakat dengan paham-paham, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut masyarakat, bangsa dan negara. Lingkungan sosial tempat ia tinggal dan beraktivitas menetapkan apa yang baik yang boleh dilakukan dan apa yang buruk yang tidak boleh dilakukan. Ia akan diterima oleh lingkungan sosialnya sejauh ia mengakui dan menghayati paham, nilai dan norma yang dianut masyarakat, dan turut serta dalam berbagai tugas sosial demi terciptanya kebaikan umum. Sebaliknya ia akan ditolak jika ia hidup dan bertingkah laku tidak selaras paham, nilai dan norma yang dianut masyarakat, dan dengan begitu tidak memberikan sumbangan apapun bagi kebaikan umum masyarakat. Di dalam kesatuan-kesatuan sosial itu, manusia individual menjalani proses personisasi, proses penyempurnaan diri sebagai pribadi. Di sana pula, ia mewujudkan dimensi politis kehidupannya dengan menjalankan peran-peran sosialnya demi kebaikan umum masyarakat. Dengan peran-peran sosial itu serta seluruh kehidupannya, ia membaktikan diri bagi kebaikan umum seluruh masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam konteks negara sebagai kesatuan atau ikatan sosial terbesar yang dibentuk oleh rakyat atas dasar konsensus bersama, individu warga negara bertumbuh dalam kesempurnaan dirinya sebagai manusia. Negara, sesuai tugas pokoknya, menyediakan berbagai

fasilitas yang memungkinkan warga negara mengembangkan dirinya dan mengusahakan kesejahteraan. Maka, pada gilirannya, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu, di samping hak-haknya, terhadap negara. Salah satu hak dan kewajiban dasar warga Negara adalah hak dan kewajiban membela negara. Landasan sosiologis bagi pendidikan bela Negara bertumpu pada Negara sebagai kesatuan atau ikatan sosial terbesar yang memiliki kekuasaan tertinggi atas bentuk-bentuk masyarakat lainnya, dan manusia (rakyat, warga Negara) sebagai makhluk sosial yang membentuk negara.

Di dalam kesatuan-kesatuan sosial itu, manusia individual berinteraksi dengan sesamanya di dalam lingkungan sekitar tempat ia tinggal dan beraktivitas. Dalam dunia modern dewasa ini, ia tidak saja berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya, tetapi juga dengan lingkungan seluas dunia melalui segala sarana teknologi modern. Ia disatu pihak (dapat) mempengaruhi sesama dan masyarakat dengan pola pikir dan seluruh sikap hidupnya, tetapi dipihak lain ia juga dipengaruhi oleh masyarakat dengan paham-paham, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut masyarakat, bangsa dan Negara. Lingkungan social tempat ia tinggal dan beraktivitas menetapkan apa yang baik yang boleh dilakukan dan apa yang buruk yang tidak boleh dilakukan. Ia akan diterima oleh lingkungan sosialnya sejauh ia mengakui dan menghayati paham, nilai dan norma yang dianut masyarakat, dan turut serta dalam berbagai tugas social demi terciptanya kebaikan umum. Sebaliknya ia akan ditolak jika ia hidup dan bertingkah laku tidak selaras paham, nilai dan norma yang dianut masyarakat, dan dengan begitu tidak memberikan sumbangan apapun bagi kebaikan

umum masyarakat. Di dalam kesatuan-kesatuan sosial itu, manusia individual menjalani proses personisasi, proses penyempurnaan diri sebagai pribadi. Di sana pula, ia mewujudkan dimensi politis kehidupannya dengan menjalankan peran-peran sosialnya demi kebaikan umum masyarakat. Dengan peran-peran sosial itu serta seluruh kehidupannya, ia membaktikan diri bagi kebaikan umum seluruh masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan Bela Negara ini disamping mendasarkan diri pada kelima landasan diatas, harus pula dilandaskan pada kekuatan iman-kepercayaan tiap-tiap dan seluruh warga Negara dalam agamanya masing-masing. Kecuali itu, dalam konteks pembelaan Negara, adalah suatu kesalahan besar apabila kemerdekaan bangsa dan Negara ini, yang sudah dikaruniakan oleh Allah yang maha kuasa, diporak-porandakan oleh berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, bukan terus dibela dan dipertahankan. Dalam iman dan kepercayaan yang kukuh akan penyertaan Allah SWT dalam seluruh perjuangan anak-anak bangsa ini, sambil terus berusaha melepaskan diri dari segala praktik-praktik penyelenggaraan negara yang tidak selaras dengan ajaran-ajaran Tuhan (KKN, perilaku diskriminasi, mental feodalisme, dll), kiranya seluruh anasir negative: ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, di atas dapat teratasi dengan gilang-gemilang.

SIMPULAN

Kesimpulan diambil dari beberapa kecenderungan umum yang dapat digeneralisasi dari deskripsi hasil penelitian. Implikasi mencakup dampak temuan lapangan. Sedangkan Rekomendasi sebagai bagian terakhir dari tulisan ini yang mengetengahkan

mengenai masukan dari hasil penelitian pengembangan model pengembangan model bela negara di kalangan mahasiswa melalui project kinerja sosial terintegrasi pada mata kuliah PKN. Berdasarkan fokus permasalahan dan tujuan penelitian serta dihubungkan dengan hasil analisis dan pembahasannya, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, maka dapat dirumuskan kesimpulan umum sementara penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian ini berhasil memperoleh gambaran tentang pengembangan model pengembangan model bela negara di kalangan mahasiswa melalui project kinerja sosial terintegrasi pada mata kuliah PKN.
2. Kuatnya hubungan antara pembelajaran model project kinerja sosial dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan nilai-nilai bela negara dapat dianalisis dari beberapa hal. Pertama, model ini lebih menarik bagi mahasiswa; karena dalam proses pembelajarannya tidak hanya menyentuh aspek kognitif saja, tapi juga aspek afektif dan konatif yang sangat penting untuk mengembangkan nilai-nilai kesadaran bela negara bagi mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalmeri (2014). *Pendidikan Untuk Pengembangan Karakter (Telaah terhadap Gagasan Thomas Lickona dalam Educating for Character)*. Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Jurnal Al-Ulum, Volume. 14 Nomor 1.
- Hartaji, Damar A. (2012). *Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang*

- Berkuliah Dengan Jurusan
Pilihan Orangtua. Fakultas
Psikologi Universitas
Gunadarma.
- Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI,
(2010). *Pengembangan
Pendidikan Budaya dan Karakter
Bangsa*. Jakarta: Kementerian
Pendidikan Nasional.
- Priyanto Supriyono.2005. *Pendidikan
Kewarganegaraan Materi Pokok
Perkulihan MKK di Perguruan
Tinggi*. Semarang: Fasindo.
- Siswoyo, Dwi dkk. 2007. *Ilmu
Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press
Sunarso, dkk. 2008. *Pendidikan
Kewarganegaraan Untuk
Perguruan Tinggi*. Yogyakarta:
UNY Press.
- Sutrisno (2009). *Pendidikan Dan
Pelatihan Dasar Bela Negara*.
Media Informasi Departemen
Pertahanan, Jurnal WIRA, Vol.21
No.5
- _____ (2009). Hak dan Kewajiban
Bela Negara (Tinjauan Etika
Politik) Media Informasi
Departemen Pertahanan, Jurnal
WIRA Vol.20 No.6, Maret-April
2009.
- Undang-Undang Dasar RI 1945
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang No. 3 tahun 2002,
tentang Pertahanan Negara.

CIVIC CULTURE NGAYAH DALAM PEMBELAJARAN PPKn

Putu Ronny Angga Mahendra

Program Studi PPKn – FKIP – Universitas Dwijendra Denpasar

E-mail: puturonny87@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini adalah suatu kegiatan dalam mencari suatu pola baru pembelajaran PPKn, dengan cara memanfaatkan kultur atau suatu kebiasaan yang terdapat pada suatu kelompok masyarakat. *Ngayah* adalah suatu *civic culture* yang dimiliki masyarakat bali, yang dapat digunakan sebagai bagian dalam pembelajaran PPKn. *Ngayah* mengandung nilai kebersamaan, kepatuhan, disiplin, tanggung jawab, sehingga mampu sebagai suatu pola dalam membentuk suatu kelompok masyarakat yang baik sebagai suatu tujuan dari PPKn.

Ngayah sebagai suatu kewajiban sosial dan merupakan satu *civic culture* yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Bali. Di dalamnya terdapat unsur keikhlasan dalam melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. *Ngayah* yang merupakan salah satu *civic culture* Bali, merupakan satu identitas yang terkait dengan budaya. Hal ini juga akan memberikan suatu manfaat dalam keberagaman masyarakat saat ini.

PPKn dalam tujuannya bagaimana mampu menghasilkan sifat dan perilaku warga yang baik dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Salah satu cara dalam mencapai tujuan ini adalah dengan memanfaatkan suatu identitas yang ada dalam suatu masyarakat dalam pembelajaran. Keberadaan suatu identitas bangsa akan ditopang oleh kebudayaan daerahnya masing-masing, dan kebudayaan adalah salah satu pembentuk karakter masyarakat.

Kata Kunci : *Civic Culture, Ngayah, PPKn*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak munculnya penguatan dalam proses globalisasi pada akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke- 21, konsep perubahan (*change*) adalah istilah yang sering diungkapkan berbagai kalangan dan kesempatan. Perubahan di sini telah menyentuh semua lapisan aspek kehidupan manusia, dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya sampai pada konsep negara nasional atau negara bangsa (*nation-state*). Akibat kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) mengakibatkan batas negara secara ekonomi dan sosial budaya menjadi rancu dan samar. Semua ini kadang

terbungkus dalam satu wadah yang disebut globalisasi. Status orang saat ini tidak hanya sebagai warga negara akan tetapi juga sebagai warga dunia/ global. Suatu hal yang mustahil kita dapat melakukan filtrasi atau menyaring segala bentuk pengaruh budaya melalui produk iptek.

Kenyataan ini memperkuat betapa besarnya pengaruh iptek bagi kehidupan manusia. Kita tidak bisa mencegah atau menutup-tutupi mensterilkan diri dari pengaruhnya dari budaya asing. Barangkali solusi yang mampu dilakukan adalah memberi pengertian dan penjelasan bahwa terdapat dua pengaruh yang ada yakni positif dan negatif. Hal positif tentu akan bermanfaat dan perlu diserap,

sedangkan hal yang negatif tidak perlu diserap dan perlu dihindari karena tidak memberikan manfaat kehidupan. Cara lain untuk membentengi generasi muda dengan ajaran agama, budi pekerti, akhlak, keteladanan, dan norma-norma lain yang baik. Perlu pula diperkenalkan norma hukum serta akibat-akibat pelanggaran terhadap norma tersebut.

Keinginan manusia untuk membuat kehidupannya berjalan semakin cepat dan mudah dengan berbagai inovasi tentu juga menjadi alasan mendasar munculnya kreativitas dan inovasi yang terus berkembang. Hasil kemajuan iptek telah memberikan warna baru pada kehidupan masyarakat dewasa ini, perubahan secara struktur pola pikir, tata cara hidup, dan tentunya akan memberi warna baru pula dalam sosio-kultur yang terdapat pada suatu masyarakat. Akan muncul suatu perubahan kultur atau paradigma masyarakat dalam memandang diri dan kebudayaannya. Seperti kita ketahui bahwa salah satu unsur kehidupan manusia itu adalah kebudayaan/budayanya. Semakin manusia berbudaya maka semakin dia mampu mempertahankan kehidupan dalam segala bentuk persaingan di dalamnya.

Kebudayaan dengan segala unsur yang terdapat di dalamnya telah mampu membentuk suatu roda kehidupan manusia, menjadi pemecah masalah yang dihadapinya, dan menjadi penggerak kehidupannya. Sangatlah penting kiranya sebagai manusia kita mempertahankan kultur kemanusiaan manusia. Berbagai kejadian kehidupan dewasa ini telah merubah cara pandang manusia terhadap hal itu. Dengan mengedepankan konsep materialisme, dan hedonisme, kita meninggalkan kebudayaan yang telah diwarisi oleh kehidupan sebelumnya, tanpa mampu mempertahankan dan memberikan pada

generasi kita ke depan. Kebudayaan juga merupakan satu prinsip hidup yang menjadi tolok ukur manusia dalam kedewasaanya, dan membedakan kita dengan makhluk lainnya.

Dalam hubungannya dengan menjaga, memajukan, dan melestarikan kebudayaan daerah telah diatur dalam UUD NRI 1945 pada pasal 32 ayat 1 dan 2 yaitu : 1) negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya, 2) negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jelaslah bahwa negara Indonesia menjamin dan mendukung keberadaan budaya daerah yang menjadi bagian dari budaya nasional. Budaya atau kearifan lokal merupakan cerminan dari kepribadian bangsa yang memang patut dilestarikan guna menangkal pengaruh-pengaruh negatif dari luar.

Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya serta kearifan lokal, dapat mengarah pada salah satu bidang ilmu yang mengkaji kearifan lokal atau budaya daerah yang terdapat di dalam budaya kewarganegaraan. Menurut Winataputra (dalam I Wayan Trisna, 2016) disebutkan konsep *civic culture* atau budaya kewarganegaraan. *Civic culture* merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pemebentukan identitas warga negara. Kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat merupakan bagian dari jati diri bangsa, karakter dan budaya nasional.

Salah satu konsep kebudayaan yang perlu diperkuat adalah gotong royong, ini merupakan satu solidaritas yang terjadi dalam kehidupan

masyarakat dan telah menjadi suatu kearifan lokal bangsa Indonesia dengan keragaman nama atau istilah di masing-masing daerah. Di Bali diistilahkan dengan *ngayah*. Tradisi ini dilaksanakan untuk kepentingan bersama secara sukarela atau tanpa pamrih. Nilai-nilai dalam tradisi ini menjadi karakter bangsa yang diturunkan secara turun temurun oleh pendahulu yang di dalamnya kaya akan nilai edukatif.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang di dalamnya terdapat unsur *civic culture* di sini memiliki satu tujuan bagaimana menguatkan karakter kebangsaan anak didik salah satunya dengan penguatan nilai-nilai kebudayaan yang ada. Tujuan akhir yang diharapkan muncul dari PPKn adalah bagaimana mampu menciptakan *civil society* yang mumpuni dalam suatu kelompok masyarakat bangsa. Ini akan terwujud ketika suatu warga negara memiliki ketahanan dan pemahaman yang baik terhadap kewarganegaraanya yang salah satu unsur di dalamnya adalah kebudayaan. Dalam kesempatan ini penulis mencoba melakukan suatu kajian pada pemanfaatan *suatu civic culture* yang ada dalam masyarakat Bali yakni *ngayah* digunakan dalam pembelajaran PPKn. Selain menuju pada hasil pembelajaran yang utama dan baik, satu sisi juga sebagai media memperkenalkan dan mempertahankan nilai-nilai budaya kepada anak didik, berkarater, dan menjadi warga negara yang cerdas dan baik.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana deskripsi *ngayah* sebagai satu *civic culture* masyarakat Bali ?

1.2.2 Bagaimana konsepsi *ngayah* dalam pembelajaran PPKn ?

1.3 Tujuan

1.3.1 Memahami deskripsi konsep *ngayah* sebagai *civic culture* masyarakat Bali.

1.3.2 Memahami konsepsi *ngayah* dalam pembelajaran PPKn.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan etnografi sebagai metode penelitian. Hal ini disebabkan karena kualitatif dapat menggali lebih dalam mengenai permasalahan manusia sebagai instrumen penelitian. Metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, juga teknik analisisnya, merupakan eksistensi dari perilaku manusia seperti mendengarkan, melihat, bicara, berinteraksi, dan bertanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berguna memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan membangun kerangka teoritis baru.

Dengan demikian pendekatan kualitatif merupakan pendekatan naturalistik karena situasi di lapangan yang apa adanya dan tidak manipulatif. Metode ini digunakan meneliti pada kondisi yang alamiah. Peneliti berharap memperoleh informasi dan data yang akurat dalam proses penelitian. Sedangkan etnografi dapat membahas tentang suku bangsa atau suatu masyarakat, yaitu mengenai kebudayaan lokal suku atau masyarakat tersebut, menggali lebih jauh makna dari setiap budaya dan kearifan lokal yang ada pada suatu masyarakat. Etnografi akan menggali jauh makna dari setiap budaya dan kearifan lokal *ngayah*.

Penelitian ini diarahkan untuk dapat menggali atau mendeskripsikan nilai kearifan lokal *ngayah* dalam kaitannya dengan pembelajaran PPKn. Tujuannya adalah bagaimana memperoleh gambaran umum subjek

penelitian, yang menekankan pada aspek pemotretan pengalaman individu sehari-hari. Dalam penelitian ini juga dicoba memahami makna suatu perbuatan dan kejadian bagi orang bersangkutan menurut kebudayaan dan pandangan mereka. Kebudayaan yang di dalamnya merupakan dan mengandung aspek dan pengetahuan kultural yang luas.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mempelajari suatu kebiasaan kelompok budaya yang dibawa pada suatu proses pembelajaran dengan menuju pada suatu tujuan di dalamnya. Peneliti mempelajari suatu konsepsi *ngayah*, dan pembelajaran PPKn dan mencari suatu hasil kesimpulan dari hal itu.

Ngayah, adalah suatu bentuk kegiatan sosial masyarakat Bali yang dilakukan secara bersama-sama dan sukarela tanpa mengharapkan suatu imbalan atau bayaran. Mengandung suatu kewajiban yang harus dipenuhi atau dijalani oleh masyarakat sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial. Kewajiban ini akan dibedakan menjadi tiga yakni kewajiban religius terutama tempat persembahyangan (*pura*), kewajiban yang berkaitan dengan sosiokultural banjar adat, dan kewajiban sebagai suatu bentuk dedikasi atau loyalitas pada banjar adat. Kegiatan ini menjadi satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Bali. Oleh karena itu, dicobalah mencari suatu hubungan kajian konsep *ngayah* ini dalam pembelajaran PPKn, yang di dalamnya termuat konsep hak dan kewajiban sebagai warga negara kaitannya dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Ngayah

Bali tidak hanya dikenal sebagai daerah dengan pesona alam yang indah dan memiliki daya tarik. Bali juga dikenal akan kehidupan budaya masyarakatnya, dikenal dengan kekayaan seni, dan sistem kemasyarakatan yang selaulu berjalan seiringan dengan modernisasi. Walaupun dalam perkembangannya Bali telah banyak mengalami perubahan karena pengaruh dari keras dan derasnya pembangunan pariwisatanya. Salah satunya adalah terkikisnya kebudayaan adat-istiadat Bali oleh arus modernisasi, individualisme yang muncul akibat tuntutan kebutuhan yang meningkat dan persaingan yang ketat. Salah satu yang menjadi fenomena itu adalah *ngayah*. Sehingga perlu dilakukan suatu pembiasaan dalam setiap kegiatan kehidupan masyarakat Bali terkait hal ini.

Ngayah adalah salah satu cara menunjukkan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersosialisasi dengan orang lain dan lingkungan, mengontrol ego, saling membantu dan menghargai, mempererat tali persaudaraan, karena banyak hal positif yang bisa dilakukan dalam kegiatan ini seperti pembersihan, penyiapan dan pembuatan sarana upacara, yang merupakan kategori dari *ngayah* itu sendiri.

Ngayah adalah suatu bukti nyata dalam menjaga kebudayaan dan tradisi yang ada di Bali, merupakan suatu kebudayaan dan kearifan lokal yang diturunkan secara turun temurun dan suatu kewajiban bagi generasi muda Hindu Bali untuk melaksanakannya. Esensi *ngayah* itu sendiri adalah sebagai bentuk *sradha* /bakti umat manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada sesama manusia yang dilakukan

secara gotong royong tulus ikhlas tanpa mengharapakan suatu imbalan.

Sing ngayah dadi bayah (tidak ngayah bisa bayar) menjadi suatu paradigma yang agak menyesatkan dalam kehidupan dewasa ini. Apabila ingin melakukan pelestarian kebudayaan Bali hal ini sudah sepatutnya diluruskan. Ngayah tidak bisa dilakukan dengan hanya membayar, layaknya pergi ke bank melakukan pembayaran tagihan telepon/listrik dan selesai, perlu dimilikinya kesadaran akan pentingnya esensi *ngayah* sebagai bentuk sraga bakti tulus ikhlas, pemeliharaan nilai-nilai luhur dan sebagai bentuk wujud nyata dari sikap *menyamabraya* yang sudah menjadi ciri khas masyarakat Bali.

Secara harfiah ngayah berarti melakukan pekerjaan tanpa mendapat upah. Secara etimologis di adopsi dari konteks politik dan kultural feudal dari zaman raja-raja di Bali. Berasal dari kata “ayah” yang terpancar dari budaya purusaisme atau patrilineal, terutama yang berkaitan dengan sistem pewarisannya. Kemudian menjadi kata “ayahan” yang secara sangat spesifik mengacu pada tanah ayahan desa sebagai bagian integral tanah adat dan konsekuensinya. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang bersangkutan sebagai salah satu wujud tanggung jawab. Dalam kaitannya dengan kewajiban-kewajiban nya ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Kewajiban religius-teritorial, terutama Pura Kahyangan Tiga (pengayah pura)
2. Kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan sosiokultural banjar adat (pengayah banjar adat)
3. Kewajiban berupa dedikasi, loyalitas berkaitan dengan raja-raja yang memerintah pada masa itu .

karena sebagian tanah-tanah ayahan itu adalah pemberian dari raja yang diperoleh atas penaklukan kerajaan / daerah lain.

Dalam masyarakat Bali secara prinsipal (sosiosemantik) membedakan *ngayah* dengan *nguopin* (*ngaopin*), hampir sama dengan *ngayah*. Bedanya *nguopin* berada dalam skala yang lebih kecil di lingkungan rumah atau keluarga. Sedangkan *ngayah* berada dalam skal yang lebih besar seperti di Pura. Tradisi *ngayah* diletakan dalam format hubungan vertikal ke Tuhan. Sedangkan tradisi *nguopin* ini merupakan tradisi yang tidak boleh hilang dalam kehidupan bermasyarakat di Bali. Hal ini karena dapat memupuk rasa persaudaraan dan membangun kebersamaan melalui kegiatan yang dilakukan dengan bergotong royong tanpa ada mengharapakan imbalan berupa materi/uang.

3.2 Hakikat Ngayah

Aktivitas ngayah yang masih melekat dalam sikap bathin dan budaya manusia Hindu, pada hakekatnya berpegang pada suatu rumusan filosofis “kerja ibadah” dan “ibadah dalam kerja”. Dalam disiplin kerja religius modern pemahama demikian tertuang dalam *ora et labora* (bekerjalah dan berdoaalah). Paham kerja dalam filosofi ini adalah refresentasi kerja dan sosok para bhakta. Dalam kitab *Bhagawadgita* II. 47 seperti yang yang dinyatakan, “ hanya berbuat untuk kewajiban bukan hasil perbuatan itu, jangan sekali-sekali pahal yang menjadi motifmu bekerja, jangan pula tidak bekerja sebab tidak aka nada pahala (*karmany evadhikaras te ma phalesu kadaeana ma kharma phala hetur bhur mate sanggostava akarmani*).

Pemahaman akan hakekat kerja tersebut secara praktis juga perlu didukung oleh suatu sikap bathin yang terumus dalam kalimat, “*rame ing gawe*

sepi ing pamrih”. Ungkapan sederhana ini memberikan suatu pengertian dan makna yang sangat dalam. Secara teoritis paham kerja ngayah ini dilihat dari pemikir K. Bertnes yang menyatakan bahwa mengandung dua konsekuensi etik yaitu etika keutamaan dan etika kewajiban. Etika keutamaan yang berabad-abad dikemukakan Socrates, Plato, dan Aristoteles pada dasarnya berorientasi pada “*being manusia*” dengan rumusan “*what kind of person should I be*” (saya harus menjadi orang yang bagaimana). Sedang etika kewajiban yang dikembangkan oleh David Hume, dan Kant bagi kehidupan zaman modern, pada prinsipnya berorientasi pada “*doing manusia*” dengan rumusan “*what should I do*” (saya harus mengerjakan apa).

Rumusan ini bagi sosok manusia Hindu lebih jauh diperdalam dalam suatu pemahaman “*kharisma*” yang disebut “*taksu*”. Konsep ini spiritual taksu menjadi dasar baik dalam representasi paham kerja yang mengacu pada *being* maupun *doing* manusia. Konsep ini tidak semata-mata member penguatan teknik tapi juga religius yang mendalam terhadap nuansa spiritual berbasis pada aktivitas ngayah.

3.3 Konsep Civic Culture

Setiap masyarakat di muka bumi memiliki kearifan dalam mengelola diri dan lingkungannya. Secara etimologis, kearifan berarti kebijaksanaan, pengetahuan atau kecakapan untuk mengetahui, mengenal, menyetujui, membedakan, mencari tahu, menyelidiki, dan mengakui yang benar dan salah (Dimas, dalam Suja, 2010). Kearifan tidak hanya bertumpu pada pengetahuan pengalaman, tetapi terkait pula dengan pola berpikir holistik, mengingat pengetahuan manusia yang kompleks. Oleh karena dasar tersebut, maka kearifan menuntut pemecahan

masalah dari berbagai sudut pandang serta pertimbangan resiko yang terdapat di dalamnya. Kearifan juga berdimensi lokal, sehingga dapat ditambahkan label atau keruangan (lokalitas) menjadi kearifan lokal (*lokal wisdom*).

Kearifan lokal tidak hanya mengandung makna bahwa kearifan tersebut tumbuh dari pemecahan masalah yang bersifat lokal, tetapi kesahihannya pun terbatas pada dimana dia tumbuh dan berkembang. Sebagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, kearifan lokal juga berperan dalam mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat bersangkutan. Suatu konsep kearifan lokal dapat dipilah menjadi kearifan sosial dan kearifan ekologi. Kearifan sosial dijadikan pedoman agar menjadi makhluk sosial yang arif dan bijaksana. Sebagai contoh, masyarakat Bali yang Hinduistik, mengatur dirinya dengan nilai harmoni atas dasar etika moral *tattwamasi*, yang dikonsepsikan ke dalam asas-asas; *suka-duka*, *paras-paros* (orang lain bagian dari diri sendiri dan sebaliknya), *salunglung sabayantaka* (baik-buruk, mati ditanggung bersama), dan saling *asah*, *asih*, *asuh* (saling menyayangi, mengoreksi, dan melayani). Kearifan ekologi merupakan pedoman manusia agar arif dalam berinteraksi dengan lingkungan alam biofisik (*sekala*) dan supernatural (*niskala*). Dalam konteks ini masyarakat Bali mendudukan dirinya sebagai bagian dari alam bukan penguasa alam, sehingga akan mampu mewujudkan kelestarian alam.

Beberapa karakteristik kearifan lokal adalah sebagai berikut :

1. Kolektif, kearifan lokal adalah milik kelompok tertentu yang melokal, yang bersumber dari pengalaman di lingkungan dimana mereka berada.
2. Empirik, kearifan lokal merumuskan sesuatu yang

- dilakukan secara empiris dan kontinyu.
3. Praksis, kearifan lokal tidak saja merupakan penbendaharaan kognisi tetapi terkait pula dengan aspek psikomotorik yaitu praktek dalam masyarakat lokal.
 4. Lokalitas, label lokal bermakna bahwa ketepatangunaan kearifan lokal tidak universal.
 5. Moralitas, kearifan lokal juga mencakup nilai tata kelakuan sebagai aktivitas moral.
 6. Holistik, menyangkut pengetahuan dan pemahaman tentang seluruh kehidupan dengan segala relasinya di alam semesta.
 7. Protektif, karena kearifan lokal terkadang dijaga oleh orang bijak, pemimpin agama, atau guru sehingga akan bertahan dan menjadi tradisi.
 8. Integratif, kearifan lokal sering terkait dan menyatu dengan ajaran ataupun praktek keagamaan seperti ritual (Atmadja dalam Suja 2010).

Sains dan teknologi merupakan bagian dari kebudayaan, serta sangat berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan tersebut (Koentjaraningrat, 2010). Secara substansi kebudayaan berisikan pengalaman dan pengetahuan yang didapat lewat hubungan masyarakat dengan lingkungan sosial dan alamiahnya. Pengalaman berkaitan dengan apa yang pernah dialami, dijalani, atau dirasakan oleh manusia dengan menggunakan panca indera dan perasaannya. Selanjutnya pengetahuan merupakan pengabstrakan dari pengalaman.

Sebagai bagian dari kebudayaan, keberadaan pengetahuan sains asli Bali tidak lepas dari dinamika budayanya. Dalam hal ini tradisi budaya Bali mencakup tiga lapisan, yaitu tradisi kecil yang bersifat agraris dengan menonjolkan kebersamaan (komunal),

tradisi besar yang dijiwai oleh agama Hindu dengan menonjolkan keharmonisan, dan tradisi global yang didukung kemajuan sains, teknologi, dan komunikasi. Selanjutnya sains Bali akan berkembang menjadi sains asli yang bersifat akomodatif, maka sangat mungkin bersinergi dengan sains modern pada era global yang membentuk sains post modern.

Menurut Atmadja (dalam Arjana, 2009), pengetahuan dalam perspektif Hindu bersumber dari proses interaksi antara objek inderawi, pikiran (manah), budhi, dan atman. Hubungan dalam proses interaksi ini dapat dipahami dari berbagai filsafat Hindu seperti Wedanta, Vaisesika, Sankya, Mimansa, Yoga, Carvaka, dan lain-lain. Hal ini dapat digambarkan dalam makna simbolik orang yang sedang menumpang kereta dengan kusir yang mengendalikan lima kuda. Penumpang dalam hal ini menjadi simbol sang atman sebagai simbol kesadaran yang menentukan arah perjalanan kereta. Kusir adalah simbol dari budhi, kesadaran yang akan mengendalikan gerak dinamis pikiran yang digerakkan oleh panca indera. Tali kendali adalah simbol pikiran yang mempunyai berbagai daya kendali tergantung pemanfaatannya oleh sang budhi (kusir). Lima kuda adalah simbol panca indera panca indera yang bergerak dinamis dan cenderung tanpa kendali dalam mengarahkan objek indrawi. Kereta sendiri merupakan simbol badan jasmaniah manusia sebagai tempat sang atman menjalani proses kehidupan (Sukadi, 2007).

Dalam hubungan fungsi alat indera terhadap objek lingkungan, hal ini mampu membangkitkan daya-daya pikiran untuk menyadari adanya objek dan memberdayakan serta mengarahkan hubungan alat indera dengan lingkungan. Mula-mula hubungan itu

akan menimbulkan kesadaran yang kosong dari pikiran jika hubungan alat indera dengan objek bersifat baru. Keadaan inilah yang disebut dengan nirwikalpaka pratyaksa. Kekosongan ini adalah untuk memungkinkan daya-daya pikiran mengawali mengidentifikasi objek inderawi. Daya persepsi akan dapat membantu pikiran menciptakan image atau cipta yang menghasilkan bayangan/ pandangan ataupun perspektif terhadap objek. Langkah berikutnya, memungkinkan pikiran memberikan kekuatan interpretasi terhadap objek dengan memanfaatkan seluruh jejak pengalaman yang tersedia dalam pikiran. Gejala ini disebut dengan gejala pikiran savikalpaka. Pada saat bersamaan pikiran mengembangkan berbagai daya lainnya antara lain : membandingkan (*upamana*), mengembangkan imajinasi (*bhavana*), mengembangkan kesaksian (*sabda*), mengembangkan hipotesis (*arthapati*), menarik kesimpulan (*anumana*), membuat keputusan akhir (*sankalpa*), dan memegang atau mempertahankan keputusan akhir (*dharana*)(Sukadi, 2007).

Secara makro kebudayaan Bali adalah suatu bagian daripada kebudayaan nasional, sedangkan secara mikro kebudayaan Bali terdiri dari berbagai variasi sesuai dengan konsep ; desa, kala, patra. Ardana (2007), menyatakan bahwa tradisi budaya masyarakat Bali akan tetap ajeg dan berkembang sesuai dengan dinamika jaman karena ditopang oleh sifat dan karakteristik kebudayaan Bali sendiri, yaitu : 1) dalam keterbukaanya dengan kebudayaan luar, dengan sifat fleksibel dan adaptif, 2) kebudayaan Bali dengan dukungan manusia Bali mampu menerima dan mengolah unsur-unsur asing menjadi milik kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadiannya, 3) terintegrasinya sistem kebudayaan

dengan agama secara mantap melalui dukungan lembaga-lembaga sosial yang mapan, 4) berkembangnya aktivitas dan kreativitas budaya sebagai sumber penggerak masyarakat dalam pembangunan, 5) terwujudnya satu potensi lokal genius dan perjalanan budaya yang kuat dan tangguh.

Berbagai budaya nusantara lainnya memang telah hadir di Bali. Kehadiran berbagai aneka budaya nusantara tersebut telah mampu memperkaya khasanah budaya Bali. Selain hal itu, masyarakat Bali saat ini juga tengah dihadapkan kepada budaya global yang masuk melalui kegiatan pariwisata. Interaksi sosial dan kontak budaya yang berlangsung dalam kehidupan pariwisata sangat begitu nampak, sehingga memunculkan fenomena dialog dan pencampuran antar budaya lokal dan budaya global. Globalisasi belum menghapus keberadaan budaya lokal, akan tetapi justru memperkaya dan memperkuat budaya lokal Bali. Hal ini dikarenakan oleh sifat budaya Bali yang elastis dan adaptif. Bertahannya budaya Bali ini terjadi karena adanya prinsip-prinsip yang unggul dalam budaya Bali itu sendiri yang secara umum sering dinyatakan sebagai kearifan lokal (*local genius*), yakni suatu potensi budaya lokal yang dapat digali, dilestarikan, dan dikembangkan sebagaimana menurut Emiliana (dalam Arjana, 2009).

Beranjak dari hal tersebut di atas, maka *local genius* merupakan suatu potensi budaya atau kearifan lokal yang bisa diberdayakan untuk disumbangkan bagi peradaban global. Bentuk kearifan lokal masyarakat Bali yang berkaitan dengan pelestarian kebudayaan yang fleksibel dan adaptif dengan dukungan manusia Bali mampu untuk menerima dan mengolah unsur-unsur asing untuk menjadi milik

kebudayaan milik sendiri tanpa kehilangan kepribadiannya.

Civic culture sangat erat kaitannya dengan identitas bangsa, dalam hal ini dimaksudkan sebagai identitas yang terkait dengan budaya, kearifan loka, serta adat-istiadat yang ada di tiap daerah. *Civic culture* merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warga Negara. Aspek sosio cultural dalam bangsa ini telah mewujudkan integritas bangsa yang beragam dan bermacam-macam, diantaranya terdiri dari budaya-budaya dan etnisitas nasional. Hal ini dapat merekatkan perbedaan sebagai salah satu alternatif dalam membangun aspek kehidupan berbangsa. Konsep ini juga perlu didasari dan diwarnai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Negara Indonesia yakni Pancasila sebagai budaya nasional.

Civic culture berada dalam suatu domain *sosial cultural* yang berorientasi pada pembentukan kualitas personal individual warga Negara. Bersifat psikososial yang perangkat gagasan atau *set ideas*. *Civic culture* ini berkenaan dengan proses adaptasi psikososial individu dari kaitan budaya komunitas (keluarga, suku, masyarakat lokal) dalam ikatan kewarganegaraan. Merupakan anugerah ketika suatu bangsa memiliki kebudayaan yang kaya dan beragam seperti halnya Indonesia. Di Indonesia menggambarkan karakter warga Negara Indonesia seperti layaknya yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Beberapa ciri-cirinya adalah sebagai berikut : 1) menyadari akan kedudukan warga Negara, 2) memahami aturan yang berlaku, 3) melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara dengan ikhlas dan tanggung

jawab, 4) menghindari sikap konflik, 5) menyadari akan dan kewajiban, dan 6) menumbuhkan sikap kerja sama.

Ditarik kesimpulan bahwa *civic culture* dalam nilai-nilai Indonesia adalah nilai-nilai dalam warga Negara, sikap dan perilaku warga Negara yang mencerminkan Pancasila, akhlak kewarganegaraan dan budaya yang menopang kewarganegaraan serta berkenaan dalam proses adaptasi psikososial individu dari budaya komunitas. Semua hal ini ditopang oleh kearifan atau kebudayaan lokal yang mesti terus dikuatkan dalam kehidupan masyarakat.

3.4 Esensi *Ngayah* dalam Pembelajaran PPKn

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang sadar, mau dan mampu mengembangkan diri serta mengaktualisasikan diri serta kemampuannya dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara. Kualitas SDM yang diharapkan ada saat ini adalah tidak hanya sekedar berkualitas dalam kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, akan tetapi juga dari segi kualitas spiritual dan moral sebagai pembentuk sikap dan perilaku yang baik dan pembentuk kepribadian bangsa. Kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah kemajuan yang tetap berpegang dan dilandasi oleh nilai dan karakter bangsa Indonesia, Pancasila dan UUD 1945. Hal ini penting untuk menanamkan dan memantapkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Berkaitan dengan tujuan tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan program pendidikan Pancasila di sekolah telah pula dilakukan dengan langkah-langkah yang memungkinkan terbinanya sikap dan moral sesuai

dengan nilai moral Pancasila. Berbagai pembehanan dan upaya tersebut adalah perubahan dan penyempurnaan mata pelajaran PPKn. Melalui PPKn, nilai-nilai Pancasila diharapkan menjadi sesuatu yang utuh dan bulat dan dapat dijadikan sebagai suatu pola pikir, sikap dan perilaku. Oleh karena itu, dalam pengajarannya tidak hanya dilakukan sekedar penyampaian pengetahuan tentang Pancasila, akan tetapi diimbangi dengan langkah-langkah penting mengembangkan, membina, dan menanamkan nilai-nilai moral Pancasila sebagai sesuatu yang benar-benar dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengembangan potensi intelektual dan keterampilan dalam mata pelajaran PPKn tidak akan dapat dipisahkan dari materi kewarganegaraan, dikarenakan bahwa untuk mampu berpikir kritis tentang isu, maka seseorang selain harus memiliki pemahaman yang baik tentang isu, latar belakang, dan hal-hal kontemporer yang relevan juga harus memiliki perangkat berpikir intelektual. Keterampilan dan kemampuan berpartisipasi sangat diperlukan adanya bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini akan meliputi kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan keputusan melalui kerjasama dengan orang lain dengan cara mengetahui tokoh sentral pembuat kebijaksanaan dan keputusan, membangun koalisi, bernegosiasi, mencari konsensus/ kesepakatan bersama, dan pengendalian konflik.

Penanaman nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, patriotisme, disiplin, dan sikap demokratis maka diharapkan siswa memiliki moral yang baik. Hal ini menjadi suatu tujuan dari PPKn yang merupakan tanggung jawab moral keilmuan PPKn bagi segenap warga

bangsa. Maka akan sangat mudah bila dalam pelaksanaan pembelajarannya dibantu dengan menggunakan suatu kajian-kajian, kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam suatu kelompok masyarakat. Pemanfaatan suatu budaya lokal tentunya selain memperkuat nilai budaya juga mampu menciptakan suatu akar yang kuat dalam pembentukan warga Negara yang baik dan cerdas di Indonesia.

Melihat dari esensi *ngayah* yang terkandung maka sangat tepat apabila dalam pembelajaran PPKn juga dilakukan dengan konsep ini. Berlandaskan atas keinginan berkerja sama dengan sesama, lingkungan, dan Tuhan, dan berlandaskan atas rasa ikhlas. Pelestarian budaya dan kearifan lokal menuntut peran generasi muda yang aktif. Menguatnya nilai identitas kelokalan, akan mampu menguatkan pula identitas nasional di era globalisasi dewasa ini.

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Salah satu konsep kebudayaan yang perlu diperkuat adalah gotong royong, ini merupakan satu solidaritas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan telah menjadi suatu kearifan lokal bangsa Indonesia dengan keragaman nama atau istilah di masing-masing daerah. Di Bali diistilahkan dengan *ngayah*. Tradisi ini dilaksanakan untuk kepentingan bersama secara sukarela atau tanpa pamrih. Nilai-nilai dalam tradisi ini menjadi karakter bangsa yang diturunkan.

Penanaman nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab, kerjasama, toleransi, patriotisme, disiplin, dan sikap demokratis maka diharapkan siswa memiliki moral yang baik. Hal ini menjadi suatu tujuan dari PPKn yang

merupakan tanggung jawab moral keilmuan PPKn bagi segenap warga bangsa. Maka akan sangat mudah bila dalam pelaksanaan pembelajarannya dibantu dengan menggunakan suatu kajian-kajian, kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam suatu kelompok masyarakat. Pemanfaatan suatu budaya lokal tentunya selain memperkuat nilai budaya juga mampu menciptakan suatu akar yang kuat dalam pembentukan warga Negara yang baik dan cerdas di Indonesia. Melihat dari esensi ngayah yang terkandung maka sangat tepat apabila dalam pembelajaran PPKn juga dilakukan dengan konsep ini. Berlandaskan atas keinginan berkerjasama dengan sesama, lingkungan, dan Tuhan, dan berlandaskan atas rasa ikhlas. Pelestarian budaya dan kearifan lokal menuntut peran generasi muda yang aktif. Menguatnya nilai identitas kelokalan, akan mampu menguatkan pula identitas nasional di era globalisasi dewasa ini.

Trisna, Mahardika, Cecep Darmawan. 2016. *Civic Culture Dalam Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Bali Aga Desa Trunyan*, Humanika, Vol. 23 hal 20.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Wahab, Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, Alfabeta, Bandung.
- Ahmadi, Koiru. 2012. *Mengembangkan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Dalam KTSP*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Pranata, Dewa. 2017. *Ngayah Tak Sekedar Mayah*, <https://dewapranata.com>. 17 November 2017.
- Sapriya, dkk. 2014. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*, Lab. Pendidikan Kewarganegaraan UPI, Bandung.
- Solihatini, Etin. 2012. *Strategi Pembelajaran PPKn*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Suja, Wayan. 2010. *Kearifan Lokal Sains Bali*, Paramita, Denpasar.

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AJARAN KI HADJAR DEWANTARA

Dwi Wijayanti

Prodi PGSD Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta
E-mail: dwiwijayanti.ust@gmail.com

Abstrak. Di era globalisasi ini, isu-isu tentang karakter atau moral menjadi isu yang ramai diperbincangkan, mengingat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan moral yang terjadi terutama dikalangan generasi muda. Sebagai contoh tawuran antar pelajar, seks bebas, narkoba, kebiasaan mencotek, lunturnya nilai-nilai budaya timur seperti hilangnya sopan santun, kurangnya rasa saling menghargai dan menghormati, lunturnya nilai kejujuran yang memicu timbulnya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satu cara yang sedang digalakkan untuk memperbaiki karakter bangsa adalah melalui dunia pendidikan.

Rendahnya nilai kejujuran di sekolah, seperti budaya menyontek, berbohong kepada guru, berbohong pada teman, mencuri, dan tindakan kecurangan lainnya akan berdampak terhadap proses pendidikan dan hasil yang akan diperoleh. Jujur sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan ikhlas. Sikap jujur merupakan sikap yang mendasari untuk melawan korupsi di Indonesia saat ini. Salah satu strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk memberantas bibit-bibit korupsi yaitu melalui pendidikan anti korupsi. Metode penulisan artikel ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik studi pustaka.

Pada dasarnya upaya pendidikan anti korupsi bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Bapak pendidikan Indonesia yaitu Ki Hadjar Dewantara telah sejak lama melakukan pendidikan anti korupsi melalui ajaran-ajarannya antara lain: Tri Pantangan (pantangan menyalahgunakan kekuasaan, keuangan dan kesusilaan), Tri Ngo (*ngerti, ngroso, lan nglakoni*), Tri Pusat Pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat), Tri Hayu (*memayu hayuning sarira, memayu hayuning bangsa dan memayu hayuning manungsa*), Tri N (*niteni, niroke, nambahi*), metode among (*asih, asah, dan asuh*) dan yang paling penting adalah Trilogi Kepemimpinan (*ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani*). Melalui penerapan ajaran Ki Hadjar Dewantara sebagai upaya pendidikan anti korupsi, diharapkan dapat membentuk karakter warga negara yang baik dan memiliki sikap anti terhadap segala bentuk perilaku korupsi pada siswa.

Kata kunci: Pendidikan, Antikorupsi, Ki Hadjar Dewantara

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, isu-isu tentang karakter atau moral menjadi isu yang ramai diperbincangkan, mengingat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan moral yang terjadi terutama dikalangan generasi muda. Sebagai contoh tawuran antar pelajar,

seks bebas, narkoba, kebiasaan mencotek, lunturnya nilai-nilai budaya timur seperti hilangnya sopan santun, kurangnya rasa saling menghargai dan menghormati, lunturnya nilai kejujuran yang memicu timbulnya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Praktek korupsi di Indonesia telah

merajalela merambah hampir semua lini kehidupan masyarakat. Salah satu faktornya adalah krisis keteladanan. Kita bisa melihat berita-berita yang ada di media cetak maupun media elektronik, dimana banyak politisi yang terjerat kasus korupsi, pejabat provinsi yang tertangkap tangan dan masih banyak lagi yang lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari acch.kpk.go.id diperoleh hasil total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2017 di Indonesia adalah penyelidikan 918 perkara, penyidikan 645 perkara, penuntutan 523 perkara, inkracht 436 perkara, dan eksekusi 463 perkara. Krisis moral, inilah yang menjadi masalah serius untuk segera ditangani. Salah satu cara yang sedang digalakkan untuk memperbaiki karakter bangsa adalah melalui dunia pendidikan.

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan berfungsi untuk membangun karakter, watak serta kepribadian bangsa. Oleh sebab itu pendidikan karakter merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan di Indonesia. Salah satu karakter yang menjadi sorotan saat ini adalah kejujuran. Rendahnya nilai kejujuran di sekolah, seperti budaya menyontek, berbohong kepada guru, berbohong pada teman, mencuri, dan tindakan kecurangan lainnya akan berdampak terhadap proses pendidikan dan hasil yang akan diperoleh.

Jujur sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan ikhlas. Sikap jujur merupakan sikap yang mendasari untuk melawan korupsi di Indonesia saat ini. Salah satu strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk memberantas bibit-bibit korupsi yaitu melalui pendidikan anti korupsi.

METODE PENULISAN

Metode penulisan artikel ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik studi pustaka yaitu metode yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti. Menurut Sukardi (2008:14) pada penelitian deskriptif, peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian secara jelas dan sistematis. Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data yaitu yang dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun gambar atau elektronik. Dalam artikel ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mencermati ajaran-ajaran Ki Hadjar Dewantara yang terdapat dalam berbagai buku-buku karangannya, serta jurnal atau referensi lain yang mendukung.

PEMBAHASAN

1. Konsep Korupsi

Istilah Korupsi berasal dari bahasa Inggris *corrupt* yang berasal dari perpaduan dua kata bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Kata korupsi juga berasal dari bahasa Latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti buuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Istilah korupsi juga bisa diartikan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian.

World Bank mendefinisikan "*Corruption involves behavior on the part of official in the public and private sectors, in which they*

improperly and unlawfully enrich themselves and/or those close to them, or induce others to do so, by misusing the position in which they are placed” yang berarti korupsi yang melibatkan sebagian pegawai baik sektor publik maupun sektor swasta, di mana mereka memperkaya diri sendiri secara melawan hukum dan/ atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukannya, dengan menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki (Suradi, 2014:79).

Konsep korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dijelaskan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kolusi adanya pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Dan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindakan sosial menyimpang, yang dengan sadar dan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok yang dapat merugikan hajat hidup orang banyak dan negara.

Ada berbagai bentuk korupsi. Menurut Suradi (2006: 17) korupsi

sebagai tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain mencakup: (1) penyuapan (*bribery*), (2) konflik kepentingan (*conflicts of interest*), (3) pemaksaan yang bersifat ekonomi (*economic extortion*), dan (4) pemberian secara tidak sah (*illegal gratuities*). Sementara menurut Hussain Alatas dalam Muhammad Nurdin (2014:68) bentuk-bentuk korupsi meliputi penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme.

Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal di mana seseorang dilimpahi pemberian dengan maksud agar penerima pemberian tersebut mengubah perilaku sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab (Bakar, 2011:50 dalam Muhammad Nurdin 2014:68) sebagai contoh penyuapan di lembaga peradilan, penyuapan dalam pengadaan barang, penyuapan di lembaga pendidikan dll. Sementara pemerasan mengandung arti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerjasama. Dalam hal ini pemangku jabatan bisa menjadi pemeras atau menjadi korban pemerasan. Contoh pemerasan antara lain pemerasan di lembaga peradilan, pemerasan oleh polisi terhadap pengusaha, pemerasan terhadap pejabat, dan pemerasan oleh anggota dewan.

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan tindakan korupsi. Menurut Ilham Gunawan (Marwan Mas, 2014:11) faktor-faktor terjadinya korupsi di Indonesia yaitu:

- a. Faktor politik
Berkaitan erat dengan kekuasaan, dan orang yang menjabat cenderung melakukan penyelewengan dengan jabatannya itu. Seperti yang dinyatakan oleh Lord Acton “*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” yang berarti kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut.
- a. Faktor yuridis, berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman bagi para koruptor sehingga hukum tidak mampu memberikan efek jera. Sanksi hukuman menyangkut dua aspek yaitu hakim dapat keliru dalam menjatuhkan putusan, yang kedua yaitu sanksi dapat saja lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor budaya. Korupsi merupakan peninggalan feodal kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal itu berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki oleh seseorang.
Sementara menurut Muhammad Nurdin (2014:67) penyebab terjadinya korupsi antara lain:
 - b. Gaji yang rendah dan kurang sepenuhnya peraturan perundang-undangan.
 - c. Administrasi yang lamban dan sebagainya.
 - d. Warisan pemerintahan kolonial.
 - e. Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak ada

kesadaran bernegara, dan tidak adanya pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan, yang dipengaruhi oleh faktor internal berupa sikap mental dan faktor eksternal seperti budaya, hukum yang lemah, gaji yang rendah dan lain sebagainya.

Korupsi merupakan musuh bersama yang harus segera diberantas. Salah satunya yaitu dengan menanamkan sikap anti terhadap korupsi bagi generasi sedini mungkin. Penanaman sikap anti korupsi ini dapat dilakukan dengan mengajarkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan nasionalisme.

2. Prinsip-prinsip Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi dilakukan dalam upaya untuk mencegah tindakan antikorupsi yang merajalela. Menurut Muhammad Nurdin (2014:72-73) berikut ini merupakan prinsip-prinsip antikorupsi yang harus ditegakkan untuk mencegah terjadinya korupsi antara lain:

a. Akuntabilitas

Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar segenap kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Agenda yang harus ditempuh dalam akuntabilitas yaitu *pertama*, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban. *Kedua*, berkenaan dengan upaya evaluasi, apa dampak dan manfaat bagi masyarakat atau pengguna (*user*). Baik dampak

langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah proyek/ kegiatan/ program.

b. Transparansi

Merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi sebuah struktur kelembagaan.

c. Kewajaran

Fairness (kewajaran) merupakan prinsip antikorupsi yang mengedepankan kepatutan atau kewajaran. Prinsip *fainess* sesungguhnya lebih ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran dalam sebuah proyek/kegiatan/program.

Untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip *fairness* terutama dalam bidang penganggaran maka diperlukan 5 hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif.

3. Pendidikan Karakter sebagai

Upaya Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya pembentukan sikap anti terhadap segala jenis korupsi atau menolak adanya tindakan korupsi. Dalam pendidikan anti korupsi hal yang sangat mendasar untuk dilakukan adalah menanamkan nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, nasionalisme dan lain sebagainya. Upaya pendidikan karakter sebagai pendidikan antikorupsi merupakan salah satu strategi yang dirasa tepat. Mengingat pendidikan karakter bukanlah pendidikan untuk sekedar

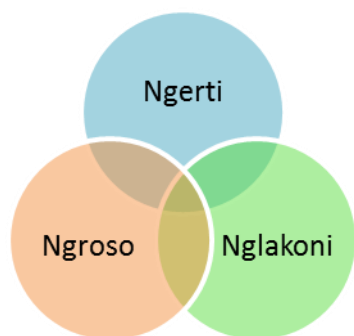
pengatahuan semata tetapi lebih pada upaya membangun kesadaran moral.

Konsep pendidikan karakter oleh Ki Hadjar Dewantara (2013:484) disebut dengan pendidikan budi pekerti, yaitu usaha memberikan nasehat-nasehat, materi-materi, anjuran-anjuran yang dapat mengarahkan anak pada keinsyafan dan kesadaran akan perbuatan baik yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, mulai dari masa kecilnya sampai pada masa dewasanya agar terbentuk watak dan kepribadian yang baik untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin.

Lickona (1991:51) menjelaskan tentang pengertian karakter dalam pembelajaran, yaitu:

Character consist of operative values, values in action. Character conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling and moral behavior. Good character consists of knowing the good, desiring the good and doing the good-habits of the mind, habits of the heart and habits of action.

karakter yang baik memiliki tiga bagian yang saling berhubungan, yakni pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral action*). Lebih lanjut Darmiyati Zuchdi (2013:17) menjelaskan bahwa pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habitua-tion*) tentang yang baik sehingga siswa paham, mampu merasakan dan mau melakukan yang baik. Pendidikan karakter ini membawa misi yang sama dengan



pendidikan akhlak atau pendidikan moral.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan yang berupaya untuk memberikan pengetahuan tentang hal baik, merasakan hal baik dan melakukan tindakan kebaikan. Pendidikan karakter bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran moralitas pentingnya etika dan norma dalam kehidupan sehari-hari.

Ki Hadjar Dewantara mengajarkan pendidikan karakter yang dikenal dengan istilah *Tringo* (*Ngerti, Ngraso lan Nglakoni*):

**Gambar 1. Karakter Menurut Ki Hadjar Dewantara
(dalam Dwi Wijayanti, 2016:6)**

- a. *Ngerti* adalah mengerti atau mengetahui. Unsur pengertian moral adalah kesadaran moral, pengertian akan nilai, rasionalitas moral (alasan mengapa harus melakukan hal itu). Dari segi kognitif ini, siswa dibantu untuk mengerti apa isi nilai yang digeluti dan mengapa nilai itu harus dilakukan dalam hidup mereka.
- b. *Ngrasa* atau ikut merasakan terhadap apa yang telah dia mengerti setelah belajar mengetahui segala sesuatu dari

guru, lingkungan dan dari alam melalui pengalamannya untuk kemudian memikirkan jalan keluar dan menentukan sikap sebagai pribadi dengan pendirian yang kokoh dan tangguh. Dengan demikian siswa sungguh mengerti apa yang akan dilakukan dan sadar akan apa yang dilakukan. Unsur perasaan moral meliputi suara hati (kesadaran akan yang baik dan tidak baik), harga diri seseorang, sikap empati terhadap orang lain, perasaan mencintai kebaikan, kontrol diri, dan rendah hati. Dalam pendidikan budi pekerti, kemampuan untuk melaksanakan dalam tindakan nyata, disertai kemauan dan kebiasaan melakukan moral harus dimunculkan dan ditingkatkan.

- c. *Nglakoni* artinya melakukan atau berbuat dengan tindakan nyata. Merasa dan mengerti saja tidak cukup, apa yang telah dimengerti dan dirasakan harus diaplikasikan dalam tindakan untuk membuktikan bahwa subyek belajar mau *nglakoni* atau melakukan *tindakan*. Tetapi melaksanakan dan menjalankan tanpa kesadaran dan tanpa pengertian tidak akan membawa hasil.

4. Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif ajaran Ki Hadjar Dewantara

Sebelum adanya istilah pendidikan antikorupsi, Ki Hadjar Dewantara telah lebih dulu mengajarkan tentang bagaimana bersikap jujur dan sehingga memiliki sikap anti terhadap korupsi, antara lain sebagai berikut:

a. *Tri Pantangan:*

- 1) Larangan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki Seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang atau menjabat suatu jabatan tertentu, tidak diperkenankan menyalahgunakan jabatannya itu untuk bertindak tidak jujur. Terlebih dalam jabatannya tersebut terdapat kepentingan hajat hidup orang banyak.
- 2) Larangan pelanggaran kesusilaan Seorang yang berbudi pekerti luhur sejogyanya menjunjung tinggi norma-norma hidup termasuk norma kesusilaan. Seseorang bertindak berdasarkan norma tentu tidak akan melakukan tindak kecurangan dalam bentuk apapun terlebih bertindak yang dapat merugikan orang lain.
- 3) Larangan penyelewengan keuangan, termasuk larangan tak tertulis, bahwa ketua perguruan menjabat sebagai ketua bagian perbendaharaan atau istri ketua perguruan menjabat sebagai ketua bagian perbendaharaan. Hal ini berarti terdapat unsur transparansi, akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengaturan keuangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab diperlukan agar tidak terjadi

penyelewengan, sehingga uang dapat digunakan sebagai mana mestinya demi kesejahteraan rakyat.

b. *Tri Ngo (Ngeri, Ngroso, lan Nglakoni)*

Mengingatkan kita agar terhadap segala ajaran hidup atau cita-cita kita diperluakan pengertian, kesadaran dan kesungguhan dalam pelaksanaannya, tau dan mengerti saja tidak cukup kalau tidak menyadari dan tidak ada artinya kalau tidak dilaksanakan dan memperjuangkannya. Ilmu tanpa amal adalah kosong dan amal tanpa ilmu adalah dusta (Tim Dosen Tamansiswa, 2014:37). Dalam ajaran ini Ki Hadjar Dewantara berusaha memberikan pemahaman bahwa penting bagi seseorang untuk mengetahui akan hal baik, merasakan hal baik dan mampu bertindak kebaikan. Jika dikaitkan dengan upaya pendidikan antikorupsi, akan diharapkan setiap siswa memiliki pengetahuan tentang bahaya korupsi, mampu berempati dan bersimpati akan kerugian atau dampak negatif dari tindakan korupsi, sehingga tertanam dalam dirinya sikap anti terhadap korupsi itu sendiri, yang pada akhirnya seseorang tadi akan melakukan kebaikan dan menghindari keburukan.

c. *Tri hayu:*

- 1) *Memayu hayuning saliro* (membahagiakan diri sendiri)
- 2) *Memayu hayuning bongso* (membahagiakan hidup bangsa)

- 3) *Memayu hayuning menungso* (membahagiakan manusia pada umumnya).

Dalam hidup ini yang dicari adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu tentunya tidaklah tertang diri sendiri tetapi juga kebahagiaan yang menyangkut kehidupan bersama. Konsep bahagia yang pertama adalah kebahagiaan diri sendiri dengan cara menysukuri setiap nikmat dari Tuhan YME, berjuang dengan cara-cara baik untuk mencapai suatu tujuan sehingga tercapai kebahagiaan. Selanjutnya yaitu membahagiakan bangsa yaitu sesama manusia, dan yang lebih luas lagi membahagiakan manusia pada umumnya dimana pun mereka berada. Kebahagiaan yang hakiki didapat manakalan melakukan kebaikan. Seseorang dengan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki hendaknya tidak hanya menggunakan itu untuk kebahagiaan dirinya sendiri melainkan dengan kekuasaannya itu ia mampu turut serta mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Hal ini mengandung arti bahwa seorang yang memiliki jawaban atau kekuasaan tadi tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merugikan orang lain.

- d. Tri N (*niteni, niroke, nambahi*)
Menurut Tim Dosen Ketamansiswaan (2014:39) mempelajari segala sesuatu bisa ditempuh dengan cara “mengenal dari mengingat” sesuatu yang dipelajari (*niteni*), menirukan sesuatu yang dipelajari (*nirokake*), serta

mengembangkan sesuatu yang dipelajari (*nambahi*). Pendidikan antikorupsi selain disampaikan dalam bentuk materi-materi untuk diingat/ dipahami oleh siswa, juga perlu adanya praktek sikap antikorupsi bahkan mampu melatih siswa untuk mengembangkan sikap antikorupsi tersebut secara lebih luas lagi dalam kehidupan sehari-hari.

- e. Metode Among (*among method*) dan Trilogi Kepemimpinan

Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, metode yang sesuai dengan pendidikan antikorupsi yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada *asih, asah* dan *asuh*. Metode ini secara teknik pengajaran meliputi kepala, hati dan panca indera (*educate the head, the heart, and the hand*). Among (mengemong) berarti memberi kebebasan pada siswa, mewajibkan para pamong agar mengikuti dan mementingkan kodrat pribadi siswa dengan tidak melupakan pengaruh-pengaruh yang melingkupinya (Tim Dosen Ketamansiswaan, 2014:34).

Dalam Sistem Among, maka setiap pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersikap: *Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa*, dan *Tutwuri handayani*.

- 1) *Ing Ngarsa Sung Tuladha* mengandung makna, sebagai among atau pendidik adalah orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman, hendaknya mampu menjadi contoh yang baik

atau dapat dijadikan sebagai “*central figure*” bagi siswa. Dalam upaya menanamkan sikap antikorupsi pada siswa, maka kepala sekolah, guru dan staf- staf sekolah hendaknya memberikan teladan yang baik kepada siswa. Misalnya mencontohkan untuk berkata jujur dan bersikap jujur. Kejujuran sangat penting mengingat sikap jujur merupakan tonggak sikap antikorupsi. Jika kepala sekolah, guru dan staf- staf terbiasa berperilaku jujur, maka siswa akan otomatis menirukan untuk bersikap jujur pula.

- 2) *Ing Madya Mangun Karsa* mengandung makna bahwa pamong atau pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuhkembangkan minat, hasrat dan kemauan siswa untuk dapat kreatif dan berkarya, guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur dan ideal. Kepala sekolah, guru dan staf- staf hendaknya mampu menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pendidikan antikorupsi, misalnya dengan melatih siswa bersikap jujur melalui kantin kejujuran, melatih siswa untuk jujur dalam mengerjakan soal-soal ujian dan lain sebagainya.
- 3) *Tutwuri Handayani* berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian

dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas dari pamrih dan jauh dari sifat *authoritative*, *possessive*, *protective* dan *permissive* yang sewenang-wenang. Memberi kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan siswa atas inisiatif sendiri dan pengalaman sendiri, supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya.

f. Tri Pusat Pendidikan

Upaya pendidikan antikorupsi akan berjalan dengan baik jika tidak hanya diterapkan dilingkungan sekolah. Karena tanggung jawab pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat terlebih lagi keluarga.

Pusat Pendidikan berlangsung dalam tiga lingkungan, yaitu dalam keluarga, di sekolah, dan dalam masyarakat, ada yang secara formal dan ada pula secara informal. Ketiga lingkungan pendidikan itu oleh Ki Hadjar Dewantara disebut Tri Pusat Pendidikan (Saefudin dan Solahudin, 2009):

- a. Lingkungan keluarga; Keluarga merupakan lingkungan pertama dimana anak mulai belajar berinteraksi. Disinilah anak akan belajar menyerap nilai dan norma dalam hidup. Jika dalam

lingkungan keluarga, anak sudah diajarkan tentang kejujuran maka sikap antikorupsi akan mudah dibentuk.

Pendidikan keluarga berfungsi sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan budi pekerti, memberikan dasar pendidikan sosial, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak.

- b. Lingkungan sekolah; sekolah merupakan lingkungan formal dimana anak tidak hanya belajar tentang sekumpulan norma tetapi juga praktek keterampilan-keterampilan tertentu. Di sekolah pengetahuan anak akan lebih terstruktur, termasuk pengetahuan tentang bahaya korupsi, kerugian yang diakibatkan dari tindakan korupsi sehingga terbentuk sikap anti terhadap korupsi. Di lingkungan sekolah juga melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar serta ilmu-ilmu lain sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan, di sekolah diberikan pelajaran budi pekerti, keagamaan,

estetika, membenarkan benar atau salah, dan sebagainya. Misalnya saja larangan mencotek saat ujian, senantiasa membiasakan berkata jujur, tidak menipu teman, dan lain sebagainya.

- c. Lingkungan masyarakat; Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini, telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Sikap dan perilaku seseorang sedikit banyak juga dipengaruhi oleh pergaulan di masyarakat. Melalui masyarakat seseorang akan mempelajari nilai-nilai dalam kehidupan bersama termasuk nilai kejujuran, tanggung jawab dan bekerjasama. Jika dalam sebuah masyarakat sudah terbentuk sikap antikorupsi, maka orang-orang yang tinggal di dalamnya juga akan tumbuh menjadi generasi yang antikorupsi. Misalnya, pemilihan kepala desa atau tokoh desa, dilakukan dengan cara jujur, tidak melakukan *money politic*, kolusi atau nepotisme yang akan merusak moral masyarakat.

KESIMPULAN

Praktek korupsi di Indonesia telah merajalela merambah hampir semua lini kehidupan masyarakat. Salah satu faktornya adalah krisis keteladanan dan luntarnya nilai kejujuran. Konsep korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dijelaskan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Faktor-faktor terjadinya korupsi di Indonesia yaitu faktor politik, faktor yuridis, dan faktor budaya, dan juga terdapat faktor lain seperti gaji yang rendah dan kurang sepenuhnya peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban dan sebagainya, warisan pemerintahan kolonial, sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak ada kesadaran bernegara, dan tidak adanya pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Pendidikan antikorupsi dilakukan dalam upaya untuk mencegah tindakan antikorupsi yang merajalela yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi dan kewarajaran. Pada dasarnya upaya pendidikan anti korupsi bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Bapak pendidikan Indonesia yaitu Ki Hadjar Dewantara telah sejak lama melakukan pendidikan anti korupsi melalui ajaran-ajarannya antara lain: Tri Pantangan (pantangan menyalahgunakan kekuasaan, keuangan dan kesusilaan), Tri Ngo (*ngerti, ngroso, lan nglakoni*), Tri Pusat Pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat), Tri Hayu (*memayu hayuning sarira, memayu hayuning*

bangsa dan memayu hayuning manungsa), Tri N (*niteni, niroke, nambahi*), metode among (*asih, asah, dan asuh*) dan yang paling penting adalah Trilogi Kepemimpinan (*ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani*). Melalui penerapan ajaran Ki Hadjar Dewantara sebagai upaya pendidikan anti korupsi, diharapkan dapat membentuk karakter warga negara yang baik dan memiliki sikap anti terhadap segala bentuk perilaku korupsi pada siswa.

Pendidikan antikorupsi bukanlah perkara mudah, sehingga membutuhkan komitmen yang kuat dan kerjasama dari berbagai pihak untuk melaksanakannya. Pihak-pihak yang terkait antara lain lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat dan juga pemerintah atau pemangku kebijakan. Pendidikan antikorupsi akan lebih baik lagi apabila tidak hanya tersirat dalam mata pelajaran tertentu seperti PPKn tetapi juga dapat dimasukkan secara tersurat dalam kurikulum mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan paper yang berjudul “Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Ajaran Ki Hadjar Dewantara”. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan hingga penerbitan paper ini. Semoga paper ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi para pembaca tentang Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Ajaran Ki Hadjar Dewantara. Saya menyadari sepenuhnya bahwa di dalam paper ini terdapat banyak kekurangan dan jauh

dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya berharap adanya kritik dan saran yang membangun. Semoga paper ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami bagi siapapun yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, Ki Hadjar.(2013). *Pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka I (Pendidikan)*. Yogyakarta: UST Press berkerjasama dengan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Dewantara, Ki Hadjar. (2013). *Pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka II (Kebudayaan)*. Yogyakarta: UST Press berkerjasama dengan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Dwi Wijayanti. 2016. *Pendidikan yang Memanusiakan Manusia (Konsep Karakter Warga Negara Ideal Ki Hadjar Dewantara)*. Lab. PKN FIS UNY bekerjasama dengan AP3KnI Wilayah DIY.
- Lickona, Thomas. (1991). *Educating for character. How our school can teach respect and responsibility*. New York: Bantam BooksMedia.
- Mas, Marwan. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurdin, Muhammad.2014. *Pendidikan Antikorupsi, Strategi Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Tim Dosen Ketamansiswaan. (2014). *Materi Kuliah Ketamansiswaan*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Saefudin, A. Azis dan M. Solahudin. (2009). *Menuju Manusia Merdeka Ki Hadjar Dewantara*. Yogyakarta: Leutika.
- Sukardi. (2008). *Metodologi penelitian pendidikan kompetensi dan praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suradi. 2006. *Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suradi. 2014. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Gava Media
- Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zuchdi, Darmiyati. 2013. *Pendidikan Karakter, Konsep Dasar dan Implementasi di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press.



Jurnal PPKn

ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (AP3Knl) - JAWA TENGAH